

**PARTISIPASI MASYARAKAT PESISIR DALAM
PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN
PESISIR TANGGUH DI KECAMATAN SUMUR
KABUPATEN PANDEGLANG**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Administrasi
Publik pada Konsentrasi Manajemen Publik Program Studi Ilmu Administrasi Publik



Disusun Oleh:

VERGIE PUTRI GAYATRI

6661111413

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
SERANG, 2018**

ABSTRAK

Vergie Putri Gayatri. 6661111413. SKRIPSI. Partisipasi Masyarakat Pesisir Dalam Program Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh Di Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang. Pembimbing I: Riny Handayani, M.Si dan Pembimbing II: Maulana Yusuf, M.Si. Program Studi Ilmu Administrasi Publik. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Program Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT) adalah kegiatan pembangunan wilayah kawasan pesisir berbasis pemberdayaan masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan kesiapan terhadap bencana dan perubahan iklim. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Partisipasi Masyarakat dalam program Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT) di Kecamatan Sumur. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori partisipasi dari Cohen dan Uphoff (Ulifah, 2003:23) dan Teori pendukung adalah teori derajat partisipasi menurut Arnstein. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan teknik observasi dan wawancara. Teknik analisis data Miles and Huberman. Hasil penelitian dapat disimpulkan partisipasi masyarakat pesisir dalam Program Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh di Kecamatan Sumur belum optimal karena beberapa faktor, rendahnya kesadaran masyarakat akan pemahaman program ini merupakan program swadaya, rendahnya kemampuan masyarakat dalam tertib administrasi, dan kesibukan masing – masing anggota yang menghambat proses kegiatan. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait 5 bina yang menjadi tujuan program PKPT ini. Saran dalam penelitian penyampaian pemahaman 5 (lima) bina yang menjadi fokus tujuan program ini, pelatihan kepada anggota kelompok masyarakat pesisir (KMP) terkait administrasi dan penguatan kelembagaan.

Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat, Pembangunan, Kelembagaan, Program Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh.

ABSTRACT

Vergie Putri Gayatri. 6661111413. SKRIPSI. The Coastal Community Participation In The Formidable Coastal Areas Development Program In Sumur Sub-district Pandeglang District. Advisor I: Riny Handayani, M.Si and Advisor II: Maulana Yusuf, M.Si. Public Administration Science Program. Faculty of Social Science and Political Science. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Formidable Coastal Development Program (PKPT) is a coastal area development activity based on community empowerment. The goal is to improve the welfare of coastal communities and disaster preparedness and climate change. The purpose of this study is to know the Community Participation in the Formidable Coastal Development Program (PKPT) in Sumur Sub-district. The theory used in this research is the theory of participation by Cohen and Uphoff (Ulifah, 2003: 23) and supported by ladder of participation theory by Arnstein. The research method used is qualitative with observation and interview technique along with Miles and Huberman's data analysis techniques. The result of this research can be concluded that the participation of coastal communities in the Formidable Coastal Development Program in Sumur sub-district has not been optimal due to several factors, the low awareness and the lack of public understanding about the program as a self-help program, the low capacity of the community in the administrative discipline, and time management of each member that impedes the process activities. Lack of public understanding related to the five counseling that became the objective of this PKPT program. This research suggest that the sozialitation to the entire community about this program as a self-help program is needed to increase the community awareness that they will not get personal benefits, to emphasize the delivery of understanding 5 counseling that became the focus of this program objectives.

Keywords : Community Participation, Development, Institutionalization, Formidable Coastal Development Program.

LEMBAR PERSETUJUAN

Nama : **VERGIE PUTRI GAYATRI**
NIM : **6661111413**
Judul Skripsi : **PARTISIPASI MASYARAKAT PESISIR DALAM PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR TANGGUH DI KECAMATAN SUMUR KABUPATEN PANDEGLANG**

Serang, Juni 2018

Skripsi ini Telah Disetujui Untuk Disajikan

Menyetujui,

Pembimbing I



Riny Handayani, M.Si
NIP. 197601062006042007

Pembimbing II



Maulana Yusuf, M.Si
NIP. 197603192005011004

Mengetahui,

Dekan FISIP


Dr. Agus Sja'ari, M.Si
NIP. 197108242005011002

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : VERGIE PUTRI GAYATRI

NIM : 6661111413

Judul Skripsi : **PARTISIPASI MASYARAKAT PESISIR DALAM
PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
TANGGUH DI KECAMATAN SUMUR KABUPATEN
PANDEGLANG**

Telah diuji di hadapan Dewan Penguji Sidang Skripsi di Serang, tanggal 07 Juni
tahun 2018 dan dinyatakan **LULUS**.

Serang, 07 Juni 2018

Ketua Penguji:

Riswanda, Ph.D

NIP. 198101122008121001

Anggota:

Dr. Agus Sjafari, M.Si

NIP. 197108242005011005

Anggota:

Maulana Yusuf, M.Si

NIP. 197501312005012004



Dekan Fisip Untirta

Dr. Agus Sjafari, M.Si
NIP. 197108242005011002

Mengetahui:



Ketua Program Studi

Listyaningsih, M.Si
NIP. 197603292003122001

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Vergie Putri Gayatri
NIM : 6661111413
Tempat Tanggal Lahir : Pandeglang, 30 November 1992
Progran Studi : Ilmu Administrasi Publik

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul PARTISIPASI MASYARAKAT PESISIR DALAM PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR TANGGUH KECAMATAN SUMUR KABUPATEN PANDEGLANG adalah hasil karya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti mengandung unsur plagiat, maka gelar kesarjanaan saya bisa dicabut.

Serang, Juni 2018



Vergie Putri Gayatri
Vergie Putri Gayatri

*"Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah
melainkan orang - orang yang kafir"
Qs. Yusuf :81*



*Skripsi ini aku persembahkan untuk
Ibuku tersayang dan keluargaku semua ini berkat
kalian yang senantiasa memberikan doa & semangat*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji dan syukur *Alhamdulillah* peneliti panjatkan kehadiran ALLAH S.W.T karena ridho, rahmat, karunia dan kasih sayang-Nya yang melimpah sehingga peneliti dapat menyelesaikan proposal skripsi ini. Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana S1 (Strata satu) Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Penelitian ini berjudul **“Partisipasi Masyarakat Dalam Program Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh di Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang”**. Penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat terealisasi tanpa adanya bimbingan, bantuan, nasehat, saran, dan perhatian berbagai pihak. Pada kesempatan ini merupakan suatu kebangga bagi penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Sholeh Hidayat, M.Pd., sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
2. Bapak Dr. Agus Sjafari, M.Si., sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. Ibu Rahmawati, S.Sos., M.Si., sebagai Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
4. Bapak Iman Mukroman, M.Ikom., sebagai Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

5. Bapak Kandung Sapto Nugroho, M.Si., sebagai Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
6. Ibu Listyaningsih, S.Sos., M.Si., sebagai Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
7. Ibu Dr. Arenawati., M.Si., sebagai Sekeretaris Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
8. Ibu Riny Handayani, M.Si., sebagai Dosen Pembimbing I atas masukan, kebaikan, dan waktu yang telah diberikan kepada peneliti dalam proses pembuatan skripsi ini.
9. Bapak Maulana Yusuf, M.Si., sebagai sebagai Dosen Pembimbing II atas masukan, kebaikan, dan waktu yang telah diberikan kepada peneliti dalam proses pembuatan skripsi ini.
10. Ibuku tercinta Vera Silvia, ucapan cinta kasih yang tulus dan tak terhingga atas kekuatan, motivasi, dan kasih sayangnya selama ini. Semua ini untuk ibu, terima kasih atas segala pengorbananya dan menjadi *single fighter* dalam membesarkan dan mendidik saya.
11. Alm. Ayah, Oma, Ua, Sepupu-sepupu dan seluruh anggota keluarga yang telah memberikan doa, hiburan dan motivasinya kepada peneliti. Terimakasih atas pengertian dan kasih sayangnya.
12. M. E. Dzikri Fadhilah, S.Ikom terima kasih atas bantuan, kesabaran, waktu, tenaga, dan motivasinya kepada peneliti.
13. Seluruh pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pandeglang. Terima kasih atas waktu dan ilmunya.

14. Seluruh Perangkat Desa dan Warga Desa Cigorondong, Taman jaya, dan Ujung Jaya. Terima kasih atas waktu dan budi baik kalian.
15. Teman-teman G.A.C Anis, Pepe, Kiki, Aliya, Alfi, Lena, Iwan, dan Mursi. Terima kasih telah memberikan kenangan baik dari awal kuliah hingga sekarang.
16. Teman-teman ANE B 2011, Shella, Cindy, Meimy, Dinar, Sarah, Andri, Dimas, Hafidz, Eko, dan yang tak bisa peneliti sebutkan satu-persatu, terima kasih atas kekeluargaannya.
17. Serta semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat dituliskan satu-persatu.

Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna baik dari teknik penulisan maupun isi dari materi yang peneliti sajikan. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan juga kemampuan yang dimiliki peneliti. Oleh karena itu sebagai peneliti mengharapkan, masukan, krikitik dan saran yang membangun guna lebih baik di masa depan.

Akhir kata semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca.

Wassalamualaikum Warahmahtullahi Wabarakatuh.

Serang, Juni 2018

Peneliti

Vergie Putri Gayatri

DAFTAR ISI

ABSTRAK

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PERSETUJUAN

PERNYATAAN ORISINALITAS

MOTTO

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	13
1.3 Batasan Masalah	14
1.4 Rumusan Masalah	14
1.5 Tujuan Penelitian	14
1.6 Manfaat Penelitian	15
BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN DAN ASUMSI DASAR PENELITIAN.....	16
2.1 Konsep Partisipasi Masyarakat.....	16
2.1.1 Konsep Partisipasi.....	16
2.1.2 Konsep Masyarakat	22
2.1.3 Konsep Partisipasi Masyarakat	23
2.1.4 Derajat Partisipasi Masyarakat	29
2.1.5 Faktor – Faktor Yang Mendorong Partisipasi	34
2.1.6 Konsep Pemberdayaan Masyarakat	36
2.1.7 Konsep Masyarakat Pesisir	38
2.1.8 Konsep Pembangunan Sosial.....	41
2.1.8 Program Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh	44

2.2 Penelitian Terdahulu	50
2.3 Kerangka Berpikir.....	52
2.4 Asumsi Dasar	54
BAB III METODE PENELITIAN	56
3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian	56
3.2 Fokus Penelitian	56
3.3 Lokasi Penelitian	57
3.4 Variabel Penelitian	57
3.5 Instrumen Penelitian	60
3.6 Informan Penelitian	60
3.7 Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data	61
3.8 Jadwal Penelitian	68
BAB IV HASIL PENELITIAN	69
4.1 Deskripsi Obyek Penelitian	69
4.1.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian	69
4.2 Deskripsi Data	77
4.2.1 Deskripsi Data Penelitian	77
4.2.2 Deskripsi Informan Penelitian	77
4.3 Analisis Hasil Penelitian	79
4.3.1 Partisipasi Dalam Perencanaan	79
4.3.2 Partisipasi Dalam Pelaksanaan	87
4.3.3 Partisipasi Dalam Pengawasan	100
4.3.4 Partisipasi Dalam Pemeliharaan dan Pemanfaatan Hasil	104
4.4 Temuan Lapangan	111
BAB V PENUTUP	123
5.1 Kesimpulan	123
5.2 Saran	127
DAFTAR PUSTAKA	viii
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Kelompok Masyarakat Pesisir dalam Program Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh di Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang	5
Tabel 1.2 Jumlah Kepala Keluarga Menurut Status Pendidikan Kecamatan Sumur	7
Tabel 1.3 Hasil Tahapan Keluarga Sejahtera	8
Tabel 1.4 Permasalahn Partisipasi Masyarakat dalam Program Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh per Desa	9
Tabel 3.1 Informan Penelitian	61
Tabel 3.2 Pedoman Wawancara	65
Tabel 3.3 Jadwal Penelitian	68
Tabel 4.1 Informan Penelitian	78
Tabel 4.2 Temuan Lapangan Partisipasi dalam Perencanaan	85
Tabel 4.3 Temuan Lapangan Partisipasi dalam Pelaksanaan	95
Tabel 4.4 Temuan Lapangan Partisipasi dalam Pengawasan	103
Tabel 4.5 Temuan Lapangan dalam Pemeliharaan dan Pemanfaatan Hasil	109
Tabel 4.6 Rekapitulasi Temuan Lapangan	111

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Gambar Alur Kerangka Berpikir	53
Gambar 4.1 Proses Perencanaan dalam Program Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh di Desa Cigorondong, Desa Tamanjaya dan Desa Ujung jaya	86
Gambar 4.2 Musyawarah Pembentukan Kelompok Masyarakat Pesisir desa Ujung Jaya	86
Gambar 4.3 Sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pandeglang di desa Cigorondong	87
Gambar 4.4 Proses Pelaksanaan dalam Program Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh di Desa Cigorondong, Desa Tamanjaya dan Desa Ujung jaya	97
Gambar 4.5 Survei dan pengukuran jalan desa Ujung Jaya	98
Gambar 4.6 Survei lokasi sarana air bersih (SAB) Desa Cigorondong	99

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara kepulauan dan memiliki kekayaan laut yang berlimpah, sebagai negara kepulauan Indonesia memiliki wilayah laut seluas 5,8 juta km² yang terdiri dari wilayah teritorial sebesar 3,2 juta km² dan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) 2,7 juta km². Selain itu, terdapat 17.504 pulau di Indonesia dengan garis pantai sepanjang 95.181 km. Dengan cakupan yang demikian besar dan luas, tentu saja maritim Indonesia mengandung keanekaragaman alam laut yang potensial, baik hayati dan nonhayati. (Sumber : Ririn Ambarwati, 2014. Membangun Kelautan Untuk Mengembalikan Kejayaan Sebagai Negara Maritim <http://www.ppk-kp3k.kkp.go.id>).

Tetapi pada kenyataannya Indonesia, belum mampu memberdayakan potensi ekonomi maritim. Negeri ini juga belum mampu menjadikan sumber kekayaan laut menjadi sumber kemajuan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Seharusnya kebijakan pembangunan wilayah pesisir mendapat perhatian yang serius dari pemerintah. Sejak dulu program pemberdayaan masyarakat pesisir belumlah tergarap secara proporsional. Pemanfaatan sumber daya alam kelautan masih dilakukan secara parsial dan kurang didukung oleh teknologi yang tepat guna sehingga hasil yang diperoleh kurang maksimal. Kenyataan tersebut

berdampak pada kehidupan sosial ekonomi masyarakat pesisir yang tergolong rendah bahkan sebagian hidup dalam garis kemiskinan, sangat minimnya prasarana di wilayah pesisir, terjadinya abrasi wilayah pesisir dan pantai, pengerusakan ekosistem laut dan terumbu karang, kurangnya promosi pariwisata serta belum teroptimalkannya pemanfaatan sumber daya perikanan dan kelautan.

Selain itu, Indonesia sebagai negara kepulauan dan kelautan memiliki potensi bencana yang besar seperti gempa bumi, tsunami, erosi, banjir, gelombang ekstrem, dan kenaikan paras air laut. Karena itu, pembangunan kelautan dan perikanan akan diarahkan pada pembangunan ekonomi yang seimbang antara pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dengan upaya pengelolaan lingkungan secara optimal dan berkelanjutan. Perubahan orientasi kebijakan dan keseimbangan antara pembangunan berbasis daratan dan kelautan perlu mendapat dukungan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi, akan tetapi tidak merusak alam. Dan yang merupakan kunci keberhasilan kebijakan kelautan dan perikanan adalah sinergi dan penguatan kelembagaan baik pemerintah maupun masyarakat merupakan faktor kunci upaya mitigasi bencana.

Seperti apa yang diungkapkan Soerjono Soekanto (2005:25) dalam bukunya mendefinisikan pembangunan sebagai suatu bentuk perubahan sosial yang terarah, terencana dan dikehendaki melalui berbagai macam kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam konteks ini, masyarakat hendaknya dipahami sebagai setiap orang yang berada diluar sektor publik atau pemerintahan yang memiliki tanggung jawab yang cukup besar dalam menciptakan ekonomi daerah. Sanit menandakan dalam Kaho (2007:126), “. . . apabila kita berbicara mengenai pembangunan, sesungguhnya yang diperbincangkan ialah keterlibatan keseluruhan masyarakat sebagai sistem terhadap masalah yang dihadapinya dan pencarian jawaban bagi masalah tersebut”.

Kawasan pesisir di Indonesia dihadapkan pada empat persoalan pokok, yakni :

1. Tingginya tingkat kemiskinan masyarakat pesisir;
2. Tingginya kerusakan sumber daya alam pesisir;
3. Rendahnya kemandirian organisasi sosial dan lunturnya nilai-nilai budaya lokal; dan
4. Rendahnya kualitas infrastruktur dan kesehatan lingkungan pemukiman. (Sumber : Kementerian Kelautan dan Perikanan, Tahun 2012). Keempat persoalan pokok ini juga memberikan andil terhadap tingginya tingkat kerentanan terhadap bencana alam perubahan iklim yang cukup tinggi di kawasan-kawasan pesisir.

Kegiatan pembangunan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil mempunyai potensi dampak kerusakan habitat, perubahan proses alami ekosistem dan pencemaran. Disisi lain, juga terjadi berbagai permasalahan seperti konflik kepentingan pembangunan, kelembagaan, dan tingkatan pemerintah. Pembangunan yang tidak berintegrasi dengan baik, tanpa pedoman dan mitigasi lingkungan yang tepat, akan menghasilkan permasalahan dan konflik. Oleh karena itu keterpaduan perlu dilakukan untuk mempromosikan kepentingan antar sektor, tingkatan pemerintah, ruang darat dan laut, ilmu pengelolaan, serta internasional. Lahirnya Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, maka dipandang perlu adanya upaya mendorong pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait dalam hal melakukan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu.

Menjawab persoalan tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2012 – 2014 telah melaksanakan program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT) yang menyasar ke 66 Desa pesisir di 22 Kabupaten/Kota. Dalam

kurun waktu tiga tahun tersebut kegiatan program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT) terbukti telah meningkatkan ketangguhan desa pesisir pelaksana kegiatan. Dengan disahkannya dan mulai diterapkannya Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, mendorong kegiatan PDPT untuk melakukan penyesuaian cakupan wilayah. Cakupan wilayah yang akan disasar pada pengembangan tahapan berikutnya meliputi kawasan pesisir. Kondisi ini berimplikasi dari Program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT) berakselerasi menjadi Program Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT). Program Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT) diharapkan mampu memberikan daya dorong bagi kemajuan kawasan pesisir di Indonesia.

Menyambut program Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh pada tahun 2015 lalu, Pemerintah Kabupaten Pandeglang telah menetapkan kawasan pesisir yang sesuai dengan kriteria Program tersebut, dimana kawasan tersebut terletak di wilayah Kecamatan Sumur dan terdiri dari tiga desa yang terletak dalam satu hamparan. Adapun desa-desa yang termasuk dalam penetapan kawasan tersebut diantara lain ; Desa Cigorondong, Desa Taman Jaya, Desa Ujung Jaya. Program Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh ini bertujuan untuk menjadikan masyarakat sebagai pelaku pembangunan dan bertanggung jawab atas adanya pembangunan dengan diwadahi oleh Kelompok Masyarakat Pesisir. Program PKPT sudah berjalan selama dua periode. Tahap pertama pada tahun 2015 dan tahap kedua pada tahun 2016. Tahapan periode dengan jumlah KMP (Kelompok Masyarakat Pesisir) dapat dilihat pada tabel 1.1.

Tabel 1.1

Jumlah Kelompok Masyarakat Pesisir dalam Program Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh di Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang

NO.	NAMA DESA	KELOMPOK MASYARAKAT PESISIR	
		PERIODE I	PERIODE II
1.	Cigorondong	KMP Mitra Jaya	KMP Mitra Jaya KMP Sentosa
2.	Taman Jaya	KMP Harapan Jaya :	KMP Harapan Jaya KMP Harapan Maju
3.	Ujung Jaya	KMP Pangkalan Maju	KMP Pangkalan Maju KMP Pangkalan Baru

Sumber : Hasil Observasi Lapangan, 2016

Secara umum tiga desa tersebut memiliki karakteristik yang sama, merupakan desa penyangga Kawasan Konservasi Alam Taman Nasional Ujung Kulon dan sebelah barat langsung berbatasan dengan Selat Sunda. Adapun kegiatan yang dilakukan setiap Kelompok Masyarakat Pesisir di Kecamatan Sumur ini tidaklah sama, karena kegiatan pembangunan disesuaikan dengan hal paling utama yang di butuhkan setiap desa.

Sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan laut, kawasan ini memiliki permasalahan yang sama antara lain; Kerentanan daerah dalam menghadapi bencana dan perubahan iklim. Wilayah pesisir sangat rentan terkena dampak perubahan iklim yang dapat memicu bahaya seperti; naiknya permukaan air laut (Sea Level Rise), banjir rob, dan variabilitas musiman (El Nino, gelombang badai, dan kejadian ekstrim lainnya) hal ini dapat menyebabkan perubahan lingkungan antara lain erosi pantai dan pengikisan kawasan pesisir. Dalam beberapa tahun terakhir kawasan pesisir dari kawasan ini mengalami

pengurangan wilayah berupa penyusutan yang mengakibatkan fenomena alam berupa naiknya permukaan air laut disertai gelombang rob yang kerap terjadi akibat perubahan iklim global. Pengurangan wilayah tersebut terjadi 10 tahun terakhir, tercatat 50 meter wilayah pesisir hilang terkena abrasi (Sumber : Dinas Kelautan dan Peikanan Kabupaten Pandeglang Tahun 2015).

Pengurangan wilayah ini berdampak pada perekonomian masyarakat desa, yang mengandalkan kawasan pesisir sebagai mata pencaharian. Selain itu, sering pula terjadi bencana gempa bumi. Dikarenakan daerah tiga desa ini dekat dengan Pulau Panaitan yang merupakan daerah rawan gempa. Kondisi alam seperti ini jelas membutuhkan perhatian yang serius, perlu adanya perbaikan dan pengembangan wilayah tanpa merusak wilayah yang ada. Diperlukan sistem pemahaman sistem Mitigasi Bencana kepada masyarakat kawasan pesisir ini, sehingga terhindar dari potensi terjadinya bencana.

Selain itu, kerusakan wilayah pesisir disebabkan oleh terjadinya alih fungsi lahan, yang semula sebagai kawasan hutan vegetasi mangrove berubah menjadi tambak udang. Rusaknya ekosistem mangrove berdampak pada hilangnya mata pencaharian masyarakat yang menggantungkan hidupnya dikawasan pesisir tersebut. Penggunaan obat-obat kimia dalam pertumbuhan udang tambak dapat menyebabkan hilangnya biota laut disepanjang kawasan ini. Selain karena hadirnya tambak, kerusakan mangrove juga disebabkan oleh pengambilan kayu mangrove oleh masyarakat sekitar. Bila tidak segera ditangani hal ini dapat mengancam keberlangsungan ekosistem mangrove di kawasan ini.

Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia. Terlihat dari tingkat pendidikan masyarakat di ketiga desa ini masih rendah, masyarakat sebagian besar hanya tamatan Sekolah Dasar, bahkan tidak sedikit masyarakat yang tidak tamat sekolah dasar. Kondisi ini menyebabkan, mata pencaharian masyarakat hanya mengandalkan alam. Dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari masyarakat sebagian besar menjadi nelayan, hal ini sesuai dengan kondisi kawasan pesisir, dan selain nelayan sebagian besar masyarakat bermata pencaharian sebagai petani karena di daerah ini masih banyak areal persawahan. Status pendidikan kepala keluarga dapat dilihat dalam tabel 1.3

Tabel 1.3

Jumlah Kepala Keluarga Menurut Status Pendidikan Kecamatan Sumur

No.	Nama Desa	Nomor Kode Desa	Status Pendidikan			
			Tidak Tamat SD	Tamat SD-SMP	Tamat SMA	Tamat AK/PT
1.	Ujungjaya	36.01.01.2007	79	889	66	14
2.	Tamanjaya	36.01.01.2006	91	667	85	27
3.	Cigorondong	36.01.01.2005	150	630	69	35
4.	Tunggaljaya	36.01.01.2004	284	521	167	109
5.	Kerta Mukti	36.01.01.2003	276	375	310	47
6.	Kerta Jaya	36.01.01.2002	210	463	242	73
7.	Sumber Jaya	36.01.01.2001	63	592	237	113
Kecamatan Sumur			1.153	4.137	1.176	412

Sumber : Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pandeglang 2016

Tingkat kemiskinan masih tinggi. Pada umumnya masyarakat pesisir merupakan masyarakat yang hidupnya bergantung pada kondisi lingkungan, sama halnya dengan kondisi masyarakat yang ada di ketiga desa ini yang pada umumnya bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan. Nelayan di kawasan

ini merupakan nelayan tradisional masih menggunakan alat tangkap ikan seadanya, tanpa didukung oleh alat tangkap yang modern. Hal tersebut sudah menjadi budaya masyarakat nelayan di ketiga desa tersebut yang sampai saat ini masih bertahan. Sehingga hasil tangkapan ikan yang didapat terkadang tak dapat mencukupi kebutuhan pokok bagi keluarga nelayan.

Tabel 1.4
Hasil Tahapan Keluarga Sejahtera

No.	Nama Desa	Hasil Tahapan Keluarga Sejahtera					Jumlah
		Keluarga Pra Sejahtera	Keluarga Sejahtera I	Keluarga Sejahtera II	Keluarga Sejahtera III	Keluarga Sejahtera III Plus	
1.	Ujungjaya	448	325	220	57	25	1.075
2.	Tamanjaya	433	335	66	50	37	931
3.	Cigorondong	472	305	73	52	43	945
4.	Tunggaljaya	395	343	300	100	38	1.176
5.	Kerta Mukti	150	220	261	105	78	814
6.	Kerta Jaya	176	227	256	175	65	899
7.	Sumber Jaya	170	257	250	179	107	1.026
Kecamatan Sumur		2.244	2.012	1.426	718	393	6.793

Sumber : Kecamatan Sumur dalam Angka 2017

Minimnya infrastruktur dan kesehatan lingkungan. Infrastruktur di ketiga desa ini masih minim bahkan beberapa Kampung di Ujung Jaya dan Taman Jaya nyaris tak tersentuh pembangunan, jalanan masih berupa tanah tanpa drainase dan sebagian sudah jalan berbatu, keterbatasan sumber daya desa ini menyulitkan mobilitas masyarakat. Selain itu, sistem drainase yang buruk membuat kawasan ini dilanda banjir ketika musim penghujan tiba. Kondisi ini diperparah dengan sulitnya air bersih dan sarana MCK.

Berdasarkan wawancara observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, ditemukan beberapa masalah yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam Program Pengembangan Pesisir Tangguh ini. Dengan telah dilaksanakannya selama dua periode 2015-2016, partisipasi masyarakat di lapangan masih rendah, dilihat dari mulai proses hingga pemanfaatan hasil pembangunan. Permasalahan per Desa dapat dilihat di tabel 1.5 di bawah ini.

Tabel 1.5

Permasalahan Partisipasi Masyarakat dalam Program Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh per Desa.

NO.	NAMA DESA	PERMASALAHAN
1.	Cigorondong	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih adanya masyarakat yang mengharapkan keuntungan pribadi dari partisipasi mereka berupa tenaga yang mereka lakukan. 2. Masyarakat cenderung mengharapkan pembangunan berupa fisik saja, tidak pembangunan yang nanti nya bersifat berkelanjutan.
2.	Taman Jaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya koordinasi dan kerja sama dalam proses perencanaan kegiatan yang akan dilaksanakan. 2. Rendahnya kemandirian dan kemampuan organisasi sosial desa dalam menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam program PKPT.
3.	Ujung Jaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurang efektifnya peran masyarakat dalam pengawasan kegiatan pengawasan kegiatan masih dilakukan sepenuhnya oleh tenaga pendamping. 2. Adanya kecemburuan sosial terhadap KMP yang mendapatkan kegiatan, masyarakat ingin setiap kegiatan yang diajukan dapat dilaksanakan.

Sumber : Peneliti dari hasil wawancara dan observasi awal, 2016

Pertama, dalam pelaksanaan Bina Lingkungan yaitu perbaikan jalan, banyak masyarakat yang mengharapkan keuntungan pribadi dari partisipasi mereka berupa tenaga yang mereka lakukan. Seperti yang disampaikan, Bapak Maman selaku Kepala Bidang Kelautan dalam kunjungannya ke Desa

Cigorondong melihat proses pembangunan jalan masih saja ada warga yang mengeluhkan bahwa ia tidak mendapat upah sepeserpun dalam proses kegiatan. (Hasil wawancara pada Tanggal 15 Agustus 2016, Pukul. 09.30 WIB di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pandeglang)

Kedua, masyarakat cenderung mengharapkan pembangunan berupa fisik saja, bukan pembangunan yang nantinya bersifat berkelanjutan dan bermanfaat bermanfaat bagi perekonomian masyarakat. Mereka mengharapkan hasil yang instan, seperti halnya dalam pemilihan kegiatan pembangunan umumnya masyarakat ingin setiap program yang diusulkan dapat dilaksanakan. (Hasil wawancara dengan Bapak Hendi Suryadi selaku pendamping Desa Cigorondong pada Tanggal, 08 September 2016 pukul. 16.30 WIB di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pandeglang)

Ketiga, kurangnya koordinasi dan kerja sama dalam proses perencanaan kegiatan yang akan dilaksanakan, diantara lembaga-lembaga yang ada di pemerintahan desa, seperti pemerintah desa, BPD, PKK, KMP, Karang Taruna. Terlihat didalam Rencana Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh Kabupaten Pandeglang Tahun yang disusun oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pandeglang 2015 terdapat beberapa laporan tentang karakteristik desa yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, diagram tentang desa yang dibuat tanpa keterangan, dan karakteristik dari ketiga desa itu sama persis. Terlihat rencana tersebut dibuat secara sepihak oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pandeglang dan kelompok-kelompok kepentingan di desa tersebut tanpa adanya koordinasi terlebih dahulu dengan masyarakat setempat, sehingga rencana kurang

sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Menurut bapak Edi Junaedi, ketua Badan Pemberdayaan Desa di Desa Taman Jaya menuturkan bahwa kurangnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan terkait program PKPT ini, banyak warga yang tidak diikutkan dalam musyawarah (rapat) rencana pembangunan desa dan pemilihan KMP (Kelompok Masyarakat Pesisir) diambil dari orang-orang yang memiliki kedekatan dengan Pemerintah Desa. (Hasil wawancara pada Tanggal 18 Agustus 2016, Pukul. 10.20 WIB di Desa Taman Jaya)

Keempat, rendahnya kemandirian organisasi sosial desa dalam menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam program Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh. Kualitas SDM masyarakat yang masih rendah, terlihat dari tingkat pendidikan masyarakat yang masih didominasi oleh masyarakat yang hanya lulus Sekolah Dasar, sehingga berpengaruh terhadap kondisi sosial masyarakat yang tumbuh mandiri. Tidak jarang masyarakat terkadang acuh tak acuh dalam program desa maupun kegiatan yang ada di desa. Masyarakat harus diiming-imingi dengan hadiah agar mau ikut berpartisipasi. (Hasil wawancara dengan pendamping program PKPT Desa Taman Jaya Bapak Surpriani pada tanggal Senin, 11 Agustus 2016 Pukul. 13.30 WIB)

Kelima, kurang efektifnya peran masyarakat dalam pengawasan kegiatan. Pengawasan kegiatan masih dilakukan sepenuhnya oleh tenaga pendamping. Menurut Bapak Fauzan selaku Koordinator Pendamping Program Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT) beberapa kelompok masyarakat masih mengkritisi dana saja, tetapi tidak ikut mengawasi kegiatan program sudah sesuai

atau belum dengan tujuan awal perencanaan. (Hasil wawancara pada Tanggal 10 Agustus 2016, Pukul. 14.50 WIB di Desa Ujung Jaya)

Keenam, adanya kecemburuan sosial terhadap Kelompok Masyarakat Pesisir yang mendapatkan kegiatan program, masyarakat ingin setiap KMP dapat dilaksanakan. Berbanding terbalik dengan Desa Cigorondong, di Desa Ujung Jaya justru banyak masyarakat yang ingin membuat KMP, namun karena keterbatasan dana yang digulikan hanya KMP yang mengajukan kegiatan yang sesuai dengan program saja yang dipilih sebagai penanggung jawab kegiatan. (Hasil wawancara dengan Bapak Kamirudin selaku Kepala Desa Ujung Jaya, pada Tanggal 11 September 2016 Pukul. 14.30 WIB di Desa Ujung Jaya)

Setiap wilayah berkeinginan agar di wilayahnya terjadi pembangunan yang dapat dinikmati oleh masyarakat di wilayah tersebut. Artinya, bahwa pembangunan yang perlu dilakukan bukanlah pembangunan yang bersifat fisik saja, melainkan pembangunan yang mengarah kepada pembangunan masyarakat (*community development*). Setiap kegiatan pembangunan masyarakat berkaitan dengan proses pemberdayaan masyarakat yang mampu memanfaatkan hasil pembangunan itu sendiri. Pembangunan di suatu wilayah harus melibatkan semua elemen terkait seperti, wilayah pesisir dan laut merupakan sebuah kawasan dinamis yang strategis untuk pengembangan berbagai sektor usaha. Berkembangnya sejumlah sektor usaha, dengan sejumlah *stakeholder* dalam pembangunan wilayah pesisir dan laut, tanpa adanya keterpaduan dalam pengembangannya justru akan menciptakan konflik-konflik baru. Untuk memecahkan permasalahan konflik antar kepentingan dalam pembangunan

kawasan pesisir dan laut. Memberdayakan masyarakat pesisir berarti menciptakan peluang bagi masyarakat pesisir untuk menentukan kebutuhannya, merencanakan dan melaksanakan kegiatannya, yang akhirnya menciptakan kemandirian permanen dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Dari latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul **“Partisipasi Masyarakat Pesisir Dalam Program Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT) Di Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, masalah yang timbul antara lain:

1. Masih adanya masyarakat yang mengharapkan keuntungan pribadi dari partisipasi mereka berupa tenaga yang mereka lakukan.
2. Masyarakat cenderung mengharapkan pembangunan berupa fisik saja, tidak pembangunan yang nanti nya bersifat berkelanjutan.
3. Kurangnya koordinasi dan kerja sama dalam proses perencanaan kegiatan yang akan dilaksanakan.
4. Rendahnya kemandirian dan kemampuan organisasi sosial desa dalam menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam Program Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh.

5. Kurang efektifnya peran masyarakat dalam pengawasan kegiatan pengawasan kegiatan masih dilakukan sepenuhnya oleh tenaga pendamping.
6. Adanya kecemburuan sosial terhadap Kelompok Masyarakat Pesisir yang mendapatkan kegiatan, masyarakat ingin setiap kegiatan yang diajukan dapat dilaksanakan.

1.3 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti membatasi ruang lingkup penelitian hanya pada aspek yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat pesisir. Memberdayakan masyarakat pesisir berarti menciptakan peluang bagi masyarakat pesisir untuk menentukan kebutuhannya, merencanakan dan melaksanakan kegiatannya, yang akhirnya menciptakan kemandirian permanen dalam kehidupan masyarakat itu sendiri.

1.4 Rumusan Masalah

Bagaimana partisipasi masyarakat pesisir Kecamatan Sumur dalam Program Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh?

1.5 Tujuan Penelitian

Mengetahui partisipasi masyarakat Kecamatan Sumur dalam Program Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat untuk:

1. Kegunaan Praktis

Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang, hasil penelitian dapat diharapkan menjadi bahan masukan yang berguna untuk menciptakan pemberdayaan masyarakat pesisir sesuai dengan karakteristik maupun kebutuhan yang ada di masyarakat, guna terciptanya kualitas yang diharapkan oleh masyarakat.

Bagi Peneliti, seluruh rangkaian kegiatan dan hasil penelitian, diharapkan dapat lebih memantapkan penguasaan fungsi keilmuan yang sudah dipelajari selama mengikuti program perkuliahan Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

2. Kegunaan Akademis

Bagi perguruan tinggi, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dokumen akademik yang berguna untuk dijadikan acuan bagi civitas akademika.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN DAN ASUMSI DASAR PENELITIAN

2.1 Konsep Partisipasi Masyarakat

2.1.1 Partisipasi

Partisipasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perihal turut berperan serta suatu kegiatan. Kemudian Partisipasi menurut Bhattachryya Ndraha dalam Wahyu MS (2005:224) adalah pengambilan bagian dalam kegiatan bersama. Dilanjutkan menurut Mubyarto masih dalam Wahyu MS (2005:25) partisipasi adalah sebagai kesediaan untuk membantu keberhasilan setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan dirinya sendiri.

Sedangkan Nelson dalam Tangkilisan (2005:323-324) menyebutkan terdapat dua macam partisipasi. Pertama partisipasi horizontal yaitu partisipasi di antara sesama warga atau anggota masyarakat, di mana masyarakat mempunyai kemampuan berprakarsa dalam menyelesaikan secara bersama suatu kegiatan pembangunan. Kedua partisipasi vertikal yaitu partisipasi antara masyarakat sebagai suatu keseluruhan dengan pemerintah, dalam hubungan dimana masyarakat berada pada posisi sebagai pengikut atau klien.

“Partisipasi adalah sebuah proses yang melalui *stakeholders*. Mempengaruhi dan membagi kontrol atas prakarsa pembangunan. Dan keputusan sumberdaya yang mempengaruhinya. Partisipasi juga berarti kemitraan yang dibangun berdasarkan dialog diantara berbagai macam perilaku, yang selama dialog tersebut agenda disusun bersama, pandangan lokal dan pengalaman asli secara hati-hati diusahakan dan dihargai”. (Muluk, 2002:9)

Slamet M (2003:08) memaknai partisipasi masyarakat dalam pembangunan sebagai ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut serta dalam kegiatan-kegiatan pembangunan, dan ikut serta memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan tersebut.

Dalam rangka pembangunan bangsa yang meliputi segala aspek kehidupan, partisipasi masyarakat memainkan peranan penting, bahkan Tjokroamidjojo dalam Kaho (2007:125) menegaskan bahwa pembangunan yang meliputi segala segi kehidupan, politik, ekonomi, dan sosial budaya itu baru akan berhasil apabila merupakan kegiatan yang melibatkan partisipasi dari seluruh rakyat didalam suatu Negara.

Sanit menandakan dalam Kaho (2007:126), “... apabila kita berbicara mengenai pembangunan, sesungguhnya yang diperbincangkan ialah keterlibatan keseluruhan masyarakat sebagai sistem terhadap masalah yang dihadapinya dan pencarian jawaban bagi masalah tersebut.”

“Participation refers to an active process whereby benefictartes influences the direction and execution of development projects rather than merely receive a share of project benefits”. (Paul 1987:24 dalam Makmur 2008:156)

Definisi di atas melihat keterlibatan masyarakat mulai dari tahap pembuatan keputusan, penerapan keputusan, penikmatan keputusan, dan evaluasi. Konsep tersebut menumbuhkan daya kreatif dalam diri setiap orang sehingga menghasilkan konsep partisipasi yang aktif dan kreatif.

Demikian pula menurut Curtis Et al. (1978:1) dalam Makmur (2008: 156) yang menyatakan sebagai berikut : “...*Participation is concerned with the distribution of power in society, for it is power which enables groups to determine which needs, and whose needs will be met through the distribution of resources*”

Kemampuan masyarakat untuk mewujudkan dan mempengaruhi arah serta pelaksanaan suatu program ditentukan dengan mengandalkan “*power*” yang dimiliki sehingga pemberdayaan (*empowerment*) merupakan *central theme* atau jiwa partisipasi yang sifat aktif dan kreatif. Partisipasi dapat diartikan sebagai sumbangan, keterlibatan keikutsertaan warga masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan.

Menurut Oakley, (1991:6) : “*Participation is considered a voluntary contribution by the people in one or another of the public programmes supposed to contribute to national development, but the people are not expected to take part in shaping the programme or criticizing its contents.*”

Canter dalam Arimbi (1993:6) mendefinisikan partisipasi sebagai *feed-forward information*. Dengan definisi ini, partisipasi masyarakat sebagai proses komunikasi dua arah yang terus menerus dapat diartikan bahwa partisipasi masyarakat merupakan komunikasi antara pihak pemerintah sebagai pemegang kebijakan dan masyarakat di pihak lain sebagai pihak yang merasakan langsung dampak dari kebijakan tersebut. Dari pendapat Canter juga tersirat bahwa masyarakat dapat memberikan respon positif dalam artian mendukung dan memberikan masukan terhadap program atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah, namun dapat juga menolak kebijakan tersebut.

Menurut pendapat Mubyarto (1997:35) bahwa mendefinisikan partisipasi sebagai ketersediaan untuk membantu keberhasilan setiap program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri. Sedangkan Swanepoel and De Beer dalam Coetzee et al

(2001:447) menjelaskan *list there obatacles to participation* adalah :
 “*Operational: issue as too much centralization of power, limited capacity, limited coordination and inapprooriare technology. Culture of poverty: the vicious circle that keeps people enmeshed in poverty, and Lack of structural support participation: appropriate structures are necessary.*”

Menurut Bintoro (1984: 220), berhasilnya pencapaian tujuan-tujuan pembangunan memerlukan keterlibatan aktif dari masyarakat pada umumnya. Keterlibatan aktif ini juga disebut partisipasi, ada tiga aspek dalam partisipasi, yaitu:

- a. Keterlibatan aktif atau partisipasi masyarakat tersebut dapat berarti keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi, dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini terutama berlangsung dalam proses politik tetapi juga dalam proses hubungan sosial antara kelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat. Paling sedikit suatu rencana harus peka terhadap kepentingan-kepentingan masyarakat. Sehingga dengan demikian mendapat dukungan dalam pelaksanaannya. Rencana pembangunan hendaknya dapat pula menimbulkan rasa solidaritas nasional dan soladaritas sosial.
- b. Keterlibatan dalam memikul beban dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan. Hal ini dapat berupa sumbangan dan mobilisasi sumber-sumber pembiayaan pembangunan, kegiatan produktif yang serasi, pengawasan sosial atas jalannya pembangunan dan lain-lain. Pada pokok arah kegiatan masyarakat yang mendukung peningkatan tabungan dan investasi, dan demikian pembentukan modal. Suatu sistem pemungutan pajak yang adil dan merata dapat lebih menggerakkan ketersediaan membayar pajak. Ini adalah bentuk partisipasi mutlak dalam bernegara, apalagi bila dalam membangun.
- c. Adalah keterlibatan dalam memetik hasil dan manfaat pembangunan secara berkeadilan. Bagian-bagian daerah atau golongan-golongan masyarakat tertentu dapat ditingkatkan keterlibatannya dalam bentuk kegiatan produktif mereka, melalui perluasan kesempatan-kesempatan dan pembinaan tertentu. Misalnya dalam hal ini dilakukan dalam bentuk pembangunan daerah-daerah terbelakang, kebijaksanaan dan program-program pembangunan yang merangsang keterlibatan produktif golongan masyarakat berpenghasilan rendah dan program-program yang disebut *commmunity development*.

Partisipasi data dipahami sepanjang kontinum, yang yang berkisar dari partisipasi dalam bentuk tindakan manipulasi hingga derajat partisipasi

didalamnya stakeholder menjadi mitra dalam prakarsa pembangunan dan mulai memikul tanggung jawab penuh dalam pengelolaannya;

- a. Manipulasi jenjang paling rendah berlaku untuk situasi “non partisan” dimana partisipasi dibuat untuk mengindoktrinasi;
- b. Informasi/sosialisasi; ketika stakeholders diberitahu tentang hak-hak, tanggung jawab, dan pilihan, langkah penting pertama kearah partisipasi murni terjadi. Kekurangan utama pada tahap ini adalah bahwa tekannya ditempatkan pada komunikasi satu arah.
- c. Konsultasi; tingkat ini memerlukan komunikasi dua arah dimana stakeholders mempunyai kesempatan untuk menyampaikan saran dan perhatian, tetapi tidak ada jaminan bahwa input masyarakat digunakan sama sekali atau seperti yang diinginkan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pada tingkat ini stakeholders ikut serta dalam partisipasi.
- d. Membangun konsensus; disini stakeholders berinteraksi untuk memahami satu sama lain dan sampai pada posisi yang dirundingkan yang dapat ditolerir seluruh kelompok. Sebuah kekurangan umum adalah bahwa individu dan kelompok rentan cenderung bertahan atau secara pasif.
- e. Pembuatan-keputusan; ketika konsensus dilakukan melalui keputusan pasif. Ini menandakan permulaan tanggung jawab bersama serta terhadap keluaran yang mungkin dihasilkan.
- f. Berbagi-resiko; tingkat ini menjadikan andalan terhadap terdahulu tetapi meluas diluar keputusan untuk mencakup pengaruh masyarakat, berbagai macam akibat yang lazim, berbahaya, dan menguntungkan. Sesuatu yang berubah-ubah secara konstan, disana selalu ada unsur resiko, bahkan dimana keputusan dianggap paling baik mungkin dihasilkan hasil yang paling sedikit.
- g. Kemitraan; hubungan ini memerlukan pertukaran diantara sesama yang bekerja, kearah tujuan bersama. Perhatikan bahwa sama sebagaimana diterapkan disini tidak dipandang dari segi keseimbangan respect.
- h. Pengelolaan-sendiri; ini adalah puncak dari usaha partisipatif, dimana stakeholders berinteraksi dalam proses pembelajaran (UNDP, 2000).

Partisipasi publik dapat berlangsung dalam beberapa area pengambilan keputusan yakni; *Pertama*, praktik operasional yang menyangkut perilaku dan kinerja pegawai dalam institusi publik, isu-isu yang berkaitan dengan aspek lainnya dalam kualitas pelayanan publik, keterandalan dan keteraturan, fasilitas bagi pengguna jasa dengan kebutuhan tertentu dan sebagainya. *Kedua*, keputusan pembelanjaan yang berkaitan dengan anggaran yang didelegasikan, anggaran yang

menyangkut modal dasar, sampai pada anggaran pendapatan menyeluruh yang mencakup gaji pegawai, dan biaya rutin. *Ketiga*, pembuatan kebijakan yang menyangkut tujuan-tujuan strategis bagi pembangunan dan prioritas pembelanjaan serta keputusan alokasi sumber lainnya (Muluk, 2002:9).

Disamping konsep partisipasi diatas, dikenal juga konsep partisipasi sosial yang orientasi partisipasinya pada perencanaan, implementasi dan pengawasan pembangunan oleh Stiefel dalam Pualilin (2005:29) mengartikan partisipasi sebagai upaya terorganisir untuk meningkatkan pengawasan terhadap sumberdaya dan lembaga pengatur dalam kegiatan-kegiatan tertentu oleh berbagai kelompok masyarakat yang selama ini tidak berada dalam tubuh pemerintahan yang memainkan fungsi pengawasan. Dalam pemahaman ini partisipasi ditempatkan diluar lembaga-lembaga formal pemerintahan, sebagai keterlibatan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan konsultasi atau pengambilan keputusan, pembangunan dari evaluasi kebutuhan yang kemudian dituangkan dalam bentuk perencanaan, hingga sampai pada penilaian evaluasi dari kegiatan pembangunan tersebut. Karena sifatnya yang berada diluar lembaga formal pemerintahan, konsep ini disebut sebagai partisipasi sosial. Partisipasi pada pemerintah daerah pada dasarnya bertujuan untuk membangun kehidupan demokrasi lokal. Demokrasi lokal ini mengandung pengertian bahwa didalamnya terdapat nilai-nilai lokal, potensi, dan kultur lokal yang bisa diarahkan pada penciptaan demokrasi.

Berdasarkan pendapat para ahli maka penulis menyimpulkan bahwa partisipasi dapat diartikan sebagai kemampuan masyarakat dalam melakukan kontrol terhadap pembangunan, hal ini dapat dilihat dari sumbangan, keterlibatan,

keikutsertaan masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan, partisipasi juga sebagai kesediaan untuk membantu keberhasilan setiap program sesuai dengan kemampuan setiap masing-masing.

2.1.2 Konsep Masyarakat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) masyarakat diartikan sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.

Masyarakat dalam istilah bahasa Inggris adalah *society* yang berasal dari kata *socius* yang berarti kawan. Istilah masyarakat berasal dari kata bahasa Arab *syaraka* yang berarti ikut serta dan berpartisipasi. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul, dalam istilah ilmiah adalah saling berinteraksi. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana melalui warga-warganya dapat saling berinteraksi. Definisi lain, masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut sistem adat istiadat tertentu dan bersifat kontinyu, serta terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Kontinuitas merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki keempat ciri yaitu: 1). Interaksi antar warga-warganya, 2). Adat istiadat, 3). Kontinuitas waktu, dan 4). Rasa identitas kuat yang mengikat semua warga (Koentjaraningrat, 2009: 115-118).

Kemudian Robert M. Clever dalam Budiharjo (2008:46) mengatakan: masyarakat adalah suatu sistem hubungan-hubungan yang ditata (*society means a system of ordered relation*). August Comte dalam Abdul Sani (1995:56) masyarakat merupakan kelompok-kelompok makhluk hidup dengan realitas-realitas baru yang berkembang menurut hukum-hukumnya sendiri dan berkembang menurut pola perkembangan yang tersendiri.

Menurut Soekanto dalam Syani (1995:47) memberikan ciri-ciri daeri masyarakat sebagai berikut:

- a. Manusia yang hidup bersama. Di dalam ilmu sosial tidak ada ukuran mutlak maupun angka pasti untuk menentukan berapa jumlah manusia yang harus ada. Akan tetapi secara teoritis angka minimnya adalah dua orang yang hidup bersama.
- b. Bercampur untuk waktu yang cukup lama. Kumpulan dari manusia tidaklah sama dengan kumpulan benda-benda mati seperti umpamanya kursi, meja dan sebagainya. Oleh karena itu dengan berkumpulnya manusia akan timbul manusia-manusia baru. Manusia itu juga dapat bercakap-cakap, merasa dan mengerti, mereka juga mempunyai keinginan untuk menyampaikan kesan-kesan atau perasaan-perasaanya. Sebagai akibat hidup bersama itu, timbullah sistem komunikasi dan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara manusia dalam kelompok tersebut.
- c. Mereka sadar bahwa mereka merupakan satu kesatuan.
- d. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama. Sistem kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan oleh karena setiap anggota kelompok merasa dirinya terikat satu dengan lainnya.

Dari uraian diatas, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa masyarakat sekumpulan orang (lebih dari satu minimal 2 orang) yang menempati daerah tertentu dimana diikat oleh kebudayaan yang terbentuk karena adanya interaksi dan memiliki identitas bersama serta bersifat kontinyu.

2.1.3 Konsep Partisipasi Masyarakat

Menurut Ndraha dalam Syarif Makmur (2008:156-157), mengatakan bahwa :

“Kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi merupakan tanda adanya kemampuan awal masyarakat untuk berkembang secara mandiri. Partisipasi masyarakat dan kemampuan masyarakat itu untuk berkembang secara mandiri ibarat dua sisi mata uang, tidak dapat dipisahkan, tetapi dapat dan perlu dibedakan. Masyarakat Desa yang mempunyai kemampuan berkembang secara mandiri bisa membangun denga atau tanpa berpartisipasi vertikal dengan pihak lain.”

H.A.R.Tilaar, (2009: 287) mengungkapkan partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (bottom-up) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya.

Nelson, Bryant, dan White 1982 (Purnawati, 2005: 50) mengklasifikasikan partisipasi bahwa keterlibatan kelompok atau masyarakat sebagai suatu kesatuan, dapat disebut partisipasi kolektif, sedangkan keterlibatan individual dalam kegiatan kelompok dapat disebut partisipasi individual. Selain itu partisipasi dapat disebut sebagai partisipasi vertikal dan horizontal masyarakat. Disebut partisipasi vertikal karena bisa terjadi dalam kondisi tertentu masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan dimana masyarakat berada pada posisi sebagai bawahan, pengikut atau klien. Sedangkan partisipasi horizontal, karena pada suatu saat tertentu tidak mustahil masyarakat mempunyai kemampuan untuk berprakarsa, di mana setiap anggota/kelompok masyarakat berpartisipasi horizontal satu dengan yang lain, baik dalam melakukan usaha bersama, maupun dalam rangka melakukan kegiatan dengan pihak lain. Tentu saja partisipasi seperti itu merupakan suatu tanda permulaan tumbuhnya masyarakat yang mampu berkembang secara mandiri.

Pemerintah daerah melakukan pengelolaan keuangan, pembangunan serta pelayanan publik tidak akan berjalan tanpa adanya partisipasi masyarakat. Pemerintah daerah memerlukan aspirasi masyarakat untuk melaksanakan kegiatannya secara partisipatif. Tanpa itu semua pembangunan yang direncanakan

oleh pemerintah akan bersifat elitis dan tidak memihak kepada masyarakat, hasilnya adalah adanya keleluasaan bagi penyelenggara pemerintahan untuk melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Partisipasi dalam otonomi daerah memberikan peran yang besar bagi media dan LSM untuk ikut andil dalam controlling penyelenggaraan pemerintahan. Media juga sebagai alat untuk menyampaikan informasi juga berfungsi sebagai tempat pembentukan masyarakat (Yunanto, 2003:45).

Steele dalam Tangkilisan (2005:321) partisipasi merupakan unsur kunci pembangunan, pengertian partisipasi bukan semata-mata melalui pemilihan umum saja, ia juga mengandung suatu sistem yang benar-benar menjamin terwujudnya hak sosial dan ekonomi, setelah hak-hak sipil dan politik serta pendidikan kewarganegaraan. Didalamnya harus ada budaya partisipasi (*culture of participation*) dimana rakyat membutuhkan sejumlah kemampuan dan sumber daya untuk berperan.

Beberapa asumsi yang dapat diterima untuk mendorong partisipasi sosial masyarakat dalam pembangunan:

- a. Pembangunan membawa konsekuensi perubahan dalam tatanan kehidupan sosial budaya masyarakat, perubahan ini membawa dampak yang langsung dirasakan oleh masyarakat apakah itu positif atau negatif. Masyarakat dipandang sebagai "*beneficiary*" pembangunan, oleh sebab itu keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan menjadi sebuah keniscayaan.
- b. Rakyat dianggap paling tahu akan kebutuhannya, karena itu keterlibatan rakyat untuk mengidentifikasi dan menentukan kebutuhan pembangunan daerahnya merupakan hak rakyat tersebut.
- c. Anggapan selama ini, pembangunan dilaksanakan kadang mengabaikan kepentingan dan suara masyarakat luas, kecenderungan yang ada kebijakan-kebijakan pembangunan lebih mengakomodir kepentingan kekuasaan, dengan adanya partisipasi sosial diharapkan dapat menjamin kepentingan masyarakat yang selama ini dimarginalkan dalam pembangunan hukum, ekonomi, dan sosial budaya.

- d. Partisipasi sosial dalam pengawasan terhadap proses pembangunan dianggap dapat menjamin tidak terjadinya berbagai penyimpangan, penurunan kualitas dan kuantitas pembangunan.

Dalam pemahaman ini partisipasi rakyat dilakukan secara insidental artinya keikutsertaan rakyat dalam kegiatan pembangunan berjalan seiring dengan proyek partisipasi hingga selesai.

Demikian pula dengan konsep partisipasi sosial, partisipasi rakyat ditempatkan diluar lembaga formal pemerintahan dan dilakukan seiring dengan kegiatan proyek pembangunan semata-mata. Sedangkan konsep partisipasi warga mengisi kekosongan kedua konsep sebelumnya, partisipasi warga merupakan partisipasi langsung warga dalam pengambilan keputusan pada lembaga pemerintahan dan proses pemerintahan khususnya yang mempengaruhi kehidupan masyarakat luas.

Partisipasi bukanlah proses yang instan, tapi memiliki basis yang kuat yakni modal sosial. Modal sosial merupakan kemampuan orang bekerjasama, pengetahuan bersama, pemahaman bersama, pranata bersama, dan pola-pola interaksi untuk mencapai tujuan bersama dalam organisasi berdasarkan prinsip responsivitas dan kepercayaan Coleman (1994:10). Modal sosial dapat ditanamkan dalam organisasi kecil sampai besar seperti negara, modal sosial juga dapat mengandalkan hubungan kontraktual dan aturan formal, maupun pada ikatan-ikatan primordial yang sempit. Melaikan bersandar pada nilai-nilai dari norma-norma yang menjadi panduan utama bagi setiap orang untuk berpikir dan bertindak.

Menurut Siti Irene A.D (2011:61) membedakan partisipasi menjadi empat jenis yaitu :

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan. Partisipasi ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat yang berkaitan dengan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama. Dalam partisipasi ini masyarakat menuntut untuk ikut menentukan arah dan orientasi pembangunan. Wujud dari partisipasi ini antara lain seperti kehadiran rapat, diskusi, sumbangan pemikiran, tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan.
2. Partisipasi dalam pelaksanaan suatu program meliputi: menggerakkan sumber daya, dana, kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program.
3. Partisipasi dalam pengambilan manfaat. Partisipasi ini tidak lepas dari hasil pelaksanaan program yang telah dicapai baik yang berkaitan dengan kuantitas maupun kualitas. Dari segi kualitas, dapat dilihat dari peningkatan output, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat seberapa besar prosentase keberhasilan program.
4. Partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi masyarakat dalam evaluasi ini berkaitan dengan masalah pelaksanaan program secara menyeluruh. Partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian program yang telah direncanakan sebelumnya.

Menurut Cohen dan Uphoff dalam Ulifah (2003:23) mengatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan terlibat dalam empat hal yaitu :

- a. Partisipasi dalam perencanaan merupakan suatu rencana atau keputusan yang telah disiapkan oleh pemerintah dalam masyarakat hanya dapat menyatakan setuju tidak akan membawa hasil yang diharapkan. Mengacu pada konsep diatas, maka partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pada hakikatnya harus meliputi penentuan tujuan oleh masyarakat sendiri dari serangkaian kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dengan mempergunakan potensi sumber-sumber yang ada dimasyarakat sebaik mungkin yang kesemuanya itu disampaikan dalam rapat musyawarah bersama.
- b. Partisipasi dalam pelaksanaan merupakan hubungan antara pelaksana dan pelaksanaannya cukup erat, masalah pelaksanaannya sudah cukup dipertimbangkan dalam menyusun rencana. Hal ini agar terdapat jaminan yang lebih besar dalam merealisasikan tujuan dan sasaran-sasaran rencana itu, oleh sebab itu rencana harus diupayakan semaksimal mungkin. Pembangunan meliputi; pengerahan daya dan dana, administrasi, koordinasi dan penjabarannya dalam program.

Sesuai dengan konsep tersebut maka partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan dapat dilihat dari sejauh mana masyarakat secara aktif ikut melaksanakan pekerjaan dengan memberikan kontribusi (uang, tenaga dan pikiran) untuk menunjang setiap program pembangunan didaerah yang bersangkutan.

- c. Partisipasi dalam pengawasan merupakan aktifitas untuk menemukan mengkoreksi penyimpangan-penyimpangan terhadap aktifitas yang telah direncanakan dalam rangka menyesuaikan dengan kepentingan masyarakat maka pengawasan dalam partisipasi tidak cukup dilakukan dalam lembaga formal saja, tetapi oleh organisasi masyarakat, golongan kepentingan, kelompok profesi, bahkan anggota masyarakat untuk serta mengawasi.
- d. Partisipasi dalam pemeliharaan dan pemanfaatan meliputi: menerima hasil pembangunan seolah-olah milik sendiri, menggunakan atau memanfaatkan setiap hasil pembangunan, menjadikan atau mengusahakan suatu lapangan usaha, merawat secara rutin dan sistematis, mengatur kegunaan dan memanfaatkannya, mengusahakan dan mengamankannya serta mengembangkannya. Partisipasi dalam pemeliharaan dan pemanfaatan berarti mendukung kearah pembangunan yang serasi dengan martabat manusia keadilan sosial dan memelihara alam sebagai lingkungan manusia untuk generasi yang akan datang.

Hardjasoemantri (2005:1) menyatakan bahwa dengan adanya partisipasi menjadikan anggota masyarakat mempunyai motivasi kuat untuk bersama-sama mengatasi masalah lingkungan dan mengusahakan keberhasilannya. Berbagai bentuk partisipasi masyarakat antara lain :

- a. Keterlibatan dalam setiap proses pengambilan keputusan dari kegiatan pembangunan.
- b. Kontribusi masyarakat setempat dalam setiap pekerjaan bangunan yang berbentuk tenaga kerja atau bahan bangunan setempat.
- c. Berbagai proyek yang dilakukan oleh masyarakat sendiri.
- d. Konsultasi yang berkaitan dengan pekerjaan yang akan dilakukan misalnya pekerjaan bangunan pantai.

Terdapat 3 variabel utama yang perlu mendapat perhatian menyangkut partisipasi masyarakat yaitu:

- a. Keterlibatan pikiran dan perasaan yang lebih besar dari keterlibatan jasmani.

- b. Kesiediaan memberikan bantuan atau kontribusi pada pencapaian tujuan kelompok sebagai refleksi rasa senang dan sukarela.
- c. Terdapat tanggung jawab sebagai faktor yang sangat dominan dari rasa menjadi bagian kelompok sebagai manifestasi *sense of belonging and togetherness*.

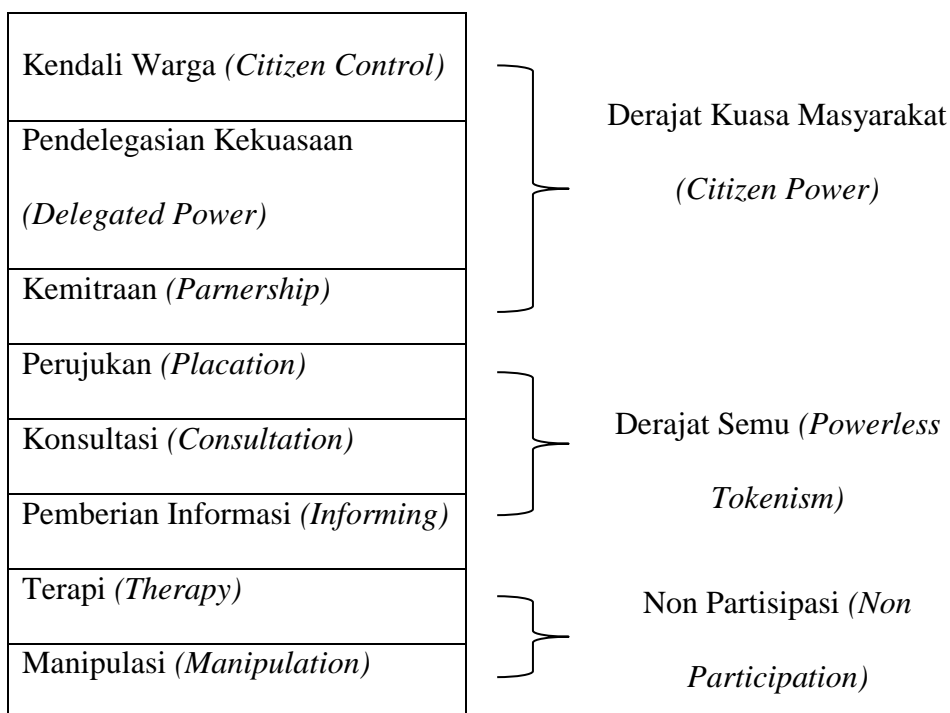
Partisipasi masyarakat adalah suatu proses yang melibatkan masyarakat umum atau dikenal peran serta masyarakat. Partisipasi merupakan bentuk peran serta masyarakat dimana masyarakat turut serta dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan dan pengawasan. Partisipasi masyarakat merupakan hak dan kewajiban warga negara sebagai kontribusinya kepada pencapaian tujuan kelompok. Sehingga mereka diberi kesempatan untuk ikut serta dalam pembangunan dengan menyumbangkan aspirasi dan inisiatifnya.

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan merupakan salah satu wujud kepedulian masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan. Partisipasi masyarakat juga merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap berhasil tidaknya program pembangunan dalam suatu wilayah. Partisipasi masyarakat di perlukan karena program pemerintah yang di laksanakan tidak lain adalah untuk masyarakat. Masyarakat seharusnya ikut bersama-sama dengan pemerintah memberikan peran guna meningkatkan serta mempermudah jalannya pelaksanaan program pembangunan.

2.1.4 Derajat Partisipasi Masyarakat

Terdapat derajat/tingkatan yang berbeda dalam setiap praktek partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat. Untuk menilai partisipasi masyarakat, penelitian ini juga menggunakan konsep delapan tangga partisipasi masyarakat (*Eight Rungs*

on *Ladder of Citizen Participation*) menurut teori Sherry Arnstein (1971) dalam Rizqina (2010) . Dalam konsepnya, Arnstein menjelaskan partisipasi masyarakat yang didasarkan kepada kekuatan masyarakat untuk menentukan suatu produk akhir, tiap tangga dibedakan berdasarkan “*Corresponding to the extent of citizen’s power in determining the plan and/or program*”. Secara umum dalam model ini ada tiga derajat partisipasi masyarakat:



Sumber : Arnstein “*Ladder of Participation*” dalam Rizqina, 2010 Hal. 23

A. Tidak Partisipatif (*Non Participation*)

Dua tingkatan terbawah yang dikategorikan dalam derajat non participaton, dalam kedua tingkatan tersebut partisipasi hanya bertujuan untuk mendidik dan memperkenalkan suatu program kepada masyarakat.

- Manipulasi (*Manipulation*) merupakan tingkatan partisipasi yang paling rendah, karena masyarakat hanya dipakai namanya saja sebagai anggota dalam berbagai badan penasehat. Tidak ada peran yang nyata, karena hanya diselewengkan sebagai publikasi oleh pihak penguasa.
- Terapi (*Therapy*) masyarakat terlibat dalam berbagai kegiatan, namun hal tersebut hanya ditujukan untuk mengubah pola pikir masyarakat daripada mendapat informasi atau usulan-usulan, telah ada komunikasi namun masih bersifat terbatas, inisiatif datang dari pemerintah (pemegang kekuasaan) dan hanya satu arah.

B. Derajat Semu (*Powerless Tokenism*)

Tingkatan ketiga, keempat, dan kelima dikategorikan dalam derajat partisipasi semu (*Poweless Tokenism*) yaitu partisipasi telah didengar dan berpendapat tetapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan jaminan pandangan mereka akan dipertimbangkan oleh pemegang keputusan, dalam taraf ini partisipasi masyarakat memiliki kemungkinan yang sangat kecil untuk menghasilkan perubahan dalam masyarakat.

- Dalam tingkatan ketiga yaitu, Pemberian Informasi (*Informing*) menyiratkan bahwa komunikasi sudah banyak terjadi tetapi masih bersifat satu arah, tidak ada sarana bagi masyarakat melakukan timbal balik (*Feed Back*), seperti pengumuman, penyebaran pamflet dan laporan tahunan.

- Tingkatan keempat yaitu, Konsultasi (*Consultation*) bermakna bahwa komunikasi telah bersifat dua arah tetapi masih bersifat partisipasi yang ritual/formalitas, sudah ada kegiatan penjangkaran aspirasi, penyelidikan keberadaan masyarakat, telah ada aturan pengajuan proposal dan ada harapan aspirasi akan didengarkan, tetapi belum ada jaminan aspirasi tersebut akan dilaksanakan misalnya survei sikap, temu warga dan dengar pendapat publik.
- Tangga kelima yaitu, Perujukan (*Placation*) berarti bahwa komunikasi telah berjalan dengan baik dan sudah ada negosiasi antara masyarakat dengan pemerintah, masyarakat (khususnya yang rentan dan termajinalisasi) dimungkinkan untuk memberikan masukan secara lebih signifikan dalam penentuan hasil kebijakan publik, namun proses pengambilan keputusan masih dipegang oleh pemegang kekuasaan.

C. Kekuatan Masyarakat (*Degrees of Citizen Power*)

Tiga tangga teratas dikategorikan dalam derajat kuasa masyarakat (*Degree of Citizen Power*) dimana masyarakat memiliki pengaruh terhadap proses pengambilan keputusan partisipasi masyarakat (kelompok masyarakat miskin/rentan) sudah masuk dalam ruang penentuan proses, hasil dan dampak kebijakan.

- Kemitraan (*Partnership*) yaitu, masyarakat telah mampu bernegosiasi dengan “pemegang kekuasaan” dalam proses yang

sejajar. Pada tingkat ini, atas kesepakatan bersama, kekuasaan dalam berbagai hal dibagi antara masyarakat dan pihak penguasa. Disepakati juga tanggung jawab dalam perencanaan, pengendalian keputusan, penyusunan kebijaksanaan dan pemecahan berbagai masalah yang dihadapi. Setelah adanya kesepakatan tersebut maka tidak dibenarkan adanya perubahan-perubahan yang dilakukan secara sepihak.

- Pendelegasian Kekuasaan (*Delegated Power*) yaitu masyarakat telah mampu mengarahkan kebijakannya karena ruang pengambilan keputusan telah “dikuasai”. Pada tahap ini masyarakat diberi limpahan wewenang untuk membuat keputusan pada rencana atau program tertentu. Masyarakat berhak menentukan program-program yang bermanfaat bagi mereka. Untuk memecahkan masalah, pemerintah harus mengadakan tawar-menawar tanpa adanya tekanan.
- Pada tingkatan Kendali Warga (*Citizen Control*) partisipasi masyarakat secara politik maupun administratif sudah mampu mengendalikan proses pembentukan pelaksanaan dan konsumsi dari kebijakan bahkan sangat mungkin masyarakat telah memiliki kewenangan penuh dengan mengelola suatu obyek kebijakan tersebut. Pada tingkat ini masyarakat mempunyai kekuatan untuk mengatur program atau kelembagaan yang berkaitan dengan kepentingan mereka. Masyarakat mempunyai kewenangan penuh

di bidang kebijaksanaan, aspek-aspek pengelolaan dan dapat mengadakan negosiasi dengan pihak-pihak luar yang hendak melakukan perubahan. Usaha bersama warga dapat menghubungi sumber-sumber dana tanpa perantara pihak ketiga.

Berdasarkan konsep diatas terlihat bahwa perbedaan yang cukup mendasar antara bentuk partisipasi semu (*empty ritual*) dengan yang mempunyai kekuatan nyata (*real power*). Didalamnya digambarkan bagaimana bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dari masyarakat dipaksa atau dimanipulasi dan dimana masyarakat telah mampu mngontrol pembuatan keputusan dan pengalokasian sumber daya. Kemudaian masing-masing derajat ditekankan bukan pada seberapa jauh masyarakat telah terlibat dalam proses proses pembentukan kebijakan atau program yang dilaksanakan oleh pemegang kekuasaan tetapi seberapa jauh masyarakat dapat menentukan hasil akhir atau dampak dari kebijakan tersebut.

2.1.5 Faktor-faktor Yang Mendorong Tingkat Partisipasi

Ada beberapa hal yang mendorong tingkat partisipasi masyarakat dalam kehidupan sosial politik berbangsa dan bernegara, diantaranya :

- a. Komitmen politik dari pemerintah/partai politik yang berkuasa (pemenang pemilu), maksudnya berbagai negara mampu menyelenggarakan tata pemerintahan yang partisipatif, disebabkan karena adanya komitmen politik dari pemerintah/partai politik yang berkuasa atau pemenang pemilu terhadap partisipasi warga dengan melibatkan atau mendelegasikan kekuasaan kepada rakyat dan mengakselerasikan proses pengambilan kebijakan secara partisipatif.
- b. Akses terhadap informasi dan dokumen publik, dimana partisipasi merupakan hanya terjadi manakala warga memiliki akses informasi yang memadai terhadap sumberdaya politik dan berbagai dampak yang mungkin terjadi kepada warga manakala kebijakan tersebut ditetapkan, sayangnya

informasi tersebut hanya terdapat pada lembaga formal pemerintah yang kompeten untuk mengetahuinya. Karena itu indikator kemajuan tahapan partisipasi warga dapat dinilai dari kebebasan dan kemampuan warga untuk mengakses dan dokumen publik.

- c. Kerangka hukum pelebagaan partisipasi rakyat, dimana berbagai kajian terhadap beberapa negara yang sukses mengembangkan pendekatan partisipatif dalam penyelenggaraan pemerintahan, dikarenakan negara-negara tersebut memiliki kerangka hukum yang memadai untuk menjamin pelebagaan partisipasi terhadap warganya.
- d. Tradisi kultur budaya warga, dimana tingkat partisipasi warga pada tiap daerah akan berbeda dikarenakan tradisi dan kultur budaya setempat yang dipengaruhi budaya patronealistik akan berbeda tingkat partisipasinya dengan masyarakat yang lebih menjunjung persamaan dan egaliter.
- e. Sumber keuangan ditingkat lokal, dimana hambatan umum bagi warga untuk berpartisipasi dalam proses pemerintahan dikarenakan pengawasan dan pengelolaan terhadap sumber keuangan lebih didominasi dan dikuasai oleh lembaga formal pemerintah, sehingga peluang pengelolaan sumberdaya keuangan dari swadaya/partisipasi masyarakat tinggal sedikit jumlahnya.
- f. Kecakapan partisipasi, dimana ketika partisipasi masyarakat semakin meningkat, maka dibutuhkan kemampuan untuk mengelola atau meningkatkan partisipasi tersebut. Kecakapan warga dan pemerintah untuk mengelola partisipasi menjadi hal yang penting dalam pendekatan pemerintah partisipatif tidak dapat diimplementasikan, hal ini disebabkan ketidakmampuan dari organisasi masyarakat sipil dan pemerintah mengawasi partisipasi (Pualilin, 2005:36).

Menurut Slamet (1994: 142-143), faktor-faktor internal yang berasal dari dalam diri kelompok masyarakat sendiri, yaitu individu-individu dan kesatuan kelompok didalamnya. Tingkah laku individu berhubungan erat atau ditentukan oleh ciri-ciri sosiologis seperti umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan dan lamanya tinggal. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecendrungan seseorang berpartisipasi yaitu :

- a. Usia

Faktor usia merupakan faktor yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada. Mereka dari kelompok manusia menengah keatas dengan ketertarikan moral kepada nilai dan norma masyarakat yang lebih mantap, cenderung lebih banyak partisipasi daripada mereka yang dari kelompok usia lainnya.

- b. Jenis Kelamin
Nilai yang cukup lama dominan dalam kultur berbagai bangsa mengatakan bahwa pada dasarnya tempat perempuan itu adalah dapur yang berarti bahwa dalam banyak masyarakat peranan perempuan yang terutama adalah mengurus rumah tangga, akan tetapi semakin lama nilai peran perempuan tersebut telah bergeser dengan adanya gerakan emansipasi dan pendidikan perempuan yang semakin baik.
- c. Pendidikan
Dikatakan sebagai salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi. Pendidikan dianggap dapat mempengaruhi sikap hidup seseorang terhadap lingkungannya, suatu sikap yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat.
- d. Pekerjaan dan penghasilan
Hal ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena pekerjaan seseorang akan menentukan berapa besar penghasilan yang diperolehnya. Pekerjaan dan penghasilan yang baik dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Pengertiannya bahwa untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan, harus didukung oleh suasana yang mapan dalam perekonomian.
- e. Lamanya tinggal
Lamanya seseorang tinggal dalam lingkungan tertentu dan pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan tersebut akan berpengaruh pada partisipasi seseorang. Semakin lama ia tinggal dalam lingkungan tertentu, maka rasa memiliki terhadap lingkungan cenderung lebih terlihat dalam partisipasinya yang besar dalam setiap kegiatan lingkungan tersebut.

2.1.6 Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan dan partisipasi merupakan strategi yang sangat potensial dalam meningkatkan ekonomi, sosial, dan transformasi budaya. Proses ini, pada akhirnya akan dapat menciptakan pembangunan yang lebih berpusat pada rakyat. Strategi pemberdayaan meletakkan partisipasi masyarakat sebagai fokus isu sentral pembangunan saat ini. Bank Dunia meletakkan pemberdayaan sebagai salah satu objek utama dalam partisipasi masyarakat. Sementara itu, strategi pemberdayaan

meletakkan partisipasi aktif masyarakat ke dalam efektivitas, efisiensi, dan sikap kemandirian.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemberdayaan adalah sebuah konsep yang lahir sebagai bagian dari perkembangan alam pikiran masyarakat dan kebudayaan barat utamanya Eropa. Untuk memahami konsep empowerment secara tepat dan jernih memerlukan upaya pemahaman latar belakang kontekstual yang melahirkannya. Secara konseptual pemberdayaan atau pemberkuasaan (empowerment) berasal dari kata power (kekuasaan atau keberdayaan), karena ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan niat mereka. Ilmu sosial tradisional menekankan bahwa kekuasaan berkaitan dengan pengaruh dan kontrol.

Pemberdayaan menurut Mc Ardle sebagaimana yang dikutip Harry Hikmat mengartikan: pemberdayaan sebagai proses pengambilan keputusan oleh orang-orang yang secara konsekuen melaksanakan keputusan tersebut. Orang-orang yang telah mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui kemandiannya, bahkan merupakan "keharusan" untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, ketrampilan dan sumber lainnya dalam rangka mencapai tujuan mereka tanpa bergantung pada pertolongan eksternal. Namun demikian, McArdle mengimplikasikan hal tersebut bukan untuk mencapai tujuan, melainkan makna pentingnya proses dalam pengambilan keputusan.

Istilah pemberdayaan dalam konteks masyarakat adalah, kemampuan individu yang berkerja sama dengan individu-individu lainnya dalam masyarakat untuk membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Memberdayakan masyarakat adalah upaya memperkuat unsur-unsur keberdayaan itu untuk

meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang berada dalam kondisi yang tidak mampu dengan mengandalkan kekuatannya sendiri sehingga dapat keluar dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan, atau proses memampukan dan memandirikan masyarakat.

2.1.7 Konsep Masyarakat Pesisir

Dalam pengertian biologis menurut Supriharyono (2007:14) wilayah pesisir adalah daerah pertemuan antara darat dan laut. Kearah darat wilayah pesisir meliputi bagian darat baik kering maupun terendam air yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut, dan perembesan air asin. Sedangkan ke arah laut, wilayah pesisir mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi proses alami yang terjadi di darat, seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat, seperti penggundulan hutan dan pencemaran. Lebih lanjut dikatakan bahwa batas wilayah pesisir hanyalah garis khayal yang letaknya ditentukan oleh kondisi dan situasi setempat.

Lain halnya dengan para pemikir sosial, yang berpendapat bahwa wilayah pesisir juga dapat lepas dari permasalahan sosial ekonomi masyarakat pesisir. Sehingga batas pesisir tidak hanya didasarkan pada pendekatan biologis dan pengaruh langsung dari lingkungannya. Wilayah pesisir sampai jauh menjangkau ke arah darat tidak hanya sampai lokasi pemukiman, tetapi meluas sampai ke mata pencaharian penduduk yang masih berkaitan dengan produksi kelautan. Seperti penjelasan Dahuri, dkk dalam Adisasmita (2007: 98-99) bahwa untuk kepentingan

pengelolaan atau wilayah perencanaan, batas wilayah pesisir ke arah daratan bisa sampai ke daerah hulu sungai dengan ketentuan terdapat kegiatan manusia yang secara nyata menimbulkan dampak terhadap lingkungan dan sumber daya di bagian hilir.

Nugraha dan Rochim (2004:9) menjelaskan bahwa wilayah (region) adalah suatu area geografis yang memiliki ciri tertentu dan merupakan media bagi segala sesuatu untuk berlokasi dan berinteraksi. Dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor : KEP.10/MEN/2002 tentang pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir terpadu mendefinisikan wilayah pesisir merupakan daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang saling berinteraksi dimana kearah laut 12 mil dari garis pantai untuk propinsi dan sepertiga dari wilayah laut itu (kewenangan propinsi) untuk kabupaten/kota dan kearah darat batas administrasi kabupaten/kota.

Masyarakat pesisir merupakan komunitas yang mendiami wilayah pesisir, yang pada umumnya masyarakat pesisir adalah nelayan dengan aktivitasnya yang erat dengan aspek kelautan. Sifat dan karakteristik masyarakat pesisir ditentukan oleh interaksi faktor-faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan (Nugraha dan Rochim, 2004:251).

Sama halnya dengan apa yang dikatakan Dahuri dkk (Mulyadi, 2005:1) bahwa perairan pesisir adalah daerah pertemuan darat dan laut dengan batas darat dapat meliputi bagian daratan baik kering maupun terendam air yang masih mendapat pengaruh sifat-sifat laut seperti angin laut, pasang surut dan intuisi air

laut ke arah laut, perairan pesisir mencakup bagian batas terluar dari daerah paparan benua yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami yang terjadi di darat, seperti sedimentasi dan aliran air tawar.

Aminah (2007:15) memberikan tipikal ekologi atau geografi, ekonomi dan sosial masyarakat pesisir sebagai berikut :

- a. Secara ekologis masyarakat pesisir dihadapkan pada zona yang luas dengan luasan area yang dikelola relatif sempit, aspek laut yang menyebabkan produktivitas yang tinggi dalam suatu hari kegiatan pelayanan.
- b. Secara sosial masyarakat pesisir memiliki akses yang teramat terbatas akan pelayanan sosial seperti layanan kesehatan dan pendidikan, adanya intervensi orang luar untuk membentuk organisasi *self-help* yang memberdayakan masyarakat, keeratn hubungan dalam masyarakat yang cukup tinggi, dan ketidakbergantungan kepada hukum positif.
- c. Secara ekonomi, pendapatan masyarakat pesisir umumnya dibawah standar nasional, kesenjangan pendapatan karena perbedaan sumber daya manusia, tipe armada, dan alat tangkap.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa wilayah pesisir adalah wilayah pesisir adalah daerah pertemuan antara darat dan laut. Sedangkan sekumpulan orang yang tinggal dan berinteraksi didaerah itu disebut masyarakat pesisir. Wilayah pesisir yang berbatasan langsung dengan laut rentan mengalami bencana, namun kemampuan ekonomi pesisir yang biasanya mata pencaharian mereka lebih banyak bergantung kepada alam dan dengan alat yang masih tradisional menyebabkan kemiskinan. Hal ini juga berpengaruh terhadap kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana. Dengan adanya Program Kawasan Pesisir Tangguh ini diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang mandiri serta tanggap terhadap bencana.

2.1.8 Konsep Pembangunan Sosial

Nugroho dan Dahuri (2012:1) menyatakan, konsepsi pembangunan secara umum sering dirumuskan melalui kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonomi tersebut harusnya dirumuskan secara konsepsional dengan melibatkan pertimbangan dari aspek sosial, lingkungan dan didukung mekanisme politik yang bertanggung jawab. Dalam aspek sosial, bukan saja aspirasi masyarakat ikut di pertimbangkan tetapi juga keberadaan lembaga-lembaga sosial (*social capital*) juga ikut dipelihara bahkan fungsinya di tingkatkan. Sementara aspek lingkungan, aspek fungsi kelestarian *natural capital* juga sangat diperhatikan demi kepentingan umat manusia.

Menurut Nugroho dan Dahuri (2012:3) konsepsi pembangunan berkelanjutan yang memadukan aspek lingkungan (*natural capital*), sosial (*social capital*), dan ekonomi (*man-made capital*), dalam rangka memberikan manfaat kesejahteraan untuk generasi sekarang maupun akan datang. Disinilah letak relevansi pembangunan wilayah yang didalamnya tersimpan maksud-maksud sebagai berikut:

1. Pembangunan wilayah berkeinginan memberi perlindungan sosial dan ekonomi bagi keadaan-keadaan sebagai akibat dari kemiskinan-kemiskinan dan ketimpangan; serta sumberdaya alam yang mengalami tekanan
2. Pembangunan wilayah menyediakan media bagi beroperasinya mekanisme pasar secara efisien dan memperbaiki kualitas aliran beragam sumber daya secara lestari (*sustainable*).
3. Pembangunan wilayah dalam konteksnya sebagai suatu konsep maupun metodologi menyediakan perangkat-perangkat bagi aspek perencanaan pembangunan.
4. Pembangunan wilayah merupakan upaya-upaya pembangunan sistem kelembagaan sebagai kerangka menyeluruh bagi perbaikan dan penyempurnaan pembangunan.

Pembangunan wilayah merupakan landasan penting bagi peningkatan daya saing. Menurut Bappenas (2005), peningkatan daya saing wilayah (atau daerah) ditandai dengan peningkatan produktivitas dan efisiensi industri, kualitas hidup masyarakat, iklim investasi dan kapasitas untuk berkompetisi.

Definisi pembangunan sosial menurut Midgley (2005:37), adalah suatu proses perubahan sosial yang terencana yang didesain untuk mengangkat kesejahteraan penduduk secara menyeluruh, dengan menggabungkannya dengan proses pembangunan ekonomi yang dinamis. Mengapa direncanakan? Hal ini karena diinginkan adanya perubahan manusia dan kesejahteraan.

Lebih lanjut Midgley (2005:38-41) mengajukan ada delapan aspek yang perlu diperhatikan, diantaranya yaitu:

1. Proses pembangunan sosial sangat terkait dengan pembangunan ekonomi. Aspek ini yang membuat pembangunan sosial berbeda ketika dibandingkan dengan pendekatan lain dalam mengangkat kesejahteraan orang banyak. Pembangunan sosial mencoba untuk mengaplikasikan kebijakan-kebijakan dan program-program sosial untuk mengangkat kesejahteraan sosial, pembangunan sosial melakukannya dengan konteks proses pembangunan.
2. Pembangunan sosial mempunyai fokus berbagai macam disiplin ilmu (interdisipliner) berdasarkan berbagai ilmu sosial yang berbeda. Pembangunan sosial secara khusus terinspirasi dari politik dan ekonomi. Pembangunan sosial juga menyentuh nilai, kepercayaan dan ideologi secara eksplisit. Dengan isu-isu ideologis, pembangunan sosial diharapkan dapat lebih baik menciptakan intervensi dalam menganalisa dan menghadapi masalah sosial dalam mengangkat kesejahteraan masyarakat.
3. Konsep pembangunan sosial lebih menekankan pada proses. Pembangunan sosial sebagai konsep dinamis memiliki ide-ide tentang pertumbuhan dan perubahan yang bersifat eksplisit dimana istilah pembangunan itu sendiri lebih berkonotasi pada semangat akan perubahan yang positif. Secara literal, pembangunan adalah satu proses pertumbuhan, perubahan, evolusi dan pergerakan. Pembangunan sosial memiliki tiga aspek, pertama, kondisi sosial awal yang akan diubah dengan

pembangunan sosial, kedua, proses perubahan itu sendiri, ketiga, keadaan akhir ketika tujuan-tujuan pembangunan sosial telah tercapai.

4. Proses perubahan yang progresif. Perubahan yang dilakukan berusaha untuk perbaikan bagi seluruh manusia. Ide-ide akan perbaikan dan peningkatan sosial sangat dibutuhkan dalam pembangunan sosial.
5. Proses pembangunan sosial bersifat intervensi. Peningkatan perubahan dalam kesejahteraan sosial terjadi karena adanya usaha-usaha yang terencana yang dilakukan oleh para pelaku perubahan, bukan terjadi secara natural karena bekerjanya sistem ekonomi pasar atau dengan dorongan historis. Proses pembangunan sosial lebih tertuju pada manusia yang dapat mengimplementasikan rencana dan strategi yang spesifik untuk mencapai tujuan pembangunan sosial.
6. Tujuan pembangunan sosial didukung dengan beberapa macam strategi, baik secara langsung maupun tidak langsung, akan menghubungkan intervensi sosial dengan usaha pembangunan ekonomi. Keduanya didasari oleh keyakinan dan ideologi yang berbeda tetapi hal ini dapat diharmonisasikan meskipun masih ditemui kesulitan untuk merangkum semuanya dalam sebuah sintesa.
7. Pembangunan sosial lebih terkait dengan rakyat secara menyeluruh serta ruang lingkungannya lebih bersifat inklusif atau universal. Pembangunan sosial fokus makronya menargetkan perhatian pada komunitas, daerah dan masyarakat. Pembangunan sosial lebih tertuju pada mereka yang terlantar karena pertumbuhan ekonomi atau tidak diikutsertakan dalam pembangunan (orang miskin dalam kota, penduduk desa yang miskin, etnis minoritas dan wanita). Pembangunan sosial fokusnya bersifat pembagian daerah (spasial) seperti dalam kota, masyarakat pedesaan, perkotaan, daerah-daerah atau negara.
8. Tujuan pembangunan sosial adalah mengangkat kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial menurut Midgley disini berkonotasi pada suatu kondisi sosial di mana masalah-masalah sosial diatur, kebutuhan sosial dipenuhi dan terciptanya kesempatan sosial. Bukan sekedar kegiatan amal ataupun bantuan publik yang diberikan oleh pemerintah.

“Pembangunan sosial tidak hanya diukur melalui peningkatan akses pelayanan seperti kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan, melainkan melalui kemajuan dalam pencapaian tujuan sosial yang lebih kompleks dan kadang-kadang berbagai persamaan, “keadilan sosial”, promosi budaya, dan ketentraman batin, juga peningkatan kemampuan manusia untuk bertindak, sehingga potensi kreatif mereka dapat dikeluarkan dan membentuk pembangunan sosial.”

Dari penjelasan tersebut di atas, terlihat bahwa pembangunan sosial menurut adalah pendekatan pembangunan yang secara eksplisit berusaha mengintegrasikan proses ekonomi dan sosial sebagai kesatuan dari proses

pembangunan yang dinamis, membentuk dua sisi dari satu mata uang yang sama. Pembangunan sosial tidak akan terjadi tanpa adanya pembangunan ekonomi, begitu pula sebaliknya pembangunan ekonomi tidaklah berarti tanpa diiringi dengan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat secara menyeluruh.

2.1.9 Program Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh

A. Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh

Program Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh merupakan akselerasi dari Program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh. Pada prinsipnya muatan PKPT lebih menekankan pada kegiatan penguatan kapasitas kelembagaan. Pembangunan lingkungan dan infrastruktur, sumberdaya serta kemandirian ekonomi, yang diharapkan dapat mampu meningkatkan ketangguhan dengan meminimalisir dampak daerah yang rentan terkena kerugian akibat bencana dan perubahan iklim di Kawasan-kawasan pesisir.

Program Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT) adalah kegiatan pembangunan wilayah kawasan pesisir berbasis pemberdayaan masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan kesiapan terhadap bencana dan perubahan iklim. Pengembangan kawasan pesisir tangguh dalam pelaksanaannya memberikan bantuan pengembangan manusia, sumberdaya, infrastruktur/lingkungan, usaha, dan siaga bencana dan perubahan iklim.

Menjawab persoalan tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2012 – 2014 telah melaksanakan program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT) yang menysasar ke 66 Desa pesisir di 22 Kabupaten/Kota. Dalam kurun waktu tiga tahun tersebut kegiatan program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT) terbukti telah meningkatkan ketangguhan desa pesisir pelaksana kegiatan. Dengan disahkannya dan mulai diterapkannya Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, mendorong kegiatan PDPT untuk melakukan penyesuaian cakupan wilayah. Cakupan wilayah yang akan disasar pada pengembangan tahapan berikutnya meliputi kawasan pesisir. Kondisi ini berimplikasi dari Program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT) berakselerasi menjadi Program Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT). Program Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT) diharapkan mampu memberikan daya dorong bagi kemajuan kawasan pesisir di Indonesia.

Program Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT) merupakan wujud intervensi Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam hal :

1. Menata kawasan pesisir dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir;
2. Menghasilkan keluaran (output) yang dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat pesisir, sesuai skala prioritas kebutuhan masyarakat;
3. Pembelajaran bagi masyarakat pesisir untuk menemukan cara pemecahan masalah secara mandiri; dan
4. Mendorong masyarakat pesisir sebagai agen pembangunan. (Sumber : Rencana Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh Kabupaten Pandeglang, Tahun 2015)

Program Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT) ini diharapkan mampu menjawab kendala sekaligus memanfaatkan potensi sumber daya pesisir.

Pada tahun 2016, program Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT) dilaksanakan di 25 Kabupaten/Kota yang terdiri dari :

1. Kabupaten Aceh Barat
2. Kabupaten Agam
3. Kabupaten Bangka Barat
4. Kabupaten Sambas
5. Kabupaten Tanah Laut
6. Kabupaten Pandeglang
7. Kabupaten Kebumen
8. Kabupaten Pekalongan
9. Kabupaten Trenggalek
10. Kabupaten Gorontalo Utara
11. Kabupaten Luwu Utara
12. Kota Kendari
13. Kabupaten Lombok Utara
14. Kabupaten Sumba Timur
15. Kabupaten Kepulauan Morotai
16. Kabupaten Maluku Tenggara
17. Kabupaten Brebes
18. Kabupaten Kotawaringin Timur
19. Kabupaten Kepulauan Meranti
20. Kabupaten Tanjung Jabung Timur
21. Kabupaten Gresik
22. Kabupaten Garut
23. Kabupaten Singkawang
24. Kota Bitung
25. Kabupaten Pangandaran

Kegiatan perencanaan dan pengembangan kawasan pesisir tangguh dilaksanakan melalui tiga tahapan utama. Tahapan pertama, penyusunan perencanaan pengembangan kawasan yang antara lain disusun berdasarkan profil kawasan yang sudah memiliki rentang waktu pelaksanaan lima tahun dengan uraian waktu tiap tahunnya; Tahapan kedua, pelaksanaan program menghasilkan kegiatan fisik sesuai dengan rencana pengembangan kawasan di lokasi kegiatan serta peningkatan kapasitas kelembagaan dan masyarakat; dan Tahapan ketiga, pelaksanaan program menghasilkan kemandirian dan keberlanjutan program oleh para pemangku kepentingan (stakeholders). (Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pandeglang, Tahun 2016)

Pemilihan kawasan pesisir dilakukan dengan memenuhi sekurang-kurangnya 3 (tiga) kriteria sebagai berikut:

1. Lokasi rawan bencana dan perubahan iklim;
2. Mempunyai potensi ekonomi lokal unggulan;
3. Masyarakat pesisir miskin namun potensial aktif dan memiliki motivasi untuk memperbaiki kehidupannya;
4. Kondisi lingkungan permukiman kumuh;
5. Terjadi degradasi lingkungan pesisir; dan/atau
6. Tingkat pelayanan dasar rendah.

Selanjutnya desa pesisir tersebut ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota. (Sumber : Peraturan Dirjen Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil No.02/PER-DJKP3K/2015 tentang Pedoman Teknis Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh Tahun 2015)

Kegiatan perencanaan dan pengembangan kawasan pesisir tangguh dilaksanakan melalui tiga tahapan utama. Tahapan pertama, penyusunan perencanaan pengembangan kawasan yang antara lain disusun berdasarkan profil kawasan yang sudah memiliki rentang waktu pelaksanaan lima tahun dengan uraian waktu tiap tahunnya; Tahapan kedua, pelaksanaan program menghasilkan kegiatan fisik sesuai dengan rencana pengembangan kawasan di lokasi kegiatan serta peningkatan kapasitas kelembagaan dan masyarakat; dan Tahapan ketiga, pelaksanaan program menghasilkan kemandirian dan keberlanjutan program oleh para pemangku kepentingan.

B. Fokus Program Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh

Bina Manusia, yaitu kegiatan yang mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam rangka mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat baik formal maupun informal, memperluas dan meningkatkan kerja sama, memperbaiki budaya kerja, gotong royong tanggung jawab, disiplin, dan hemat serta menghilangkan sifat negatif boros dan konsumtif. Kegiatan Bina Manusia antara lain;

- a. Pelatihan kelembagaan seperti pelatihan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pengelolaan koperasi dan pengelolaan organisasi penanggulangan kebencanaan;
- b. Pelatihan kewirausahaan seperti pelatihan mata pencaharian alternatif dan pemasaran;
- c. Pelatihan kesiapsiagaan bencana seperti pelatihan pengenalan bencana dan pembuatan peta resiko bencana;
- d. Pelatihan dinamika kelompok;

- e. Pelatihan administrasi/manajemen kelompok masyarakat.

Bina Usaha, yaitu kegiatan yang mencakup peningkatan keterampilan usaha, perluasan mata pencaharian alternatif, pengelolaan bisnis skala kecil dan penguasaan teknologi. Selain itu, program ini meningkatkan dan mempermudah akses terhadap sumber daya, teknologi, modal, pasar, dan informasi pembangunan. Dengan dilaksanakannya program ini, diharapkan terbangun kemitraan dengan pelaku usaha dan terbangunnya sistem insentif administrasi serta pendanaan secara formal dan informal. Kegiatan Bina Usaha antara lain :

- a. Bantuan sarana mata pencaharian alternatif seperti kerajinan hasil laut, perahu wisata, dan daur alat selam.
- b. Kegiatan usaha pendukung industrialisasi kelautan skala kecil, seperti penyediaan bahan baku untuk pengembangan usaha berbasis bioteknologi diantaranya dengan memanfaatkan invertebrata laut untuk tujuan penyediaan bahan baku kosmetik, farmasi, rumput laut non pangan mikro algae untuk bio energi, *virgin coconut oil*, minyak nilam, dan air bersih air minum.

Bina Sumber Daya, yaitu kegiatan yang menitikberatkan pada upaya memperkuat kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya, revitalisasi hak ulayat dan hak masyarakat lokal, penerapan monitoring, controlling dan surveillance dengan prinsip partisipasi masyarakat lokal, penerapan teknologi ramah lingkungan, mendorong pengembangan teknologi asli, merehabilitasi habitat, konservasi dan memperkaya sumber daya. Kegiatan Bina Sumber Daya antara lain :

- a. Pengadaan dan penanaman bibit mangrove/vegetasi pantai lainnya beserta penunjang kegiatan;
- b. Rehabilitasi terumbu karang beserta penunjang kegiatan;

- c. Sarana pendukung pengelolaan kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil;
- d. Penyediaan sarana informasi;

Bina Lingkungan atau Infrastruktur, yaitu kegiatan yang mencakup pembangunan infrastruktur, rehabilitasi vegetasi pantai dan pengendalian pencemaran melalui pendekatan perencanaan dan pembangunan secara spasial dalam rangka mendorong peningkatan peran masyarakat pesisir dalam penataan dan pengelolaan lingkungan sekitarnya. Kegiatan Bina Lingkungan dan Infrastruktur :

- a. Sarana distribusi air bersih;
- b. Penyediaan listrik dan prasarana penerangan non listrik tenaga surya;
- c. pembangunan/perbaikan tempat pembuangan sampah/pengelolaan sampah;
- d. Pembangunan/perbaikan drainase (diluar kawasan konservasi perairan);
- e. Pembangunan/perbaikan tempat mandi, cuci, dan kakus (MCK)
- f. Pembangunan/perbaikan fasilitas umum dan fasilitas sosial.

Bina Siaga Bencana atau Perubahan Iklim, yaitu kegiatan yang mencakup usaha-usaha pengurangan resiko bencana dan dampak perubahan iklim, rencana aksi kawasan dalam pengurangan resiko bencana, penyadaran masyarakat, gladi/latihan secara reguler, memudahkan akses data dan informasi bencana, pembangunan sarana dan prasarana penanggulangan bencana antara lain, jalur evakuasi, shelter, struktur pelindung terhadap fasilitas bencana, fasilitas kesehatan, dan cadangan strategi kawasan yang menekankan pada partisipasi dan swadaya dari kelompok-kelompok sosial yang terdapat pada masyarakat atau komunitas pesisir. Kegiatan Bina Siaga Bencana dan Perubahan Iklim

- a. Penyediaan fasilitas penyelamatan diri;
- b. Penyediaan struktur pelindung pantai dan tanggul sungai di pesisir;
- c. Penyediaan sarana informasi bencana;
- d. Pembangunan/perbaikan drainase dalam penanggulangan banjir diluar kawasan konservasi;
- e. Pembangunan jalur evakuasi bencana;
- f. Penanaman vegetasi pantai, mangrove dan terumbu karang;

2.2 Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan penelitian ini, dicantumkan hasil penelitian terdahulu yang pernah peneliti baca sebelumnya dengan tema atau focus yang sejenis dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu ini bermanfaat dalam mengolah atau memecahkan masalah yang timbul dalam partisipasi masyarakat dalam Program Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh di Kecamatan Sumur. Walaupun locus dan masalahnya tidak sama persis tapi sangat membantu peneliti menemukan sumber-sumber pemecahan masalah penelitian ini. Berikut ini adalah hasil penelitian yang dibaca oleh peneliti.

Penelitian pertama yakni dilakukan oleh Abdullah Sapei, Program Strata Satu Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Tahun 2015, dengan judul Partisipasi Masyarakat Dalam Program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh Di Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil dalam penelitian ini menjelaskan bahwa Partisipasi Masyarakat dalam Program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh di Kecamatan

Teluknaga Kabupaten Tangerang periode 2012-2013 masih rendah. Berdasarkan teori Cohen dan Uphoff tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan terlibat dalam 4 (empat) indikator yakni, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemanfaatan dan pemeliharaan. Dari 4 (empat) indikator tersebut, ada tiga indikator yang menunjukkan partisipasi masyarakat masih rendah. Tiga indikator yang dimaksud adalah sebagai berikut : 1) Partisipasi dalam perencanaan, masih kurang baik. Ketika musyawarah diadakan hanya dihadiri oleh perwakilan masyarakat saja dan orang-orang yang memiliki kedekatan dengan pemerintah Desa. Sehingga program yang dihasilkan kurang mewakili seluruh masyarakat. 2) Partisipasi masyarakat dalam pengawasan masih kurang baik karena pengawasan hanya dilakukan oleh tim pendamping. 3) Partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan masih rendah karena kurangnya keaktifan masyarakat dalam pemeliharaan disebabkan belum kuatnya kelembagaan masyarakat yang ada.

Rujukan penelitian kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Masrofah Program Strata Satu Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Tahun 2012 dengan judul Partisipasi Masyarakat Dalam Penanggulangan Abrasi Pantai di Wilayah Pesisir Utara Serang Banten (Studi Kasus Desa Lontar Kabupaten Serang). Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil dalam penelitian ini menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan penanggulangan abrasi adalah dengan reklamasi pantai dengan menanam kembali tanaman bakau di areal sekita pantai, dan melarang pengambilan pasir yang merugikan

masyarakat pesisir Desa Lontar. Penanggulang kerusakan pesisir dan laut berbasis masyarakat dalam hal ini adalah memberdayakan masyarakat agar dapat berperan aktif dan terlibat langsung dalam upaya penanggulangan kerusakan lingkungan lokal untuk menjamin dan menjaga kelestarian pemanfaatan sumberdaya dan lingkungan dalam rangka menyadarkan masyarakat terdapat tiga kunci penyadaran, yaitu penyadaran nilai-nilai ekologis ekosistem pesisir dan laut serta manfaat penanggulangan kerusakan lingkungan, penyadaran tentang konservasi, dan penyadaran tentang keberlanjutan ekonomi.

2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir menggambarkan alur pikiran peneliti sebagai kelanjutan dari kajian teori untuk memberikan penjelasan terhadap pembaca. Maka, berdasarkan judul penelitian tersebut kerangka berfikir dalam penelitian ini secara garis besarnya adalah partisipasi masyarakat dalam Program Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh. Partisipasi masyarakat adalah proses perencanaan, pelaksanaan program, pengawasan serta pemeliharaan dan pemanfaatan setelah program. Artinya apakah akhirnya program Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh ini dapat terwujud sesuai rencana serta dirasakan oleh seluruh masyarakat dikawasan pesisir.

Gambar 2.1 Alur Kerangka Berpikir



2.4 Asumsi Dasar

Asumsi dasar merupakan hasil refleksi dari penelitian berdasarkan kajian pustaka dan landasan teori yang digunakan sebagai dasar pada argumentasi. Pada penelitian ini membahas mengenai Partisipasi Masyarakat Pesisir dalam Program Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh dilakukan untuk menganalisis bentuk pembangunan Sosial di Wilayah Pesisir Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang.

Berdasarkan pada kerangka pemikiran yang telah dipaparkan di atas, peneliti telah melakukan observasi awal terhadap objek penelitian. Berdasarkan observasi ke lokasi penelitian bahwa masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi di Kawasan Pesisir Kecamatan Sumur antara lain :

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori Cohen dan Uphoff (2003:23) mengatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan terbagi dalam empat hal yaitu :

- a. Partisipasi dalam perencanaan
- b. Partisipasi dalam pelaksanaan
- c. Partisipasi dalam pengawasan
- d. Partisipasi dalam pemeliharaan dan pemanfaatan

Adapun yang dimaksud dari empat hal tersebut adalah sebagai berikut; partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan merupakan suatu rencana atau keputusan yang telah disiapkan oleh pemerintah dengan memperhatikan sumber daya yang ada di masyarakat, masyarakat juga dapat ikut menyumbang aspirasi

dalam perencanaan, tujuan pembangunan karena dianggap lebih mengetahui kondisi yang ada di daerahnya. Partisipasi dalam pelaksanaan proses pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan agar terdapat jaminan yang lebih besar dalam merealisasikan tujuan dan sasaran-saran rencana itu. Partisipasi dalam pengawasan merupakan aktifitas untuk menemukan, mengoreksi penyimpangan-penyimpangan terhadap aktifitas yang telah direncanakan dalam rangka menyesuaikan dengan kepentingan masyarakat, maka pengawasan tidak cukup bila hanya diawasi lembaga formal pemerintah, tetapi dibantu organisasi masyarakat, golongan kepentingan, kelompok profesi bahkan anggota masyarakat untuk ikut mengawasi. Indikator tersebut dianggap cocok untuk mengatasi permasalahan tersebut dan diharapkan dengan partisipasi masyarakat dalam Program Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh dapat terlaksana dengan baik serta memberikan manfaat terhadap masyarakat yang tinggal dalam kawasan tersebut untuk dapat mandiri dan tanggap terhadap bencana. Selain itu derajat partisipasi masyarakat dalam Program Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh, dapat menentukan tingkat keberhasilan program tersebut.

Maka peneliti berasumsi bahwa dengan adanya Partisipasi Masyarakat Pesisir dalam Program Pengembangan Kawasan Pesisir di Kecamatan Sumur maka program tersebut dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuan program tersebut yaitu meningkatkan kemandirian masyarakat secara ekonomi, dapat memanfaatkan secara optimal proses pembangunan, organisasi sosial desa berjalan dengan baik, dan tanggap terhadap resiko bencana.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian

Penelitian Partisipasi Masyarakat dalam Program Pengembangan Kawasan Pesisir di Kecamatan Sumur ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna atau data yang sebenarnya. Penelitian kualitatif juga tidak semata-mata mencari kebenaran, tetapi ada pemahaman peneliti terhadap masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini, digunakan untuk menganalisis bagaimana Partisipasi Masyarakat dalam Program Pengembangan Kawasan Pesisir di Kecamatan Sumur.

3.2 Fokus Penelitian

Dalam penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penentuan fokus berdasarkan pendahuluan, pengalaman, observasi, dan referensi. Peneliti akan membatasi ruang lingkup materi kajian penelitian yang akan dilakukan yakni Partisipasi Masyarakat Pesisir Dalam Program Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh Di Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yaitu kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pandeglang dan tiga Desa di Kecamatan Sumur yaitu; Desa Cigorondong, Desa Taman Jaya dan Desa Ujung Jaya untuk melakukan wawancara dan observasi dengan sumber terkait masalah ini.

3.4 Variabel Penelitian

3.4.1 Definisi Konsep

Definisi konsep digunakan untuk menegaskan konsep-konsep yang jelas, digunakan agar tidak menjadi perbedaan penafiran antara penulis dan pembaca. Konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat adalah suatu proses yang melibatkan masyarakat umum atau dikenal peran serta masyarakat. Partisipasi merupakan bentuk peran serta masyarakat dimana masyarakat turut serta dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan dan pengawasan. Partisipasi masyarakat merupakan hak dan kewajiban warga negara sebagai kontribusinya kepada pencapaian tujuan kelompok. Sehingga mereka diberi kesempatan untuk ikut serta dalam pembangunan dengan menyumbangkan aspirasi dan inisiatifnya.

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan merupakan salah satu wujud kepedulian masyarakat terhadap pelaksanaan

pembangunan. Partisipasi masyarakat juga merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap berhasil tidaknya program pembangunan dalam suatu wilayah. Partisipasi masyarakat di perlukan karena program pemerintah yang di laksanakan tidak lain adalah untuk masyarakat. Masyarakat seharusnya ikut bersama-sama dengan pemerintah memberikan peran guna meningkatkan serta mempermudah jalannya pelaksanaan program pembangunan.

2. Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT)

Program pemerintah yang merupakan upaya pembangunan suatu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan sumberdaya alam yang terencana secara menyeluruh dengan melihat kondisi yang ada dan bersifat berkelanjutan dalam program dan kegiatannya. Program Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT) adalah kegiatan pembangunan wilayah kawasan pesisir berbasis pemberdayaan masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan kesiapan terhadap bencana dan perubahan iklim. Pengembangan kawasan pesisir tangguh dalam pelaksanaannya memberikan bantuan pengembangan manusia, sumberdaya, infrastruktur/lingkungan, usaha, dan siaga bencana dan perubahan iklim.

3.4.2 Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah Partisipasi Masyarakat Pesisir Dalam Program Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang. Karena peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, maka dalam penjelasan definisi operasional ini akan dikemukakan fenomena-fenomena penelitian yang dikaitkan dengan konsep teori yang digunakan yaitu empat hal dalam proses partisipasi menurut Cohen dan Uphoff dalam pembangunan yaitu :

1. Perencanaan, yakni mengamati keikutsertaan masyarakat pesisir terhadap proses perencanaan dalam Program Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang.
2. Pelaksanaan, yakni mengamati keikutsertaan masyarakat pesisir terhadap proses pelaksanaan dalam Program Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang.
3. Pengawasan, yakni mengamati keikutsertaan masyarakat pesisir terhadap proses pengawasan dalam Program Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang.
4. Pemeliharaan dan pemanfaatan, Perencanaan, yakni bagaimana sikap masyarakat pesisir akan pemeliharaan dan pemanfaatan hasil

dari Program Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang.

3.5 Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu peneliti itu sendiri. Kemudian dalam mengumpulkan data peneliti yang menentukan sendiri apakah data yang didapat sudah cukup atau masih belum lengkap karena semua bergantung kepada peneliti sebagai pengumpul data. Peneliti sebagai instrumen karena memiliki ciri-ciri antara lain:

- a. Peneliti dapat langsung melihat, merasakan, dan mengalami apa yang terjadi pada obyek/subyek yang ditelitinya.
- b. Peneliti yang akan mampu menentukan kapan menyimpulkan data telah mencukupi, data telah jenuh, dan penelitian dihentikan.
- c. Peneliti dapat langsung melakukan pengumpulan data, menganalisisnya, melakukan refleksi secara terus menerus, serta gradual “membangun” yang tuntas tentang suatu hal.

3.6 Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan sumber data yang digunakan pada penelitian ini. Dalam penelitian kualitatif tidak digunakan istilah populasi, tetapi dinamakan situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat, pelaku, dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergi. Sampel pada penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, atau partisipan informan. Dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu pengambilan

sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Sumber informasi dalam penelitian ini adalah:

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No.	Informan	Kode Informan	Keterangan
1.	Staf Bidang Kelautan, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pandeglang	I ₁₋₁	<i>Key Informan</i>
2.	Tenaga Ahli Pendamping PKPT 1. Desa Cigorondong 2. Desa Tamanjaya 3. Desa Ujung Jaya	I ₁₋₂ I ₁₋₃ I ₁₋₄	<i>Key Informan</i>
4.	KMP (Kelompok Masyarakat Pesisir) 1. KMP Mitra Jaya 2. KMP Harapan Jaya 3. KMP Pangkalan Baru	I ₁₋₅ I ₁₋₆ I ₁₋₇	<i>Key Informan</i>
5.	Kelembagaan Desa 1. Kaur Keuangan Desa Cigorondong 2. Kepala Desa Tamanjaya 3. Ketua LPM Desa Ujung Jaya	I ₂₋₁ I ₂₋₂ I ₂₋₃	<i>Secondary Informan</i>

Sumber : Peneliti, 2016

3.7 Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data

Sumber data dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber yang langsung memberikan data kepada peneliti, sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti. Sebagai data primer dalam penelitian ini berupa kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati dari hasil wawancara dan observasi. Sedangkan data-data sekunder yang didapatkan berupa dokumen tertulis, gambar, dan foto-foto.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

1. Wawancara

Dalam penelitian kualitatif wawancara dilakukan secara mendalam, agar setiap pertanyaan yang tidak dimengerti dapat dipertanyakan kembali pada setiap responden sehingga informasi yang diharapkan akan didapatkan secara jelas. Dalam wawancara penelitian kali ini peneliti memilih informan dengan memperhatikan kapasitas informan dalam kegiatan Program Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT) ini, agar informasi yang didapatkan rill dengan kejadian yang ada dilapangan.

2. Observasi

Teknik pengumpulan data dengan pengamatan dan pencatatan langsung dilokasi penelitian mengenai kegiatan yang ada dan sedang berlangsung. Dalam hal ini peneliti mengamati kegiatan partisipasi masyarakat dalam Program Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh di Kecamatan Sumur.

3. Dokumentasi

Peneliti melakukan pengumpulan data melalui bahan-bahan tertulis, baik berupa prosedur, gambar, laporan hasil pekerjaan serta berupa foto ataupun dokumen elektronik (rekaman).

Adapun alat pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Buku catatan : untuk mencatat segala informasi yang didapat dari informan melalui proses wawancara, serta mencatat perkembangan penelitian dilapangan.
- b. Alat rekam suara *handphone* : untuk merekam proses wawancara dengan informan, dengan persetujuan terlebih dahulu.
- c. Kamera : untuk memotret kegiatan yang berkaitan dengan penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk keabsahan penelitian, berupa foto lokasi penelitian ataupun informan.

Dalam penelitian kualitatif, kegiatan analisis data dimulai sejak peneliti melakukan kegiatan pra-lapangan sampai dengan penelitian selesai. Dalam prosesnya, analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles & Huberman, yaitu selama proses pengumpulan data dilakukan tiga kegiatan penting, diantaranya yaitu : reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan verifikasi (*verification*). Apabila diuraikan sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, menyusun data dalam suatu cara pengambilan data, sehingga kesimpulan akhir dapat digambarkan. Selama proses pengumpulan data dari berbagai sumber, tentunya akan banyak data yang didapatkan oleh peneliti. Semakin lama peneliti berada dilapangan, maka data yang didapatkan akan semakin kompleks dan rumit, sehingga apabila tidak segera diolah akan dapat menyulitkan peneliti, oleh karena itu proses analisis data pada tahap ini

harus dilakukan. Untuk memperjelas data yang didapatkan dan mempermudah peneliti dalam pengumpulan data selanjutnya, maka dilakukanlah reduksi data.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Langkah penting selanjutnya adalah penyajian data. Secara sederhana penyajian data dapat diartikan sebagai sekumpulan informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan, atau pengambilan tindakan. Bentuk yang paling sering dari model kualitatif selama ini adalah teks naratif. Penyajian data sederhana dan mudah dipahami adalah cara utama untuk menganalisis data deskriptif kualitatif yang valid. Penyajian ini bisa dalam bentuk matriks, grafik atau bagan yang dirancang untuk menghubungkan informasi.

3. Verifikasi (*Verification*)

Tahap terakhir dari analisis pengumpulan data yaitu verifikasi data. Dari awal pengumpulan data, peneliti mencari arti dari hubungan-hubungan, mencatat keteraturan, pola-pola dan menarik kesimpulan. Kesimpulan yang dikemukakan diawal masih bersifat sementara, dan akan terus berubah selama proses pengumpulan data masih berlangsung. Akan tetapi, kesimpulan tersebut didukung oleh data yang valid dan konsisten yang peneliti temukan dilapangan, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Tabel 3.2
Pedoman Wawancara

No	Indikator	Kode Informan	Pertanyaan
1.	Perencanaan 1. SDM 2. Tahapan perencanaan 3. Tujuan	I ₁₋₁ I ₁₋₂ I ₁₋₃ I ₁₋₄	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana partisipasi masyarakat pesisir dalam perencanaan program PKPT di setiap Desa Pesisir Kecamatan Sumur ? 2. Apakah perencanaan program tersebut disesuaikan dengan kondisi kebutuhan yang ada di masyarakat ? 3. Apakah masyarakat dilibatkan dalam perencanaan dan penentuan tujuan dari kegiatan PKPT ?
		I ₁₋₅ I ₁₋₆ I ₁₋₇	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana proses pembentukan KMP (Kelompok Masyarakat Pesisir) ? 2. Siapa saja yang dapat menjadi anggota KMP? 3. Bagaimana proses pemilihan program yang akan diajukan dalam program PKPT ?
		I ₂₋₁ I ₂₋₂ I ₂₋₃	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa yang bapak ketahui tentang Program PKPT ? 2. Siapa saja yang ikut terlibat dalam kegiatan PKPT ? 3. Apa tujuan dari program PKPT ?
2.	Pelaksanaan 1. SDM 2. Hambatan	I ₁₋₁ I ₁₋₂ I ₁₋₃ I ₁₋₄ I ₁₋₅ I ₁₋₆ I ₁₋₇ I ₂₋₁	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana proses pelaksanaan program PKPT di Kawasan Pesisir Kecamatan Sumur ? 2. Apakah masyarakat aktif dan antusias melaksanakan kegiatan dalam program PKPT dengan memberikan kontribusi (uang,

		I ₂₋₂ I ₂₋₃	tenaga, dan pikiran) ? 3. Hambatan apa saja yang ditemui selama proses kegiatan program PKPT ?
3.	Pengawasan 1. Wewenang pengawasan 2. Prosedur pengawasan	I ₁₋₁ I ₁₋₂ I ₁₋₃ I ₁₋₄ I ₁₋₅ I ₁₋₆ I ₁₋₇	1. Siapakah yang bertanggung jawab untuk mengawasi kegiatan PKPT di Kawasan Pesisir Kecamatan Sumur ? 2. Bagaimana prosedur pengawasan kegiatan PKPT Kawasan Pesisir di Kecamatan Sumur ? 3. Apakah masyarakat ikut dilibatkan dalam pengawasan program PKPT Kawasan Pesisir Kecamatan Sumur ?
		I ₂₋₁ I ₂₋₂ I ₂₋₃	1. Apakah masyarakat ikut dilibatkan dalam pengawasan program PKPT Kawasan Pesisir Kecamatan Sumur ?
4.	Pemanfaatan dan pemeliharaan 1. Pencapaian tujuan 2. Evaluasi	I ₁₋₁ I ₁₋₂ I ₁₋₃ I ₁₋₄ I ₁₋₅ I ₁₋₆ I ₁₋₇	1. Apa manfaat yang dirasakan masyarakat Kawasan Pesisir Kecamatan Sumur setelah adanya program PKPT 2. Apakah 5 Bina dalam PKPT telah dilaksanakan ? 3. Bagaimana cara masyarakat Kawasan Pesisir di Kecamatan Sumur dalam pemeliharaan dan pengembangan hasil dari kegiatan PKPT ?
		I ₂₋₁ I ₂₋₂ I ₂₋₃	1. Apakah hasil dari program PKPT bermanfaat bagi masyarakat ?

Sumber : Peneliti, 2017

Data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian.

Dalam penelitian kualitatif data bersifat majemuk dan dinamis. Adapun untuk

pengujian keabsahan datanya, pada penelitian ini dilakukan dengan Triangulasi

Sumber dan Tringulasi Teknik :

- a. Triangulasi Sumber yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh dari beberapa sumber. Peneliti peneliti melakukan pengecekan data dengan wawancara dengan beberapa sumber yang sudah ditetapkan.
- b. Tringulasi Teknik yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama namun dengan teknik yang berbeda.

3.8 Jadwal Penelitian

Tabel 3.3

Waktu Pelaksanaan Penelitian

No.	Kegiatan	Waktu						
		April - Mei 2016	Juni - Juli 2016	Agustus - September 2016	Oktober - November 2016	Desember - Januari 2017	Januari - Mei 2018	Juni 2018
1.	Pengajuan Judul							
2.	Perizinan dan Observasi awal							
3.	Penyusunan Proposal Skripsi							
4.	Penyusunan Bab I - Bab III							
5.	Seminar Proposal							
6.	Acc Lapangan							
7.	Penyusunan Bab IV – Bab V							
8.	Sidang Skripsi							

Sumber : Peneliti, 2018

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Obyek Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian

Dalam Program Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh, Pemerintah Kabupaten Pandeglang telah menetapkan kawasan pesisir yang sesuai dengan kriteria Program tersebut, dimana kawasan tersebut terletak di wilayah Kecamatan Sumur dan terdiri dari tiga desa yang terletak dalam satu hamparan. Adapun desa-desa yang termasuk dalam penetapan kawasan tersebut diantara lain ; Desa Cigorondong, Desa Tamanjaya, Desa Ujung Jaya. Secara umum tiga desa tersebut memiliki karakteristik yang sama, merupakan desa penyangga Kawasan Konservasi Alam Taman Nasional Ujung Kulon dan sebelah barat langsung berbatasan dengan Selat Sunda.

A. Keadaan Geografis

Luas wilayah Desa Cigorondong adalah sebesar 502 Ha. Desa Cigorondong terletak di wilayah Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten. Berikut batas-batas wilayah Desa Cigorondong :

- Sebelah Utara : Desa Tunggal Jaya
- Sebelah Timur : Wilayah Taman Nasional Ujung Kulon
- Sebelah Selatan : Desa Tamanjaya

- Sebelah Barat : Selat Sunda

Wilayah Desa Cigorondong secara umum memiliki ciri geologis berupa lahan tropis yang cocok untuk kegiatan bercocok tanam, sehingga tidak heran hasil pertanian berupa padi sawah, padi ladang, palawija, dan perkebunan kayu sangat berpeluang untuk hasil yang maksimal jika di tanam di wilayah ini. Lahan tanah yang cenderung statis memberikan jaminan kepada para petani untuk panen yang melimpah.

Desa Cigorondong sebagian wilayah perbukitan dan dataran yang memiliki ketinggian rata-rata 10 meter di atas permukaan laut. Selain itu, di Desa Cigorondong banyak memiliki lahan potensial untuk dikembangkan Agro Bisnis Metropolitan.

Desa Tamanjaya memiliki luas wilayah sebesar 435 Ha. Desa Tamanjaya terletak di wilayah Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten. Adapun batas-batas wilayah Desa Tamanjaya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Desa Cigorondong
- Sebelah Timur : Wilayah TNUK
- Sebelah Selatan : Desa Ujungjaya
- Sebelah Barat : Selat Sunda

Wilayah Desa Tamanjaya merupakan wilayah yang berada di tepian Ujung Kulon dengan yang berbatasan langsung dengan Kawasan Taman Nasional Ujung

Kulon yang terletak sebelah barat Pulau Jawa, kondisi geografis Desa Tamanjaya merupakan wilayah Dataran Rendah dengan ketinggian wilayah ± 3 Mdpl, yang terdiri dari dataran rendah yang banyak didominasi oleh pemukiman dan wilayah pertanian berupa sawah, selain itu juga dataran rendah Desa Tamanjaya banyak dimanfaatkan untuk lahan perkebunan Kayu, palawija dan tanaman Holtikultura, selebihnya digunakan untuk fasilitas Umum berupa Tempat Pemakaman Umum sedangkan sebagian lagi terdiri dari wilayah pesisir pantai yang banyak dimanfaatkan penduduk untuk aktifitas nelayan. Selain wilayah pertanian, Desa Tamanjaya terdiri dari wilayah hutan rakyat yang terdiri dari hutan pantai dengan dominasi jenis mangrove sekitar ± 20 Ha.

Desa Ujung Jaya memiliki luas wilayah sebesar 844,5 Ha. Desa Ujungjaya terletak di $105^{\circ} 00^1 - 105^{\circ} 30^1$ BT dan $6^{\circ} 30^1 - 6^{\circ}55^1$ LS. Temperatur udara di wilayah ini antara 25° - 30° C. Curah hujan Rata-rata 4.838 mm/tahun. Desa Ujung Jaya terletak di wilayah Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten. Adapun batas-batas wilayah Desa Ujung Jaya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Desa Tamanjaya
- Sebelah Timur : Wilayah Taman Nasional Ujung Kulon
- Sebelah Selatan : Wilayah Taman Nasional Ujung Kulon
- Sebelah Barat : Selat Sunda

Wilayah Desa Ujungjaya merupakan wilayah yang berada di tepian Ujung Kulon dengan yang berbatasan langsung dengan Kawasan Taman Nasional Ujungkulon yang terletak sebelah barat Pulau Jawa, kondisi geografis Desa

Ujungjaya merupakan wilayah Dataran Rendah dengan ketinggian wilayah ± 3 Mdpl, yang terdiri dari dataran rendah yang banyak didominasi oleh pemukiman dan wilayah pertanian berupa sawah, selain itu juga dataran rendah Desa Ujungjaya banyak dimanfaatkan untuk lahan perkebunan Kayu, palawija dan tanaman Holtikultura, selebihnya digunakan untuk fasilitas Umum berupa Tempat Pemakaman Umum sedangkan sebagian lagi terdiri dari wilayah pesisir pantai yang banyak dimanfaatkan penduduk untuk aktifitas nelayan. Selain wilayah pertanian, Desa Ujungjaya terdiri dari wilayah hutan rakyat yang terdiri dari Hutan pantai dengan dominasi jenis mangrove sekitar ± 20 Ha.

Wilayah Dataran rendah Desa Ujungjaya pada umumnya digunakan untuk areal pertanian, pemukiman dan areal perikanan. Areal pertanian Desa Ujungjaya berupa sawah dengan komoditas padi dengan berbagai Varietas. Sedangkan dataran rendah lainnya merupakan wilayah pesisir yang dipergunakan penduduk sebagai sumber perikanan yang menjadi mata pencaharian penduduk sebagai nelayan. Wilayah pesisir Desa Ujungjaya yang merupakan bagian dari dataran rendah merupakan wilayah pemukiman dan hutan mangrove yang keberadaannya kini sudah mulai mengalami penyusutan akibat alih fungsi lahan untuk areal tambak udang. Wilayah Perbukitan Desa Ujungjaya dimanfaatkan penduduk untuk areal perkebunan dengan jenis Tanaman Kayu, Pete, Melinjo, Pisang, Singkong dan Holtikultura lainnya. Selain itu, wilayah perbukitan juga ada yang dimanfaatkan penduduk untuk areal pemukiman dan ladang. Wilayah gunung Desa Ujungjaya merupakan wilayah pinggiran hutan yang berbatasan langsung dengan Kawasan TNUK, wilayah ini digunakan penduduk sebagai wilayah

pelestarian yang dapat menunjang kelestarian Kawasan Konservasi yang dapat mendatangkan manfaat berupa suplai oksigen dan cadangan air dimusim kemarau serta sebagai penahan erosi bagi wilayah Desa Ujungjaya.

B. Keadaan Penduduk

Wilayah Desa Cigorondong sendiri sampai sekarang mempunyai jumlah penduduk sebanyak 2.472 jiwa terdiri dari 1.247 laki-laki dan 1.225 perempuan dengan jumlah KK sebanyak 803 Kepala Keluarga. Dalam kesehariannya, penduduk Desa Cigorondong memiliki beragam pekerjaan, diantaranya : petani, nelayan, buruh, PNS, pengusaha, anak sekolah, karyawan dan lain-lain. Berikut potensi SDM Desa Cigorondong :

a. Pendidikan :

- Pendidikan Tinggi : 35 Orang
- Pendidikan Menengah : 217 Orang
- Pendidikan Rendah : 328 Orang
- Belum Sekolah / Tidak Sekolah: 1.892 Orang

b. Pekerjaan :

- Petani/buruh : 1.737 Orang
- Pegawai : 475 Orang

c. Kepercayaan :

- Islam : 2.472 Orang

d. Kelembagaan : 13

Sumber : Rencana Kerja Kelompok (RKK) Mitra Jaya Tahun 2016

Wilayah Desa Tamanjaya mempunyai jumlah penduduk sebanyak 2.658 jiwa terdiri dari 1.284 laki-laki dan 1.374 perempuan dengan jumlah KK sebanyak 1.217 Kepala Keluarga. Berikut potensi SDM Desa Taman Jaya :

➤ Pendidikan :

- Pendidikan Tinggi : 27 Orang
- Pendidikan Menengah : 54 Orang
- Pendidikan Rendah : 1.868 Orang
- Belum Sekolah / Tidak Sekolah : 109 Orang

➤ Pekerjaan :

- Petani/buruh : 640 Orang
- Pegawai Negeri : 18 Orang
- Nelayan : 955 Orang
- Pedagang : 560 Orang

➤ Kepercayaan :

- Islam : 2.658 Jiwa

Sumber : Rencana Kerja Kelompok (RKK) Harapan Jaya Tahun 2016

Wilayah Desa Ujung Jaya mempunyai jumlah penduduk sebanyak 3.924 jiwa terdiri dari 1.961 laki-laki dan 1.953 perempuan dengan jumlah KK sebanyak 963 Kepala Keluarga. Berikut potensi SDM Desa Ujung Jaya :

➤ Pendidikan :

- Pendidikan Tinggi	:	27 Orang
- Pendidikan Menengah	:	43 Orang
- Pendidikan Rendah	:	2357 Orang
- Belum Sekolah / Tidak Sekolah	:	231 Orang

➤ Pekerjaan :

- Petani/buruh	:	737 Orang
- Pegawai	:	154 Orang

➤ Kepercayaan :

- Islam	:	3.858 Jiwa
---------	---	------------

Sumber : Rencana Kerja Kelompok (RKK) Pangkalan Baru Tahun 2016

C. Kondisi Perekonomian

Masyarakat Desa Cigorondong, Desa Tamanjaya dan Desa Ujung Jaya sebagian besar masyarakat masih berada dibawah garis kemiskinan, hal ini disebabkan oleh masih rendahnya sumber daya manusia. Dari tingkat pendidikan masyarakat pada umumnya hanya tamat Sekolah Dasar, bahkan tidak sedikit

jumlah penduduk yang tidak tamat Sekolah Dasar, hanya sebagian kecil saja yang merupakan taman SMP dan SMA dan Sarjana.

Dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, masyarakat sebagian besar merupakan petani/buruh tani. Hal ini sesuai kondisi wilayah yang didominasi oleh areal pertanian berupa sawah. Selain petani, sebagian besar masyarakat bermata pencaharian sebagai nelayan, hal ini mengingat kondisi geografis yang merupakan wilayah Pesisir.

D. Sosial Budaya

Penduduk Desa Cigorondong, Desa Tamanjaya dan Desa Ujung Jaya 100% menganut agama Islam. Hal ini melatar belakangi kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Namun didalam Kehidupan masyarakat masih terdapat kepercayaan akan mitos-mitos yang bersifat ghaib dan mistis. Masyarakat sekitar Taman Nasional dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Sunda. Dari sisi budaya, masyarakat memiliki norma-norma secara turun temurun yang sampai saat ini masih bertahan. Norma-norma tersebut merupakan bagian dari budaya masyarakat sebagai landasan berfikir, bersikap dan berbuat yang selaras dengan norma-norma agama, sosial dan Negara. Pola pergaulan kemasyarakatan masih kental kekeluargaannya hingga kini sikap gotong royong, solidaritas dalam kehidupan sehari-hari masih erat melekat pada masyarakat.

4.2 Deskripsi Data

4.2.1 Deskripsi Data Penelitian

Deskripsi data merupakan penjelasan mengenai data yang telah didapatkan dari hasil penelitian lapangan dalam penelitian mengenai Partisipasi Masyarakat Pesisir Dalam Program Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT) ini. Data yang peneliti dapatkan lebih banyak berupa kata-kata dan penjelasan yang peneliti dapatkan melalui proses wawancara dan observasi langsung. Dalam penelitian ini, kata-kata dan penjelasan yang peneliti dapatkan melalui proses wawancara dan observasi langsung. Dalam penelitian ini, kata-kata dan penjelasan para informan yang diwawancarai merupakan sumber data utama, sumber data utama dicatat dalam catatan tertulis atau melalui alat perekam yang peneliti gunakan selama proses wawancara berlangsung.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif sehingga data yang diperoleh bersifat deskriptif berbentuk kata dan kalimat dari hasil wawancara mendalam, hasil observasi dan studi dokumentasi.

4.2.2 Deskripsi Informan Penelitian

Dalam penelitian ini, informan penelitian dipilih dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Adapun informan-informan yang peneliti tentukan, merupakan orang-orang yang peneliti anggap memiliki informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, karena mereka (informan) dalam kesehariannya senantiasa berurusan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Adapun informan dalam

penelitian ini adalah informan yang dianggap mempunyai sumber data atau informasi yang dapat menjawab permasalahan yang diteliti. Beberapa informan pada penelitian ini antara lain sebagai berikut:

Tabel 4.1 Informan Penelitian

No.	Informan	Kode Informan	Jabatan	Keterangan
1.	Abdul Basit	I ₁₋₁	Staf Kelautan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pandeglang	<i>Key Informan</i>
2.	Hendi Suryadi, ST	I ₁₋₂	Tenaga Ahli Pendamping PKPT Desa Cigorondong	<i>Key Informan</i>
3.	Supriani	I ₁₋₃	Tenaga Ahli Pendamping PKPT Desa Tamanjaya	<i>Key Informan</i>
4.	Fauzan Adima	I ₁₋₄	Tenaga Ahli Pendamping PKPT Desa Ujung Jaya	<i>Key Informan</i>
5.	Handi Komarudin	I ₁₋₅	Ketua KMP (Kelompok Masyarakat Pesisir) Mitra Jaya	<i>Key Informan</i>
6.	Achmad Sanusi	I ₁₋₆	Ketua KMP (Kelompok Masyarakat Pesisir) Harapan Jaya	<i>Key Informan</i>
7.	Ahmad	I ₁₋₇	Ketua KMP (Kelompok Masyarakat Pesisir) Pangkalan Baru	<i>Key Informan</i>
8.	Agus Aspuri	I ₂₋₁	Kaur Keuangan Desa Cigorondong	<i>Secondary Informan</i>
9.	Sarju Wahyudin	I ₂₋₂	Kelapa Desa Tamanjaya	<i>Secondary Informan</i>
10.	Sumardi	I ₂₋₃	Ketua LPM Desa Ujung Jaya	<i>Secondary Informan</i>

Sumber : Peneliti, 2017

Informan di atas merupakan informan utama dalam penelitian ini. Adapun data-data lain yang merupakan sebagai informasi-informasi pelengkap dari informasi yang telah diberikan oleh informan utama.

4.3 Analisis Hasil Penelitian

Analisis hasil penelitian merupakan suatu data dan fakta yang didapatkan langsung dari lapangan oleh peneliti, dan disesuaikan dengan teori utama yang peneliti gunakan untuk menganalisis masalah penelitian. Penelitian mengenai Partisipasi Masyarakat Pesisir Dalam Program Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT) ini, peneliti menggunakan teori partisipasi menurut Cohen dan Uphoff (Ulifah, 2003:23).

Menurut Cohen dan Uphoff dalam Ulifah (2003:23) mengatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan terlibat dalam empat hal yaitu : partisipasi dalam perencanaan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam pengawasan, dan partisipasi dalam pemeliharaan dan pemanfaatan.

4.3.1 Partisipasi Dalam Perencanaan

Partisipasi dalam perencanaan merupakan suatu rencana atau keputusan yang telah disiapkan oleh pemerintah dalam masyarakat hanya dapat menyatakan setuju tidak akan membawa hasil yang diharapkan. Mengacu pada konsep, maka partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pada hakikatnya harus meliputi penentuan tujuan oleh masyarakat sendiri dari serangkaian kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dengan mempergunakan potensi sumber-sumber yang ada

dimasyarakat sebaik mungkin yang kesemuanya itu disampaikan dalam rapat musyawarah bersama.

Keterlibatan masyarakat di dalam penyusunan perencanaan suatu program sangatlah penting, perencanaan program akan tepat mengenai sasaran, terlaksana dengan baik dan bermanfaat hasilnya jika dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan adanya program-program partisipatif memberikan kesempatan secara langsung kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam rencana yang menyangkut kesejahteraan mereka dan secara langsung juga melaksanakan sendiri serta memetik hasil dari program tersebut.

Program Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT) ini menjadikan masyarakat berperan aktif dalam merumuskan sendiri permasalahan yang dihadapi, merencanakan langkah-langkah yang diperlukan, dan menyusun kegiatan-kegiatan yang akan mereka lakukan. Sesuai yang diungkapkan oleh Staf Bidang Kelautan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pandeglang menyatakan bahwa :

“Berhasil tidaknya suatu program pemerintah itu kan tidak terlepas dari masyarakatnya itu sendiri. Sesuai nama programnya pesisir tangguh, dalam program Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT) ini masyarakat diharapkan dapat berkontribusi dan berpartisipasi membangun wilayahnya. Jadi semua perencanaan mereka yang merumuskan, mereka membuat program itu melihat dari RPJMDes. Dari RPJMDes mereka membuat skala prioritas mana kegiatan yang nantinya lebih bermanfaat”

Berdasarkan hasil wawancara dengan I₁₋₁ diatas dapat diketahui bahwa dalam program Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh ini, masyarakat menentukan bersama program-program kegiatan yang akan mereka lakukan dengan melihat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).

Tenaga Ahli Pendamping PKPT Desa Ujung Jaya mengatakan bahwa :

“Kronologis rencana program itu dibuat, pada awalnya 2012 kelompok ini diawali dengan musyawarah kelompok ya, pembentukan kelompok yang didasarkan adanya peluang adanya program PKPT, jadi dari dinas ada dulu sosialisasi kesini ngasih tau mau ada program PKPT, artinya kan gayung bersambut masyarakat kan sudah memiliki keinginan seperti ini difasilitasi oleh DKP, kemudian setelah musyawarah kelompok kita adakan perencanaan dan RPKP (Rencana Pembangunan Kawasan Pesisir), ini kan awalnya diperuntukan untuk 5 tahun, proses perencanaan itu awalnya dari musyawarah kelompok dengan melihat kembali RPJMDes, terus dari penjabaran RPKP tersebut kelompok itu membuat RKK, RKK ini merupakan dokumen perencanaan tahunan, dan masyarakat yang bukan kelompok juga ikut dilibatkan, kan sebelum mengadakan musyawarah kelompok, kita mengadakan dulu musyawarah bersama dibalai desa dulu, terus sosialisasi ke masyarakat luas bahwa tahun ini ada bantuan dari DKP berupa program PKTP, kita juga meminta masukan bagaimana baiknya prosesnya, baru kita kerjakan RKK (Rencana Kegiatan Kelompok), biasanya kalo RPKP itu yang melibatkan orang banyak, karena adanya review dari RPJMDes, karena kan kalau mereview RPJMDes ini harus melibatkan LPM BPD pokoknya semua perangkat desa.”

Berdasarkan wawancara diatas dengan I₁₋₄ diketahui bahwa pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pandeglang melakukan sosialisasi terkait Program Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT), lalu masyarakat bermusyawarah untuk pembentukan kelompok, dalam prosesnya melibatkan seluruh perangkat desa. Dalam menentukan Rencana Kegiatan Kelompok (RKK), mengacu pada Rencana Pengembangan Kawasan Pesisir (RPKP) lima tahun, dan melakukan review RPJMDes didampingi oleh perangkat desa. Hal serupa diungkapkan oleh kepala desa Tamanjaya :

“Alhamdulillah 3 desa disini kan dapet jadi mulai dari mengadakan musyawarah dengan masyarakat kita berpacu kepada prioritas kebutuhan masyarakat sendiri, jadi nantinya bisa manfaat. Seperti disini kan sudah ada infrastruktur jalan, paving blok, pengadaan air minum alhamdulillah kan jadi masyarakat masih berjalan programnya dengan melibatkan mereka walaupun tidak signifikan peningkatan tersebut jadi tetep kalau kita apapun

kegiatannya kita perencanaannya itu dari musyawarah, apa yang diusulkan oleh masyarakat sesuai sama kondisi lah.”

Berdasarkan wawancara diatas dengan I₂₋₂ diketahui bahwa perencanaan dimulai dengan musyawarah desa dengan masyarakat, program yang dipilih merupakan prioritas kebutuhan desa. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan desa Tamanjaya yaitu, perbaikan jalan desa, *paving blok*, dan pengadaan depot air minum.

Tenaga ahli pendamping desa Cigorondong pun mengatakan :

“Perencanaannya kalo untuk infrastruktur kan sudah lama adanya, kan mereka lihat dari RPJMDes dan kami juga melibatkan masyarakat dari mulai perencanaan awal, desainnya, dan semua itu pure dikerjakan oleh mereka. Semua ikut bergabung dari mulai pengukuran, survei toko material, survei lokasi. Dulu awal survei lokasi juga didampingi pihak DKP dan Kementerian”

Berdasarkan wawancara diatas dengan I₁₋₂ diketahui bahwa perencanaan pembangunan infrastruktur sudah terencana dalam RPJMDes, dalam proses perencanaan masyarakat ikut berpartisipasi dari mulai pengukuran, survei lokasi, dan survei toko bangunan. Sama halnya dengan apa yang diungkapkan tenaga ahli pendamping desa Tamanjaya :

“Awal perencanaan program itu dilakukan musyawarah, adapun program yang dibuat itu kami mengadopsi dari RPJMDes, jadi untuk melihat prioritas mana tidak dapat di danai oleh dana desa maka kami usulkan di program ini”

Berdasarkan wawancara diatas dengan I₁₋₃ diketahui bahwa dalam pemilihan program kegiatan dilakukan dengan cara musyawarah dan memperhatikan RPJMDes terkait prioritas pembangunan desa yang belum terealisasi, diusulkan dalam program tersebut.

Kelompok masyarakat pesisir (KMP) adalah penanggung jawab proses pelaksanaan kegiatan. Masing-masing KMP terdiri dari 10 – 14 anggota. Proses perencanaan yang dilakukan oleh KMP antara lain sebagai berikut :

Ketua KMP Mitra Jaya desa Cigorondong menuturkan :

“Pembentukan KMP kronologisnya dari pihak DKP itu datang dengan pihak kementerian kita diadakan musyawarah ada informasi untuk pembentukan kelompok, kita adakan musyawarah dusun makanya kepengurusan kita ambil dari tiap-tiap dusun supaya ada pemertaan, karena disamping ini tujuannya infastruktur nelayan jadi tidak langsung ditunjuk si a si b tapi diadakan dulu musyawarah. Ada 3 pengurus 10 anggota. Jadi awalnya kita sosialisasi nih kita ada program ini, dengan konsekuensi kita jangan sampe kita berpacu pada proyek atau materi, adapun anggaran dari pemerintah tidak bisa sepenuhnya kita anadalkan, anggota pun kita tidak banyak karena semakin banyak orang tapi tidak bisa kerja itu pemborosan waktu, jadi orang yang berperan aktif dikampungnya kita ambil. Jadi mereka mewakili aspirasi dari masyarakat, setelah itu kita bentuk disepakati, di setujui kepala desa, di SK kan diakta notarisnya. Karena waktu dulu dikabupaten PKPT ini harus ada akta notaris harus jelas legalitasnya, kalo misal Cuma SK kepala desa dikhawatirkan kelompok ini dainggap kelompok abal-abal. Rencana kegiatan program ini kita adopsi dari RPJMDes, jadi RPJMDes ini kita liat prioritas kebutuhan desa dimana program tidak bisa tercover oleh desa jadi kita prioritaskan program kita”

Berdasarkan wawancara diatas dengan I₁₋₅ diketahui bahwa proses pembentukan Kelompok Masyarakat Pesisir (KMP) itu diawali dengan sosialisasi oleh pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pandeglan dan pihak Kementerian Kelautan. Selanjutnya dilakukan musyawarah, anggota KMP diambil dari tiap-tiap dusun yang bertujuan agar merata dan tidak terjadi kecemburuan sosial. Selain itu anggota KMP juga merupakan masyarakat yang aktif dibalai desa. KMP terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan 10 orang anggota. Selanjutnya setelah terbentuknya kelompok dan disepakati bersama, kelompok didaftarkan di akta notaris agar jelas legalitasnya. Untuk rencana

program kegiatan dilihat dari RPJMDes. Hal serupa diungkapkan oleh ketua KMP

Harapan Jaya desa Tamanjaya :

“Awalnya kita memang sudah punya kelompok tapi ya bisa dibilang belum legal lah, akhirnya ada program PKPT ini ditawarkan jadi ketua. Pembentukan KMP itu awalnya kami dapat surat tembusan bahwa akan diadakan program pesisir tangguh melalui dinas kelautan, setelah itu kita mengadakan sosialisasi kepada semua masyarakat tamanjaya maka dibentuklah kelompok hasil musyawarah. Siapa saja yang bisa jadi anggota KMP tapi kita mengutamakan keterwakilan masing-masing kampung. Kalau program kita itu hasil dari musyawarah”

Berdasarkan wawancara diatas dengan I₁₋₆ diketahui bahwa sebelum program PKPT ini mengharuskan adanya KMP sebagai penanggung jawab kegiatan, masyarakat sudah memiliki kelompok nelayan. Pembentukan KMP diawali dengan adanya pemberitahuan serta sosialisasi dari pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pandeglang. Anggota KMP diutamakan yang mewakili masing-masing kampung. Rencana program kegiatan diambil dari hasil musyawarah.

Ketua KMP Pangkalan Baru mengungkapkan :

“Proses pembentukan KMP, awalnya saling lempar buat jadi ketua soalnya kurang siap bertanggung jawab, jadi awalnya musyawarah bersama dulu, kelompoknya siapa yang mau aja jadi anggota, saya juga jadi ketua ditunjuk aja langsung, jadi akhirnya mau gak mau karena dipercaya yaudah mau aja bertanggung jawab jadi ketua ngemban amanah aja, anggota KMP siapa yang siap aja 10 orang, malah pada gamau awalnya nyari 10 orang aja sulit pada gamau, karena takut pertanggung jawabannya terus takut udah capek-capek dikibulin lagi programnya gak turun-turun”

Berdasarkan wawancara diatas dengan I₁₋₇ diketahui bahwa proses pembentukan KMP dilakukan dengan musyawarah bersama. Namun terdapat kengganannya dari masyarakat untuk menjadi anggota kelompok dikarenakan pertanggung jawaban kegiatan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti ditemukan beberapa temuan lapangan dalam partisipasi masyarakat dalam perencanaan antara lain :

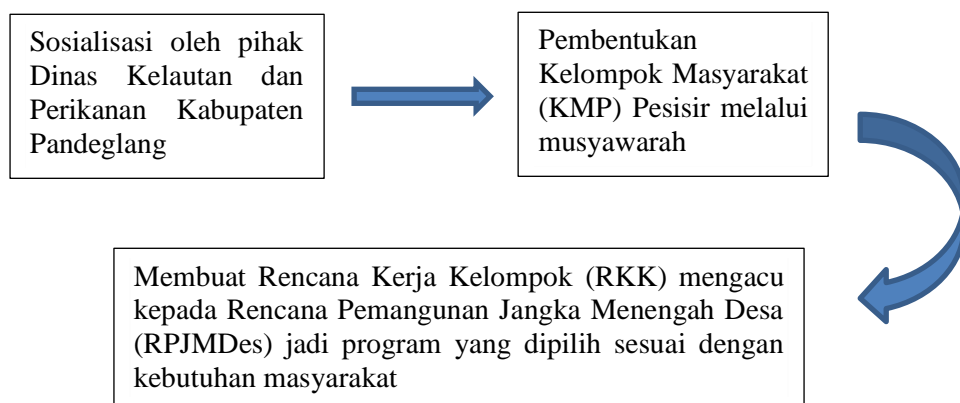
Tabel 4.2 Temuan Lapangan Partisipasi dalam Perencanaan

NO.	INDIKATOR	TEMUAN LAPANGAN
1.	Perencanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Di setiap desa proses perencanaan diawali dengan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pandeglang 2. Proses perencanaan di Desa Cigorondong, Desa Tamanjaya dan Desa Ujungjaya seluruhnya melibatkan seluruh masyarakat melalui musyawarah 3. Dalam membuat Rencana Kerja Kelompok (RKK) Desa Cigorondong, Desa Tamanjaya dan Desa Ujungjaya mengacu kepada Rencana Pemangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) jadi program yang dipilih sesuai dengan kebutuhan masyarakat 4. Desa Cigorondong dalam pembentukan kelompok diambil dari masing – masing dusun, namun dipilih orang – orang yang aktif di balai desa 5. Desa Cigorondong dalam pembentukan kelompok diambil dari masing – masing kampung agar tidak terjadi kecemburuan sosial 6. Desa Ujungjaya dalam pembentukan Kelompok Masyarakat Pesisir (KMP) terdapat keengganan masyarakat untuk menjadi anggota dikarenakan tidak siap akan pertanggung jawaban kegiatan

Sumber : Peneliti hasil observasi, 2017

Dapat disimpulkan bahwa proses perencanaan Program Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh ini diawali dengan musyawarah untuk melakukan pembentukan kelompok. Selanjutnya kelompok buat akta notaris agar jelas legalitasnya. Dalam pembentukan kelompok umumnya diambil disetiap kampung

dimasing – masing desa, agar tidak terjadi kecemburuan sosial. Namun masih ada masyarakat yang enggan menjadi pengurus atau anggota kelompok dikarenakan beban tanggung jawab yang diberikan. Pembuatan Rencana Kegiatan Kelompok (RKK), mengacu pada Rencana Pengembangan Kawasan Pesisir (RPKP) lima tahun, dan melakukan review RPJMDes didampingi oleh perangkat desa dan masyarakat yang aktif.



Gambar 4.1 Proses Perencanaan dalam Program Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh di Desa Cigorondong, Desa Tamanjaya dan Desa Ujung jaya



Gambar 4.2 Musyawarah pembentukan Kelompok Masyarakat Pesisir desa Ujung Jaya



Gambar 4.3 Sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pandeglang di desa Cigorondong

4.3.2 Partisipasi Dalam Pelaksanaan

Partisipasi dalam pelaksanaan merupakan hubungan antara pelaksana dan pelaksanaannya cukup erat, masalah pelaksanaannya sudah cukup dipertimbangkan

dalam menyusun rencana. Hal ini agar terdapat jaminan yang lebih besar dalam merealisasikan tujuan dan sasaran-sasaran rencana itu, oleh sebab itu rencana harus diupayakan semaksimal mungkin. Pembangunan meliputi; pengalokasian daya dan dana, administrasi, koordinasi dan penjabarannya dalam program. Sesuai dengan konsep tersebut maka partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan dapat dilihat dari sejauh mana masyarakat secara aktif ikut melaksanakan pekerjaan dengan memberikan kontribusi (uang, tenaga dan pikiran) untuk menunjang setiap program pembangunan di daerah yang bersangkutan.

Pembangunan masyarakat desa merupakan gerakan pembangunan yang didasari oleh peran serta masyarakat dan swadaya masyarakat. Atas dasar hal tersebut maka kesadaran, peran serta dan swadaya masyarakat perlu ditingkatkan agar partisipasi masyarakat dalam pembangunan menjadi suatu kewajiban bersama.

Tahapan selanjutnya setelah melakukan musyawarah dan pembentukan kelompok yaitu pelaksanaan program kegiatan. Program kegiatan yang dibuat mengacu kepada RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) dan berdasarkan RPKP di masing-masing desa, kemudian dituangkan dalam Rencana Kegiatan Kelompok (RKK) untuk pengajuan dana.

Rencana Kegiatan Kelompok (RKK) yang sudah dibuat oleh kelompok dengan dilakukan musyawarah desa, selanjutnya dokumen diserahkan ke Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pandeglang untuk diverifikasi. Seperti yang diungkapkan oleh staf dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten pandeglang :

“Proses pelaksanaan itu dimulai dari kita sosialisasi dengan pihak kementerian, terus mereka membentuk KMP, KMP ini bertugas sebagai penanggung jawab kegiatan dilapangan, terus mereka mengajukan RKK langsung kita kroscek lokasi layak apa tidak, kalau sudah layak baru proses untuk pengajuan dana. Pelaksanaan dilapangan sih berjalan baik, banyak masyarakat selain dari KMP juga ikut membantu, tapi ya gitu masih ada masyarakat yang pikir program ini bisa memberikan keuntungan pribadi buat mereka, jadi kadang kalau dari pihak dinas itu kesana suka ngomong masalah tenaga mereka kaya berharap dibayar, kita sebisa mungkin memberikan pemahaman kalau program ini tuh merupakan istilahnya stimulan buat masyarakat, jadi tetep yang merencanakan dan mengerjakan itu masyarakat sendiri, toh nantinya mereka juga yang dapat merasakan manfaatnya.”

Berdasarkan wawancara diatas dengan I₁₋₁ diketahui bahwa proses pelaksanaan diawali dengan sosialisasi yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pandeglang dan pihak Kementerian Kelautan. Selanjutnya pembentukan Kelompok Masyarakat Pesisir (KMP) yang bertugas sebagai penanggung jawab dilapangan. Selanjutnya dibuat RKK dan langsung dilakukan survei oleh pihak dinas guna mengecek layak atau tidaknya bantuan tersebut diberikan. Selanjutnya proses pengajuan dana. Dalam proses pelaksanaan masyarakat selain anggota KMP pun ikut membantu, tetapi masih ada sebagian masyarakat yang mengharapkan keuntungan pribadi dari usaha mereka dalam membantu program tersebut. Hal serupa diungkapkan oleh Tenaga Ahli Pendamping Desa Cigorondong :

“Pelaksanaan itu awalnya KMP itu mengajukan proposal ke DKP, terus diverifikasi, karena dikabupaten itu kan ada koordinator pendamping. Terus nanti turun dari DKP kelayakan usulan programnya setelah sudah layak, baru saya buat desainnya bersama mereka, contoh kaya untuk rumah isi ulang air minum itu ada hibahnya mereka harus mengibahkan bahwa itu akan digunakan untuk program PKPT, dan itu dikelola oleh KMP. Partisipasi masyarakat berupa tenaga, jadi gini kaya galian pondasi itu mereka tidak dibayar, jadi swadaya berupa tenaga dari masyarakat. Hambatannya untuk isi ulang air minum harusnya kan diuji

dulu kualitas air, minimal ke dinkes lah cuma kan di RAB nya gak ada ya intinya ya layak dan tidak untuk dikonsumsi kalo yang mangrove karena kalo disitu kan sudah terlalu dalam airnya makanya diusulkan mangrove cuma ya itu tadi lokasi nya kurang layak harusnya harus agak jauh dari muara atau pantai itu terlalu dekat makanya pada ilang, terus sekarang kan udah dipakai tambak udang juga. ”

Berdasarkan wawancara diatas dengan I₁₋₂ diketahui bahwa dalam proses pelaksanaan berawal dari KMP mengajukan proposal kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pandeglang untuk diverifikasi, selanjutnya dari pihak Dinas melakukan survei. Untuk program pembuatan depot air minum, tanah harus dihibahkan dulu untuk peruntukannya digunakan sebagai program PKPT yang nantinya akan dikelola oleh KMP. Partisipasi masyarakat selain anggota KMP itu berupa tenaga. Hambatan yang dihadapi yaitu penanaman mangrove yang gagal dikarenakan kurang pengetahuan masyarakat terkait proses penanaman mangrove, serta hasil dari rumah depot air minum tidak direncanakan untuk diujikan layak tidaknya dikonsumsi.

Tenaga Ahli Pendamping Desa Tamanjaya mengungkapkan :

“Proses pelaksanaan programnya pertama - tama kami ketika dapat info akan dapat bantuan kita mengadakan musyawarah, pelaksanaan bermusyawarah, evaluasi juga kita tetap bermusyawarah. Kami tetap disini ada swakelola ya kami tawarkan kalo kalo ada pekerjaan siapa saja yang mau gabung ya silahkan. Kontribusi masyarakat ikut serta membantu kami dalam program itu. Karena program ini kan menyeluruh bukan bantuan perorangan kaya bikin saluran air drainase itu banyak masyarakat yang berperan dan kita butuh tenaga lebih dari sepuluh orang, maka kita akan menjalankan kegiatan tersebut tetap dengan banyaknya masyarakat akan lebih cepat terselesaikan, kadang-kadang kemarin kami juga ada tiga kegiatan, buat saluran air lebih dari 20 orang terlibat, karena kami untuk masyarakat pemerintah kan hanya memfasilitasi anggaran aja kan, semua tetap ikut partisipasi karena KMP itu kan secara organisasi kan untuk gimana mengusulkan gimana administrasi tetep kalau pekerjaan dilapangan masyarakat semua ikut bantu. Contoh kita udah merasakan dari tiga titik di kampung nelayan, kampung cisaat, kampung tamanjaya. Tapi rata-rata misalnya programnya ditamanjaya

ya yang bantung sekampung itu semua gak dicampur adukan sama kampung lain. Hambatan yang dirasakan selain masih rendahnya kemampuan administrasi dari kelompok jadi semua dibantu sama perangkat desa, terus juga kan cuaca kadang gak nentu ”

Berdasarkan wawancara diatas dengan I₁₋₃ diketahui bahwa proses pelaksanaan dilakukan dengan swakelola oleh masyarakat. KMP disini hanya sebagai kebutuhan organisasi dalam tertib adminstrasi, tetapi dalam prosesnya masyarakat yang bukan anggota KMP ikut membantu. Hambatan yang dirasakan masih rendahnya kemampuan KMP untuk tertib administrasi. Seperti yang dungkapkan oleh Tenaga Ahli Pendamping Desa Ujung Jaya :

“Proses pelaksanaan, proses RKK ini biasanya dilakukan di awal tahun, kemudian RKK ini ditingkat DKP ada Pendamping Teknis, kita dalam RKK tersebut tetap memasukan anggaran biaya versi masyarakat, tapi kan dalam prosesnya ini nanti harus ada orang teknis yang mampu menganalisa secara benar, nanti hasil RKK yang kami buat ini langsung di godok kembali ditingkat kabupaten ada penyusuaian ada rasionalisasi anggaran, nanti setelah di cek secara benar baru disetujui kepala dinas baru diajukan untuk proses pencairan dana. Kedua secara teknis terkait dengan penyusunan program terutama dianggarkannya dana, jadi rancangan awal tetap dari kami hasil dari musyawarah, tapi nanti dikaji kembali oleh kabupaten, oleh pendamping teknis dikabupaten. Dalam pelaksanaan dilapangan, semua masyarakat ikut berpartisipasi ya yang pertama dalam bentuk tenaga contohnya dalam pembangunan jalan kan tidak mungkin dapat beton yang sudah jadi, dan tidak mungkin beton itu dapat diurug, langsung jadi tanpa dikerjakan oleh masyarakat banyak, masyarakat secara swadaya memberikan bantuan alakadarnya untuk jalanan itu sendiri. Dari sisi partisipasi ini kan berangkat dari keinginan masyarakat bagaimana desa Cigorondong ini, kemudian datang program PKTP ini dan Alhamdulillah masyarakat sangat antusias, hampir 80% terlibat uerutama dalam proses pembangunannya, proses pembangunannya itu 100% warga yang mengerjakan, pas tahun 2015 ada pengerjaan cor beton jalan, tidak mungkin dikerjakan dengan 10 orang, jadi dikerjakan bersama alhamdulillah prosesnya cepat. Hambatannya memang tadi, tidak semua masyarakat memiliki kesadaran bagaimana dia bertanggung jawab pada proses pembangunan jalan tersebut, kesadaran masyarakat masih rendah, dalam pekerjaan ini ketika beton ini mulai dikerjakan masih ada pemikiran-pemikiran bahwa oh itu mah hanya proyek dan sebagainya, sehingga kita asal kerja itu yang masih jadi kendala, padahal itukan punya kita siapa lagi yang meningkatkan kualitas

siapa lagi yang bertanggung jawab terhadap perbaikan jalan kalau bukan dari kita sendiri, untuk hal semacam itu ya masih rendah, akan tetapi secara keseluruhan kendala-kendala seperti itu masih bisa diatasi. ”

Berdasarkan wawancara diatas dengan I₁₋₄ diketahui bahwa dalam proses pelaksanaan dilakukan pada awal tahun, KMP membuat RKK (Rencana Kegiatan Kelompok) dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Selanjutnya laporan tersebut diserahkan kepada pendamping teknis yang ada di dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pandeglang, untuk dianalisa kewajaran anggaran biaya dan hal teknis pembangunan lainnya. Apabila telah disetujui laporan tersebut diajukan proses pencairan dana. Dalam pelaksanaan kegiatan masyarakat antusias membantu proses kegiatan, hampir semua warga ikut membantu. Selain itu, beberapa masyarakat membantu secara swadaya dalam pembangunan jalan. Hambatannya adalah rendahnya pemahaman masyarakat bahwa program ini merupakan swadaya dari masyarakat. Selanjutnya Kepala Desa Tamanjaya mengungkapkan :

“Proses pelaksanaannya setelah buat rencana program setelah diusulkan tahapannya harus punya NPWP harus ada notaris juga kelompok itu legalitasnya jelas jadi gak sembarangan kalo udah dibentuk KMP beres baru diusulkan, setelah diusulkan nanti beberapa bulan kemudian anggarannya cair baru kita persiapan melakukan kegiatan, karena kegiatan tersebut uangnya dulu gak seperti kegiatan-kegiatan yang lain di anggaran ini 40% kita laksanakan sampai mana anggaran itu abis baru narik lagi dua kali tahapan. Partisipasi masyarakat sih maunya program ini kalo bisa dipertambah dan diperluas, kan ini sistemnya kontrak cuma tiga tahu berhenti, mereka bilang pak lurah kalo bisa ini program jangan berhenti tapi kan itu bukan kewenangan saya. Jadinya kan nanti masyarakat bisa berkembang dan membantu perekonomian meningkat.”

Berdasarkan wawancara diatas dengan I₂₋₂ diketahui bahwa prses pelaksanaan diawali dengan pembentukan kelompok serta administrasi kelompok berupa NPWP dan akta notaris agar jelas legalitasnya. Pencairan dana dilakukan

dengan 2 tahapan yang pertama diberikan setelah usulan KMP diterima, selanjutnya setelah pelaksanaan mencapai 40% sisa dana ditarik kembali. Masyarakat antusias dalam menyambut program ini, mereka berpartisipasi dalam pelaksanaan, dan mengharapkan bantuan seperti akan terus berlanjut.

Ketua KMP dari masing – masing desa juga mengungkapkan hal yang serupa seperti yang diungkapkan oleh ketua KMP Mitra Jaya Desa Cigorondong :

“Proses pelaksanaan kegiatan kita berangkat dari RPJMDes itu kita langsung buat RKK, kalo teknis dilapangan kita melakukan pemberdayaan dimasyarakat jadi karena ini swakelola kita memberdayakan masyarakat yang ada, secara pelaksanaannya secara pengelolaannya, kita libatkan masyarakat setempat karena ini kaitan dengan masyarakat. Karena masyarakat ini sangat membutuhkan pembangunan infrastruktur dengan adanya program ini menyambut baik, contohnya pas waktu 2015 dikampung cigorondong dan pasirjaya emang belum ada air bersih ketika kita sosialisasikan bahwa kita punya program yang insya Allah kalo kita realisasikan itu bapak masyarakat akan merasakan manfaatnya, bisa diliat di proses pengerjaan tidak diambil dari luar justru mereka langsung, kaya misal pasang pipa ya, karena pasang pipa ini kan swakelola dalam penggalian pipa itu mereka bisa menyumbangkan tenaga dan lain2, terus pipa ini kan melewati area pesawahan kita minta ijin kepada pemilik sawah mereka mengizinkan, kaya kemaren ada program langsung dari PU tidak diijinkan lewat persawahan oleh masyarakat karena dari pihak mereka kita mengadakan pendekatan dengan masyarakat. Berbeda dengan di PKPT, karena kita pemberdayaan larinya dan kita sering sosialisasi dimasyarakat kita melihat apa yang dibutuhkan oleh mereka dan dijadikan program kerja. Kalau hambatannya lebih ke teknis, karena disini jauh di toko material agak kesulitan waktu itu kan standarnya pake wavin sedangkan disini jarang yang pakai wavin, tapi akhirnya kita cari distributor yang bisa kirim barang kesini. SDM dianggota kalo berbicara aktif dan tidaknya itu tergantung program kerja kita, sempet saya pengen ngundurin diri tapi gak boleh sama anggota, ya kan masyarakat punya aktivitas gak serta merta setiap hari sama kelompok karena kan mereka masih punya kesibukan sendiri kalau siang pada kerja bertani melaut gitu”

Berdasarkan wawancara diatas dengan I₁₋₅ diketahui bahwa Rencana Kegiatan Kelompok (RKK) mengacu pada RPJMDes, selanjutnya pada proses pelaksanaan dilakukan swakelola oleh masyarakat, karena tujuan dari program ini

adalah memberdayakan masyarakat dalam perencanaan maupun pengelolaannya. Adanya program pembangunan sarana air bersih disambut baik oleh masyarakat, dikarenakan dikampung cigorondong dan kampung pasirjaya msyarakat masih kesulitan mendapatkan air bersih, masyarakat berpartisipasi dengan tenaga. Selain itu dengan pendekatan yang baik, masyarakat dapat memberikan ijin khususnya mereka yang memiliki lahan persawahan yang dilewati pipa-pipa untuk sarana air bersih. Hambatan yang dirasakan mengenai teknis dilapangan sulitnya akses dan tidak adanya toko material yang mumpuni, serta kesibukan anggota KMP yang bekerja pada siang hari. Selanjutnya ketua KMP Desa Tamanjaya mengungkapkan :

“Pas proses pelaksanaannya awalnya kita setelah dibentuk KMP mengajukan usulan kegiatan hasil dari musyawarah, setelah dana cair baru kita kerjakan. Pembentukan KMP kami terdorong dari aturan pemerintah, memang gak ada dari dulunya kalau KMP ini, ini hanya buat Program buat kegiatan ini aja, tetep kita kita melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan, karena pro dan kontra itu selalu ada. Hambatannya pertama pengertian masyarakat itu sendiri, misalnya masyarakat disini identik program itu bantuan, bantuan itu pasti ada uangnya ya itulah. Tapi kami sebagai anggota kelompok memberi pengertian memang betul ada uangnya, cuma ini bukan hanya untuk dimakan sendiri tapi ada keberlanjutan nantinya yang menguntungkan semua, ya walau memang ada yang diberi upah tapi diberikan kepada siapa yang bekerja.”

Berdasarkan wawancara diatas dengan I₁₋₆ diketahui bahwa proses pelaksanaan kegiatan dilakukan setelah pembentukan KMP, KMP ini mengusulkan Rencana Kegiatan Kelompok (RKK) kepada Dinas Kelautan dan Perikanan, selanjutnya dilakukan survei oleh pihak DKP untuk melakukan verifikasi sebelum dana dicairkan. Hambatan yang dialami yaitu pemahaman masyarakat yang menganggap program ini dapat memberikan kepentingan

pribadi. Hal serupa diungkapkan oleh Ketua KMP Pangkalan Baru Desa Ujung Jaya :

“Proses pelaksanaannya masyarakat antusias sekali dalam mengerjakan program, partisipasi dalam pembangunan jalan walau itu punya pangkalan maju tapi saling membantu, ada yang berbentuk ngasih konsumsi selama pekerjaan, banyak juga masyarakat yang berpikiran negatif ada pikirnya saya dapat keuntungan. Awalnya kenapa dipilih wisata kesini, sering banyak yang datang ke pulau handeuleum pulau peucang jadi saya tertarik perahu wisata, dan banyak wisata mancing, dari dinas juga suka kesini mancing. Hambatannya orangnya kadang program datang gak ada pada kelaut, pada punya kesibukannya masing-masing”

Berdasarkan wawancara diatas dengan I_{1.7} diketahui bahwa dalam proses pelaksanaan masyarakat ikut membantu, dan dari anggota KMP pun membantu KMP lain dalam pelaksanaan, dipilihnya perahu wisata dikarenakan banyaknya wisatawan yang datang ke pulau handeuleum. Hambatan yang dialami adalah masih banyak masyarakat yang menaruh curiga bahwa anggota KMP mendapatkan keuntungan dari program ini. Selain itu kesibukan anggota KMP dalam kegiatan menghambat proses pelaksanaan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti ditemukan beberapa temuan lapangan sebagai berikut :

Tabel 4.3 Temuan Lapangan Partisipasi dalam Pelaksanaan

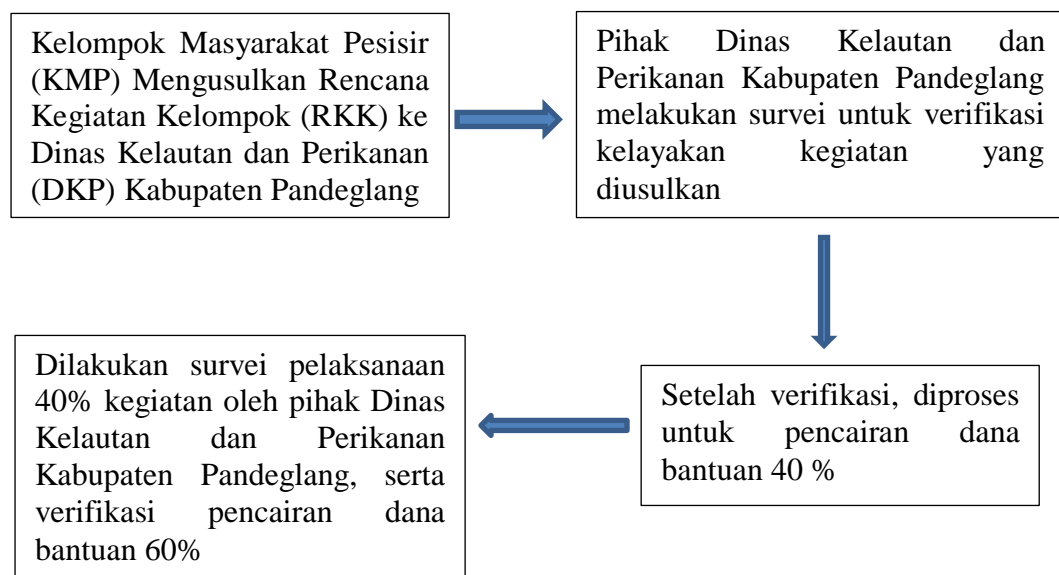
NO.	INDIKATOR	TEMUAN LAPANGAN
2.	Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat Desa Cigorondong, Desa Tamanjaya, dan Desa Ujungjaya ikut serta dalam proses pelaksanaan 2. Desa Cigorondong dalam kegiatan bina tanggap bencana yaitu penanaman mangrove mengalami kegagalan dikarenakan tempat menanam yang tidak baik serta banyaknya lahan yang sudah alih fungsi menjadi tambak udang

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Desa Cigorondong berkeinginan mengembangkan depot air sebagai minum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) namun terhambat dengan pengujian kelayakan air minum 4. Masyarakat Desa Tamanjaya kesulitan dalam membuat laporan serta pembuatan arsip dikarenakan rendahnya kemampuan anggota Kelompok Masyarakat Pesisir (KMP) dalam tertib administrasi 5. Cuaca yang tidak menentu salah satu hambatan Desa Tamanjaya dalam kegiatan bina infrastruktur 6. Masyarakat Desa Ujungjaya masih berpikir akan mendapatkan keuntungan pribadi dari partisipasi berupa tenaga yang mereka berikan 7. Kesibukan anggota Kelompok Masyarakat Pesisir (KMP) Desa Ujungjaya menjadi penghambat proses pelaksanaan kegiatan
--	--	---

Sumber : Peneliti hasil observasi, 2017

Dapat disimpulkan bahwa dalam partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan kegiatan Program Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh diawali dengan sosialisasi oleh pihak Dinas Kelautan dan Perikanan dan pihak Kementerian Kelautan, lalu dibentuklah Kelompok Masyarakat Pesisir (KMP). KMP ini merupakan penanggungjawab proses kegiatan dilapangan. Setelah terbentuk KMP diusulkan Rencana Kegiatan Kelompok ke Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), selanjutnya pihak DKP melakukan survei untuk verifikasi kelayakan kegiatan yang diusulkan. Kemudian setelah dianggap layak usulan diproses untuk pencairan dana. Dalam pelaksanaan kegiatan tidak hanya anggota KMP saja yang terlibat melainkan masyarakat pun ikut membantu, umumnya bantuan mereka berupa tenaga dan konsumsi saat proses kegiatan berlangsung. Namun beberapa hambatan yang dialami antara lain yaitu, masih banyak

masyarakat yang berpikir akan mendapat keuntungan pribadi dari bantuan yang mereka berikan, sulitnya akses membuat terhambatnya proses pengerjaan, faktor cuaca yang tidak menentu, rendahnya kesadaran masyarakat akan pemahaman program ini merupakan program swadaya, rendahnya kemampuan masyarakat dalam tertib administrasi, dan kesibukan masing – masing anggota yang menghambat proses kegiatan.



Gambar 4.4 Proses Pelaksanaan dalam Program Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh di Desa Cigorondong, Desa Tamanjaya dan Desa Ujung jaya



Gambar 4.5 Survei dan pengukuran jalan desa Ujung Jaya



Gambar 4.6 Survei lokasi sarana air bersih (SAB) Desa Cigorondong

4.3.3 Partisipasi Dalam Pengawasan

Partisipasi dalam pengawasan merupakan aktifitas untuk menemukan mengkoreksi penyimpangan-penyimpangan terhadap aktifitas yang telah direncanakan dalam rangka menyesuaikan dengan kepentingan masyarakat maka pengawasan dalam partisipasi tidak cukup dilakukan dalam lembaga formal saja, tetapi oleh organisasi masyarakat, golongan kepentingan, kelompok profesi, bahkan anggota masyarakat untuk serta mengawasi.

Partisipasi dalam pengawasan ini dibutuhkan peran aktif masyarakat yang tanggap akan permasalahan yang dialami dilingkungan sekitar, serta diperlukan prosedur pengawasan yang baik agar keluhan serta saran dari masyarakat dapat ditampung dengan baik dan dikemudian hari dijadikan evaluasi program agar nantinya program tersebut dapat menjadi lebih baik. Pengawasan oleh masyarakat diharapkan dapat mengawasi proses kegiatan Program Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh agar dapat berjalan dengan baik serta terhindar dari kecurangan dari oknum yang tidak bertanggung jawab.

Seperti yang diungkapkan oleh staf Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pandeglang yang menyatakan :

“untuk pengawasan semua bertanggung jawab ikut mengawasi program ini, khususnya perangkat desa dan masyarakat kan mereka yang setiap hari melihat bagaimana jalannya kegiatan disana, kami juga dari pihak DKP sudah melakukan pengawasan dari mulai dipilihnya 3 desa ini sebagai kawasan pesisir, kita mengadakan survei kesana layak gak kawasan ini dapat bantuan, terus saat mereka mengajukan usulan program kita sesuaikan wajar tidak dana yang diusulkan itu juga sebagian dari tugas kami pihak DKP dalam mengawasi program”

Berdasarkan wawancara diatas dengan I₁₋₁ diketahui bahwa pengawasan harus dilakukan oleh masyarakat sebagai penerima program, selain itu dari pihak Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan pengawasan seperti survei lokasi, penerimaan laporan untuk dianalisis anggaran biayanya. Hal serupa diungkapkan oleh Tenaga Ahli Pendamping Desa Cigorondong :

“Ya semuanya ikut mengawasi, dari kementerian, DKP provinsi, DKP kabupaten, KMP. Dari kementerian turun waktu verifikasi. Masyarakat juga ikut mengawasi apalagi dari LSM itu yang nanya-nanya dana”

Berdasarkan wawancara diatas dengan I₁₋₂ diketahui bahwa pengawasan dapat dilakukan oleh pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pandeglang, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, dan Kementerian Kelautan. Masyarakat ikut mengawasi, selain itu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ikut mengkritisi hal terkait dana.

“Yang bertanggung jawab mengawasi pertama kami sebagai kepengurusan kelompok, kedua masyarakat sekitar, ketiga pihak desa dan pemerintah. Karena setelah kami kerjakan program tersebut bukan hanya milik kami sendiri tapi milik masyarakat semua. Dari pihak dinas pun biasanya ada kontrol”

Berdasarkan wawancara diatas dengan I₁₋₃ diketahui bahwa yang bertanggung jawab melakukan pengawasan adalah KMP, masyarakat sekitar, dan perangkat desa. Karena program ini merupakan program bersama. Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan pengawasan berupa survei pada proses kegiatan.

“Prosedur pengawasan kita libatkan dalam semua masyarakat, karena dalam struktur KMP itu ada namanya pelaksana, ada pengawas, dan perencana dari 10 orang itu, selain dari masyarakat ada kontrol setiap progres pekerjaan itu dari dinas kelautan, setiap progres kegiatan yang kita laporkan langsung dikontrol, karena proses pencairan dananya pun dibagi dua tahap pencairan, masyarakat sendiri dari awal perencanaan dan pelaksanaan kita meminta agar saling mengawasi, terutama diproses pelaksanaan kegiatan, minimal kualitas bisa dipertahankan, selain itu juga

perangkat desa berkewajiban ikut mengawasi, seperti BPD LPM jadi jangan sampai pekerjaan selesai udah aja gitu gak ada tanggung jawab.”

Berdasarkan wawancara diatas dengan I₁₋₄ diketahui bahwa prosedur pengawasan diibatkan seluruh masyarakat dan KMP itu sendiri, dari 10 orang anggota terdapat 3 anggota yang menjalankan fungsi pengawasan. Selain itu terdapat kontrol yang dilakukan oleh pihak Dinas Kelautan dan Perikanan disetiap progress kegiatan. Perangkat desa seperti BPD LPM juga ikut mengawasi. Hal serupa diungkapkan oleh ketua – ketua KMP.

Ketua KMP Mitra Jaya mengatakan :

“Yang paling bertanggung jawab kepala desa dan perangkat desa itu yang wajib mengawasi selain itu juga dari tingkat kabupaten juga, ya sifatnya kalo berbicara pengawasan itu bahasa umum ya, semua masyarakat disini juga harus ikut mengawasi jadi masyarakat bisa mengawasi kami sebagai KMP.”

Ketua KMP Harapan Jaya mengatakan :

“masyarakat boleh dengan bebas mengawasi kegiatan yang kami kerjakan, sekiranya dianggap tidak sesuai apa yang diharapkan, cuma diharapkan kritik yang membangun bukan yang menjatuhkan karena memiliki maksud, selain itu perangkat desa, pihak DKP juga harus mengawasi”

Ketua KMP Pangkalan Baru mengatakan :

“Pengawasan pertama ya pengurus, ketua bendahara sekretaris juga anggota, semua juga harus bertanggung jawab masyarakat juga. Kadang ada aja masyarakat luar yang bilang jalan kurang lebar lah, yang pengennya masyarakat jalannya yg bisa lebar masuk mobil”

Dari hasil wawancara dengan ketua KMP diketahui bahwa masyarakat dapat melakukan pengawasan berupa saran apabila proses kegiatan yang dilakukan KMP tidak sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Selain itu

perangkat desa dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pandeglang melakukan pengawasan dan memonitoring kegiatan yang dilakukan.

Selanjutnya dari pihak perangkat desa menuturkan peran masyarakat dalam pengawasan proses pelaksanaan kegiatan program PKPT, diantara lain sebagai berikut :

Bapak Agus Aspuri selaku kaur keuangan Desa Cigorondong mengatakan:

“kami dari pihak desa ikut mengawasi program, jadi KMP ini selalu berkomunikasi dengan pihak desa terkait hambatan dilapangan, sebisa mungkin kita membantu mencarikan solusi yang nantinya akan diterima oleh masyarakat lainnya, selain dari pihak desa, pengawasan juga dilakukan oleh DKP mereka kesini buat kontrol”

Bapak Sarju Wahyudin Kepala Desa Tamanjaya mengatakan :

“Yang mengawasi ya kami dari desa saya selaku kepa desa itu lebih dominan terutama ya intinya masyarakat dan lembaga-lembaga terkait. Dalam pengawasan alhamdulillah semua ikut mengawasi dan bertanggung jawab. Karena kan kita sifatnya manusia kesalahan dan kekurangan pasti ada aja siapa tau kegiatan tersebut uangnya habis tapi kegiatan gak selesai kan kita jadi khawatir kendala juga buat kedepannya.”

Bapak Sumardi Ketua LPM Desa Ujung Jaya mengatakan :

“kalau masalah mengawasi ya kita semua sebagai perangkat desa ikut mengawasi kegiatan yang dilakukan KMP, kalau sekiranya dianggap salah kami bermusyawarah menyampaikannya”

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti ditemukan beberapa temuan lapangan sebagai berikut :\

Tabel 4.4 Temuan Lapangan Partisipasi dalam Pengawasan

NO.	INDIKATOR	TEMUAN LAPANGAN
3.	Pengawasan	1. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pandeglang diawali dengan survei lokasi kelayakan desa dalam kriteria

		penerima bantuan 2. Pengawasan di Desa Cigorondong, Desa Tamanjaya dan Desa Ujungjaya dilakukan oleh seluruh masyarakat 3. Desa Cigorondong juga diawasi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 4. Desa Ujungjaya dalam Kelompok Masyarakat Pesisir (KMP) terdapat tiga orang anggota yang menjalankan fungsi pengawasan 5. Pengawasan dilakukan oleh perangkat desa, pihak Dinas Kelautan dan Perikanan dan pihak Kementerian
--	--	---

Sumber : Peneliti hasil wawancara, 2017

Dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengawasan program PKPT sudah cukup baik. Adanya pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dan ditampung oleh pihak desa dan dimusyawarahkan dengan KMP. Selain itu pengawasan juga dilakukan oleh pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pandeglang.

4.3.4 Partisipasi Dalam Pemeliharaan dan Pemanfaatan

Partisipasi dalam pemeliharaan dan pemanfaatan meliputi: menerima hasil pembangunan seolah-olah milik sendiri, menggunakan atau memanfaatkan setiap hasil pembangunan, menjadikan atau mengusahakan suatu lapangan usaha, merawat secara rutin dan sistematis, mengatur kegunaan dan memanfaatkannya, mengusahakan dan mengamankannya serta mengembangkannya. Partisipasi dalam pemeliharaan dan pemanfaatan berarti mendukung kearah pembangunan

yang serasi dengan martabat manusia keadilan sosial dan memelihara alam sebagai lingkungan manusia untuk generasi yang akan datang.

Program Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh, pada prinsipnya muatan PKPT lebih menekankan pada kegiatan penguatan kapasitas kelembagaan. Pembangunan lingkungan dan infrastruktur, sumberdaya serta kemandirian ekonomi, yang diharapkan dapat mampu meningkatkan ketangguhan dengan meminimalisir dampak daerah yang rentan terkena kerugian akibat bencana dan perubahan iklim di Kawasan-kawasan pesisir.

Program Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT) adalah kegiatan pembangunan wilayah kawasan pesisir berbasis pemberdayaan masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan kesiapan terhadap bencana dan perubahan iklim. Pengembangan kawasan pesisir tangguh dalam pelaksanaannya memberikan bantuan pengembangan manusia, sumberdaya, infrastruktur/lingkungan, usaha, dan siaga bencana dan perubahan iklim. Hal tersebut disampaikan oleh staf Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pandeglang mengatakan :

“banyak manfaat yang dirasakan oleh masyarakat yang tadinya sulit akses kesana jadi mudah, jadi membantu perekonomian mereka juga, kalau sarana air bersih kan larinya ke kesehatan, masyarakat jadi tambah sehat juga. Kalau pihak dinas kesana tuh masyarakat inginnya bantuan seperti ini terus berlanjut kalau bisa ditambah dananya. Untuk pemeliharaan dilakukan oleh KMP sebagai penanggung jawab. Belum tercapai 5 bina, baru bina ekonomi, semua bina sudah tercapai hanya bina siaga bencana yang belum karena kan penanaman mangrove rusak”

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa, banyak manfaat yang dirasakan oleh masyarakat, seperti mudahnya mobilitas dikarenakan akses

jalan yang baik, membantu perekonomian, serta meningkatkan kualitas kesehatan.

Dari 5 bina yang merupakan tujuan PKPT baru terlaksana 4 bina.

Tenaga Ahli Pendamping Desa Cigorondong mengungkapkan :

“pengennya berlanjut gitu kaya usaha air minum, kadang masyarakat itu pengennya kaya makan cabe pengen langsung manfaatnya ada. Maunya langsung ada manfaatnya berupa uang. Dana nya kecil jadi awalnya mau buat belum tercapai 5 bina, terus kan disini ada bina manusia ya, menurut saya peranan perempuan tidak diikutsertakan padahal kaau ibu –ibu dilatih keterampilan gitu kan nantinya akan menghasilkan uang ngenbantu kan ke keluarganya. Pemeliharanya itu kan kelompok nih buat rumah isi ulang, terus katanya kan sekarang berkembang jadi lebih maju, harusnya pembukuannya itu jelas agar nantinya bisa jadi BUMDes, siapa tau kan nanti bisa berkembang. Habis itu mereka mau laporan ke siapa hasil penjualan dan semuanya itu.”

Tenaga Ahli Pendamping Desa Tamanjaya mengungkapkan :

“Manfaat yang dirasakan banyak neng, kalo untuk jalan tadinya jalan itu becek pas ada kegiatan ini jadi lancar tadinya mau kesana kesini susah sekarang enak, jadi mempermudah akses. Kami baru melaksanakan 3 bina, usaha, siaga bencana, karena kegiatannya ini anggrannya kecil ya, jadi dengan 1 kegiatan kita gak bisa memenuhi aturan 5 bina itu tersebut. Yang penting target sekian tahun beres terus kita juga lakukan mekanisme yang ada. Kalau memelihara kalo disini kan ada kontribusi kaya pengadaan air minum ada presentasinya buat pemeliharaan uangnya ada dari situ, tapi tetep masyarakat berpartisipasi untuk kalo disini gotong royong masih ada mbak, jadi misalnya ada pendangkalan saluran air gotong royong masyarakat, kalo dikota.”

Tenaga Ahli Pendamping Desa Ujung Jaya mengungkapkan :

“Manfaatnya yang jelas, mobilitas masyarakat jadi lancar tadinya kan jalannya ancur, nanti bisa dilihat, itu satu-satunya jalan yang digunakan, sedangkan di kampung pangkalan itu ada sumber ikan jadi penghasil ikan dari nelayan ujung jaya itu ada di kampung pangkalan, orang yang mau beli ikan, lelang ikan dan sebagainya dulu kerepotan sekali drngan kondisi jalan tersebut, tapi sekarang alhamdulillah jadi lancar. Ditahun ketiga ini awalnya kita ingin mengadakan fasilitas lelang ikan, kedua diwilayah pangkalan kita mau buat sandaran perahu, fasilitas dengan

jaring dan peralatan melaut lainnya, fokus di bina usaha 2017 kalau ini berjalan, bina sarana dan prasarana, bisa usaha, dan bina siaga bencana, baru tiga yang terwujud, siaga bencana kita ada penanaman mangrove. Yang sudah berjalan, perahu wisata ini kalau tidak ada yang menggunakan sebagai perahu wisata digunakan untuk fasilitas nelayan, kemudian hasilnya bisa dibagi, nanti ada sewa perahu, sejauh ini masyarakat masih memelihara apa yang didapat dari program tersebut.

Berdasarkan wawancara diatas diketahui bahwa banyak manfaat yang didapatkan oleh masyarakat dalam program ini diantaranya, mudahnya akses jalan, perbaikan sarana dan prasarana, membantu perekonomian. Banyak masyarakat yang mengharapkan program bina usaha lebih diperbanyak, sedangkan tujuan utama program ini adalah penguatan kelembagaan, memperbaiki infrastruktur, tanggap terhadap bencana, dan bukan membantu perekonomian saja. Belum tercapai 5 bina dikarenakan dana yang tidak memadai. Peranan perempuan nyaris tidak terlihat. Untuk proses pemeliharaan dilakukan oleh KMP, yang didapat dari hasil pengelolaan depot air minum. Tetapi tidak ada keterbukaan mengenai pembukuan hasil penjualan air minum.

Terkait pemanfaatan dan pemeliharaan hasil, ketua KMP Mitra Jaya mengungkapkan :

“Manfaatnya ya banyak yang dulu kalo mandi ke sungai sekarang bisa di alirkan kedapur, dulunya buat minum susah cari air bersih sekarang kan enak udah tinggal beli dengan harga yang murah, jadi akses enak mudah, dengan adanya SAB ini bisa memperbaiki kesehatan masyarakat sekitar. Kaya misalnya SAB itu dialirkan tapi di endapkan dulu di bak penampung, jadi sampai masyarakat sudah bersih, kalo depot air kan emang disini tidak ada yang buka usaha air minum jadi laris, sekarang masyarakat udah pada modern jarang masak air tinggal isi ulang aja. Ditahun 2015 kita fokus ke bida infastruktur sarana prasarana nelayan sama penanaman mangrove cuma di penanaman mangrove kita gagal soalnya nanam di arus kencang udah hanyut semua, sama perahu wisata. Pemeliharaan kita udah bentuk seksi pemeliharaan jadi kita alokasi dari uang kas itu misal masyarakat ada pemasangan air bersih kerumah itu masyarakat bayar semampunya sesuai hasil musyawarah, kaitannya

denga warung kita optimalkan di manajemen tata usahanya contohnya penghasilan perhari berapa kita evaluasi pertiga bulanan sekali supaya warung ini jangan bangkrut.”

Ketua KMP Harapan Jaya Desa Tamanjaya mengungkapkan :

“Manfaat yang dirasakan masyarakat sudah tentu banyak, jalan jadi bagus, saluran air jadi baik, kalo pemeliharaan kita lakukan bersama masyarakat. Dari hasil usaha misalnya tiap 3 bulan kita kemukakan hasilnya berapa, hasil itu dibagi tiga pertama untuk kepengurusan, kan dikelompok itu ada bagian yang full dipercaya mengurus, dan ada yang hanya ikut mengawasi, dan untuk pengembangannya.”

Ketua KMP Pangkalan Baru Desa Ujung Jaya mengungkapkan :

“Manfaat yang didapatkan yang awalnya nganggur dapat kegiatan khususnya nelayan ya, jalan bisa tadinya becek jadi sekarang bagus lancar, air bersih yang tadinya susah sekarang ada, depot air minum 5000, tapi ya kadang ada masyarakat yang Cuma bayar 3000 atau semampunya kita gak bisa neken mereka asal ada buat biaya perawatan aja dulu, tp terus terang aja sekarang airnya lagi gak jalan karena sering tersumbat, airnya kecil jadi yaudah buat masyarakat aja dulu kalo depot kan masuknya keuntungan kelompok kan. Kalau udah normal lagi yaudah. Bina kurang tau ya. Masyarakat menjaga memelihara jalan yang udah dibangun, jadi contoh ada mobil yang angkut pasir kan diportal jadi dikenakan 2000 rupiah buat pemeliharaan jalan, jadi kaya kemaren kurang untuk pasir dari situ dana nya.”

Berdasarkan wawancara dengan ketua KMP diketahui bahwa manfaat yang dirasakan masyarakat, antara lain perbaikan infrastruktur, mudahnya akses air bersih, peningkatan ekonomi. Akan tetapi banyak kegiatan yang kurang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang terhambat ataupun gagal. Desa Ujung Jaya depot air minum sedang tidak berjalan dikarenakan sedang mengalami kekeringan, Desa Cigorondong penanaman mangrove rusak dikarenakan ketidaktahuan masyarakat untuk menanam yang benar. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait 5 bina, bina tanggap bencana yang menjadi tujuan program PKPT ini malah terabaikan karena masyarakat fokus kepada bina usaha. Dalam

proses pemeliharaan dilakukan dengan cara membentuk tim pemeliharaan, dari hasil penjualan depot, sewa kapal, ataupun pengaliran air bersih kerumah dijadikan sebagai biaya pemeliharaan.

Tabel 4.5 Temuan Lapangan dalam Pemeliharaan dan Pemanfaatan Hasil

NO.	INDIKATOR	TEMUAN LAPANGAN
1.	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Hasil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat dapat merasakan banyak manfaat dari program PKPT, tetapi banyak juga kegiatan kurang memberikan manfaat seperti penanaman mangrove yang rusak (Desa Cigorondong) dan depot air minum yang sudah sebulan tutup (Desa Ujung Jaya) 2. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai 5 bina 3. Program tanggap bencana yang menjadi tujuan program PKPT ini malah terabaikan 4. Desa Cigorondong dalam pemeliharaan hanya dilakukan oleh Kelompok Masyarakat Pesisir (KMP) dengan memanfaatkan biaya dari hasil penjualan depot air minum, penyaluran air bersih, dan penyewaan perahu wisata.

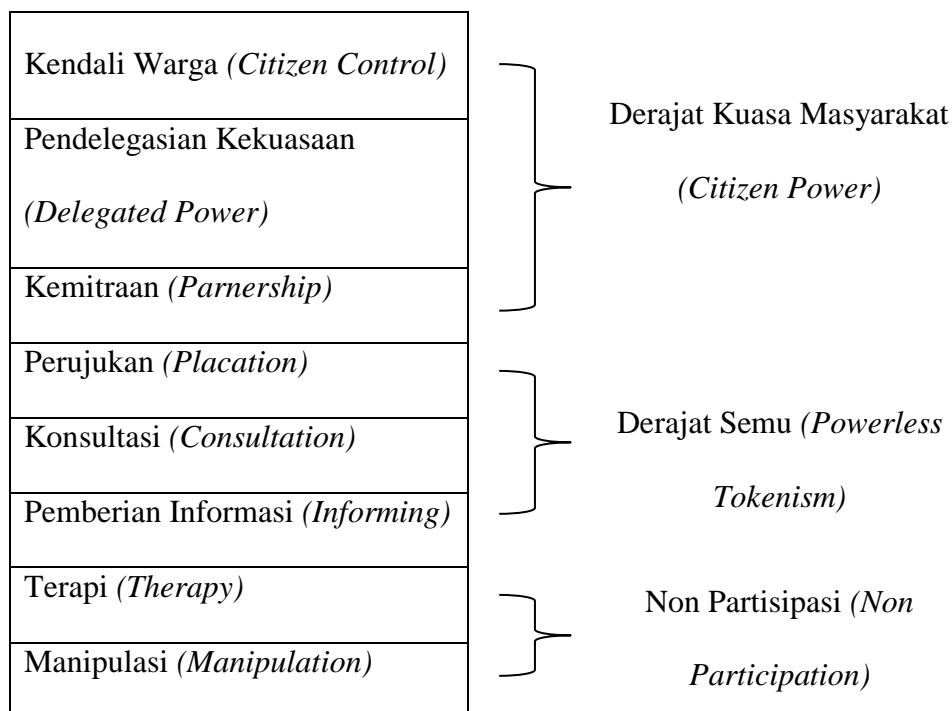
Sumber : Peneliti dari hasil wawancara, 2017

Dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan dan pemeliharaan hasil dari program PKPT ini banyak manfaat yang dirasakan oleh masyarakat, seperti mudahnya mobilitas dikarenakan akses jalan yang baik, membantu perekonomian, serta meningkatkan kualitas kesehatan. Banyak masyarakat yang mengharapkan program bina usaha lebih diperbanyak, sedangkan tujuan utama program ini adalah penguatan kelembagaan, memperbaiki infrastruktur, tanggap terhadap bencana, dan bukan membantu perekonomian saja. Selain itu, banyak kegiatan yang kurang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang terhambat ataupun gagal. Desa Ujung Jaya depot air minum sedang tidak berjalan dikarenakan sedang mengalami

kekeringan, Desa Cigorondong penanaman mangrove rusak dikarenakan ketidaktahuan masyarakat untuk menanam yang benar. Belum tercapai 5 bina dikarenakan dana yang tidak memadai. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait 5 bina, bina tanggap bencana yang menjadi tujuan program PKPT ini malah terabaikan karena masyarakat fokus kepada bina usaha. Dalam proses pemeliharaan dilakukan dengan cara membentuk tim pemeliharaan, dari hasil penjualan depot, sewa kapal, ataupun pengaliran air bersih kerumah dijadikan sebagai biaya pemeliharaan hanya anggota KMP yang bertanggung jawab atas pemeliharaan hasil program.

4.3.5 Derajat Partisipasi Masyarakat

Terdapat derajat/tingkatan yang berbeda dalam setiap praktek partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat. Untuk menilai partisipasi masyarakat, penelitian ini juga menggunakan konsep delapan tangga partisipasi masyarakat (*Eight Rungs on Ladder of Citizen Participation*) menurut teori Sherry Arnstein (1971) dalam Rizqina (2010) . Dalam konsepnya, Arnstein menjelaskan partisipasi masyarakat yang didasarkan kepada kekuatan masyarakat untuk menentukan suatu produk akhir, tiap tangga dibedakan berdasarkan “*Corresponding to the extent of citizen’s power in determining the plan and/or program*”. Secara umum dalam model ini ada tiga derajat partisipasi masyarakat :



Sumber : Arnstein "Ladder of Participation" dalam Rizqina, 2010 Hal. 23

4.4 Temuan Lapangan

Tabel 4.6 Rekapitulasi Temuan Lapangan

NO	INDIKATOR	TEMUAN LAPANGAN	TINGKAT PARTISIPASI
1.	Partisipasi dalam Perencanaan	Desa Cigorondong 1. Proses perencanaan diawali dengan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pandeglang 2. Proses perencanaan di Desa Cigorondong, seluruhnya melibatkan seluruh masyarakat melalui musyawarah 3. Dalam membuat Rencana Kerja Kelompok (RKK) Desa Cigorondong, mengacu kepada Rencana Pemangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) jadi program	Perujukan (<i>Placation</i>)

	<p>yang dipilih sesuai dengan kebutuhan masyarakat</p> <p>4. Desa Cigorondong dalam pembentukan kelompok diambil dari masing – masing dusun, namun dipilih orang – orang yang aktif di balai desa</p>	
	<p>Desa Tamanjaya</p> <p>1. Proses perencanaan diawali dengan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pandeglang</p> <p>2. Proses perencanaan di Desa Tamanjaya, seluruhnya melibatkan seluruh masyarakat melalui musyawarah</p> <p>3. Dalam membuat Rencana Kerja Kelompok (RKK) Desa Tamanjaya, mengacu kepada Rencana Pemangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) jadi program yang dipilih sesuai dengan kebutuhan masyarakat</p> <p>4. Desa Tamanjaya dalam pembentukan kelompok diambil dari masing – masing kampung agar tidak terjadi kecemburuan sosial</p>	<p>Perujukan (<i>Placation</i>)</p>
	<p>Desa Ujung Jaya</p> <p>1. Proses perencanaan diawali dengan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pandeglang</p> <p>2. Proses perencanaan di Desa Ujung Jaya, seluruhnya melibatkan seluruh masyarakat melalui musyawarah</p> <p>3. Dalam membuat Rencana Kerja Kelompok (RKK) Desa Ujung Jaya, mengacu kepada Rencana Pemangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) jadi program yang dipilih sesuai dengan kebutuhan masyarakat</p> <p>4. Desa Ujung Jaya dalam pembentukan Kelompok Masyarakat Pesisir (KMP) terdapat penolakan dari beberapa masyarakat untuk menjadi anggota dikarenakan tidak siap akan pertanggung jawaban kegiatan.</p>	<p>Konsultasi (<i>Consultation</i>)</p>

2.	Partisipasi dalam Pelaksanaan	Desa Cigorondong <ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat desa Cigorondong ikut serta dalam proses pelaksanaan 2. Desa Cigorondong dalam kegiatan bina tanggap bencana yaitu penanaman mangrove mengalami kegagalan dikarenakan lokasi penanaman yang kurang baik serta banyaknya lahan yang sudah beralih fungsi menjadi tambak udang 3. Desa Cigorondong berkeinginan mengembangkan usaha depot air minum menjadi BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) namun terhambat dengan uji kelayakan air minum 	Perujukan (<i>Placation</i>)
		Desa Tamanjaya <ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat desa Tamanjaya ikut serta dalam proses pelaksanaan 2. Masyarakat desa Tamanjaya kesulitan dalam membuat laporan serta pembuatan arsip dikarenakan rendahnya kemampuan anggota Kelompok masyarakat Pesisir (KMP) dalam tertib administrasi 3. Cuaca yang tidak menentu menjadi salah satu hambatan dalam kegiatan bina infrastruktur 	Konsultasi (<i>Consultation</i>)
		Desa Ujung Jaya <ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat desa Ujung jaya ikut serta dalam proses pelaksanaan 2. Masyarakat desa Ujung Jaya masih berpikir akan mendapatkan keuntungan pribadi dari partisipasi berupa tenaga yang mereka berikan 3. Kesibukan anggota Kelompok Masyarakat Pesisir (KMP) desa Ujung Jaya menjadi penghambat proses pelaksanaan kegiatan 	Konsultasi (<i>Consultation</i>)
3.	Partisipasi dalam Pengawasan	Desa Cigorondong <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pandeglang diawali dengan survei lokasi 	Perujukan (<i>Placation</i>)

		<p>kelayakan desa dalam kriteria penerima bantuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pengawasan di Desa Cigorondong, Desa Tamanjaya dan Desa Ujungjaya dilakukan oleh seluruh masyarakat 3. Desa Cigorondong juga diawasi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 	
		<p>Desa Tamanjaya</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pandeglang diawali dengan survei lokasi kelayakan desa dalam kriteria penerima bantuan 2. Pengawasan dilakukan oleh masyarakat dengan diwadahi oleh perangkat desa 	Perujukan (<i>Placation</i>)
		<p>Desa Ujung Jaya</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pandeglang diawali dengan survei lokasi kelayakan desa dalam kriteria penerima bantuan 2. Pengawasan di Desa Ujungjaya dilakukan oleh seluruh masyarakat 3. Desa Ujungjaya dalam Kelompok Masyarakat Pesisir (KMP) terdapat tiga orang anggota yang menjalankan fungsi pengawasan 	Perujukan (<i>Placation</i>)
4.	Partisipasi dalam Pemanfaatan dan Pemeliharaan Hasil	<p>Desa Cigorondong</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat dapat merasakan banyak manfaat dari program Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh, tetapi banyak juga kegiatan kurang memberikan manfaat seperti penanaman mangrove yang rusak 2. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai 5 bina 3. Program tanggap bencana yang menjadi tujuan program PKPT ini malah terabaikan 4. Desa Cigorondong dalam pemeliharaan hanya dilakukan oleh Kelompok Masyarakat Pesisir (KMP) dengan memanfaatkan biaya dari hasil penjualan depot air minum, penyaluran air bersih, dan 	Konsultasi (<i>Consultation</i>)

	penyewaan perahu wisata.	
	Desa Tamanjaya 1. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai 5 bina membuat program yang dibuat berfokus hanya untuk perbaikan infrastruktur 2. Program tanggap bencana yang menjadi tujuan program PKPT ini malah terabaikan 3. Pemeliharaan dilakukan oleh Kelompok Masyarakat Pesisir (KMP)	Konsultasi (<i>Consultation</i>)
	Desa Ujung Jaya 1. Depot air minum yang sudah sebulan tutup mengakitbatkan hasil dari program kurang bermanfaat bagi masyarakat 2. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai 5 bina 3. Desa Ujung Jaya dalam pemeliharaan hanya dilakukan oleh Kelompok Masyarakat Pesisir (KMP) dan bantuan swadaya dari masyarakat sekitar	Konsultasi (<i>Consultation</i>)

Sumber : Peneliti dari hasil wawancara, 2017

Partisipasi dalam perencanaan Program Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh ini diawali dengan musyawarah untuk melakukan pembentukan kelompok. Selanjutnya kelompok buat akta notaris agar jelas legalitasnya. Dalam pembentukan kelompok umumnya diambil disetiap kampung dimasing – masing desa, agar tidak terjadi kecemburuan sosial. Namun masih ada masyarakat yang enggan menjadi pengurus atau anggota kelompok dikarenakan beban tanggung jawab yang diberikan. Pembuatan Rencana Kegiatan Kelompok (RKK), mengacu pada Rencana Pengembangan Kawasan Pesisir (RPKP) lima tahun, dan melakukan review RPJMDes didampingi oleh perangkat desa dan masyarakat yang aktif.

Partisipasi dalam perencanaan Program Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh di desa Cigorondong proses perencanaan diawali dengan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pandeglang. Proses perencanaan di Desa Cigorondong, seluruhnya melibatkan seluruh masyarakat melalui musyawarah. Dalam membuat Rencana Kerja Kelompok (RKK) Desa Cigorondong, mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) jadi program yang dipilih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Desa Cigorondong dalam pembentukan kelompok diambil dari masing – masing dusun, namun dipilih orang – orang yang aktif di balai desa. Dari semua proses perencanaan di desa Cigorondong, partisipasi masyarakat masuk kedalam tangga kelima yaitu, Perujukan (*Placation*), karena komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah sudah berjalan dengan baik, masyarakat dimungkinkan untuk membentuk kelompok sendiri serta mengusulkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, walaupun hasil akhirnya pemerintah yang menentukan layak atau tidaknya program yang diusulkan oleh masyarakat melalui survei dan verifikasi.

Partisipasi dalam perencanaan Program Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh di desa Tamanjaya proses perencanaan diawali dengan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pandeglang. Proses perencanaan di Desa Tamanjaya, seluruhnya melibatkan seluruh masyarakat melalui musyawarah. Dalam membuat Rencana Kerja Kelompok (RKK) Desa Tamanjaya, mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) jadi program yang dipilih sesuai dengan kebutuhan

masyarakat. Desa Tamanjaya dalam pembentukan kelompok diambil dari masing – masing kampung agar tidak terjadi kecemburuan sosial. Dari semua proses perencanaan di desa Cigorondong, partisipasi masyarakat masuk kedalam tangga kelima yaitu, Perujukan (*Placation*), karena komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah sudah berjalan dengan baik, pembuatan Rencana Kerja Kelompok (RKK) mengacu pada RPJMDes sehingga program yang dipilih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Keanggotaan Kelompok Masyarakat Pesisir (KMP) juga diambil dari masing-masing kampung sehingga dapat memberikan masukan lebih signifikan dalam pengambilan keputusan.

Partisipasi dalam perencanaan Program Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh di desa Ujung Jaya, proses perencanaan diawali dengan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pandeglang. Proses perencanaan di Desa Ujung Jaya, seluruhnya melibatkan seluruh masyarakat melalui musyawarah. Dalam membuat Rencana Kerja Kelompok (RKK) Desa Ujung Jaya, mengacu kepada Rencana Pemangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) jadi program yang dipilih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Desa Ujung Jaya dalam pembentukan Kelompok Masyarakat Pesisir (KMP) terdapat penolakan dari beberapa masyarakat untuk menjadi anggota dikarenakan tidak siap akan pertanggung jawaban kegiatan. Dari semua proses perencanaan di desa Ujung Jaya, partisipasi masyarakat masuk kedalam tangga keempat yaitu, Konsultasi (*Consultation*), karena komunikasi sudah bersifat dua arah, ada kegiatan penjaringan aspirasi melalui musyawarah, namun masyarakat

masih enggan untuk berpartisipasi lebih aktif dalam mengikuti keanggotaan kelompok dikarenakan tidak siap akan pertanggung jawaban kegiatan.

Partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan kegiatan Program Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh diawali dengan sosialisasi oleh pihak Dinas Kelautan dan Perikanan dan pihak Kementerian Kelautan, lalu dibentuklah Kelompok Masyarakat Pesisir (KMP). KMP ini merupakan penanggungjawab proses kegiatan dilapangan. Setelah terbentuk KMP diusulkan Rencana Kegiatan Kelompok ke Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), selanjutnya pihak DKP melakukan survei untuk verifikasi kelayakan kegiatan yang diusulkan. Kemudian setelah dianggap layak usulan diproses untuk pencairan dana. Dalam pelaksanaan kegiatan tidak hanya anggota KMP saja yang terlibat melainkan masyarakat pun ikut membantu, umumnya bantuan mereka berupa tenaga dan konsumsi saat proses kegiatan berlangsung. Namun beberapa hambatan yang dialami antara lain yaitu, masih banyak masyarakat yang berpikir akan mendapat keuntungan pribadi dari bantuan yang mereka berikan, sulitnya akses membuat terhambatnya proses pengerjaan, faktor cuaca yang tidak menentu, rendahnya kesadaran masyarakat akan pemahaman program ini merupakan program swadaya, rendahnya kemampuan masyarakat dalam tertib administrasi, dan kesibukan masing – masing anggota yang menghambat proses kegiatan.

Partisipasi dalam pelaksanaan Program Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh di desa Cigorondong, masyarakat desa Cigorondong ikut serta dalam proses pelaksanaan. Desa Cigorondong dalam kegiatan bina tanggap bencana yaitu penanaman mangrove mengalami kegagalan dikarenakan lokasi penanaman

yang kurang baik serta banyaknya lahan yang sudah beralih fungsi menjadi tambak udang. Desa Cigorondong berkeinginan mengembangkan usaha depot air minum menjadi BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) namun terhambat dengan uji kelayakan air minum. Dari semua proses pelaksanaan di desa Cigorondong, partisipasi masyarakat masuk kedalam tangga kelima yaitu, Perujukan (*Placation*) karena, masyarakat melalui KMP sudah memberikan masukan – masukan yang signifikan dalam mengembangkan pelaksanaan kegiatan.

Partisipasi dalam pelaksanaan Program Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh di desa Tamanjaya, masyarakat desa Tamanjaya ikut serta dalam proses pelaksanaan. Masyarakat desa Tamanjaya kesulitan dalam membuat laporan serta pembuatan arsip dikarenakan rendahnya kemampuan anggota Kelompok masyarakat Pesisir (KMP) dalam tertib administrasi. Cuaca yang tidak menentu menjadi salah satu hambatan dalam kegiatan bina infrastruktur. Dari semua proses pelaksanaan di desa Tamanjaya, partisipasi masyarakat masuk kedalam tangga keempat yaitu, Konsultasi (*Consultation*) karena, partisipasi sudah terlihat bersifat dua arah, tetapi rendahnya kemampuan admistrasi anggota kelompok menghambat dalam pembuatan laporan yang merupakan hasil dari aspirasi masyarakat, sehingga kelompok kesulitan menuangkan masukan – masukan yang bermanfaat dalam dokumen resmi.

Partisipasi dalam pelaksanaan Program Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh di desa Ujung Jaya, masyarakat desa Ujung jaya ikut serta dalam proses pelaksanaan. Masyarakat desa Ujung Jaya masih berpikir akan mendapatkan keuntungan pribadi dari partisipasi berupa tenaga yang mereka berikan.

Kesibukan anggota Kelompok Masyarakat Pesisir (KMP) desa Ujung Jaya menjadi penghambat proses pelaksanaan kegiatan. Dari semua proses pelaksanaan di desa Ujung Jaya, partisipasi masyarakat masuk kedalam tangga keempat yaitu, Konsultasi (*Consultation*) karena, komunikasi masyarakat dan pemerintah sudah berjalan dengan baik, tetapi dalam pelaksanaan masyarakat masih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan bersama.

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan program PKPT sudah cukup baik. Adanya pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dan ditampung oleh pihak desa dan dimusyawarahkan dengan KMP. Selain itu pengawasan juga dilakukan oleh pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pandeglang.

Partisipasi dalam pengawasan Program Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh di desa Cigorondong dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pandeglang diawali dengan survei lokasi kelayakan desa dalam kriteria penerima bantuan. Pengawasan di Desa Cigorondong dilakukan oleh seluruh masyarakat. Desa Cigorondong juga diawasi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Partisipasi masyarakat masuk kedalam tangga kelima yaitu, Perujukan (*Placation*) karena, fungsi pengawasan sudah berjalan dengan baik antara pemerintah dan masyarakat, masyarakat ikut mengawasi proses pembangunan yang berjalan, selain itu pengawasan juga dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Partisipasi dalam pengawasan Program Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh di desa Tamanjaya dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pandeglang diawali dengan survei lokasi kelayakan desa dalam

kriteria penerima bantuan. Pengawasan dilakukan oleh masyarakat dengan diwadahi oleh perangkat desa. Partisipasi masyarakat masuk kedalam tangga kelima yaitu, Perujukan (*Placation*) karena fungsi pengawasan sudah berjalan antara pemerintah maupun masyarakat, pemerintah melakukan pengawasan dengan survei lokasi, masyarakat berpartisipasi dalam pengawasan dalam pembangunan diwadahi oleh perangkat desa.

Partisipasi dalam pengawasan Program Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh di desa Ujung diawali dengan dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pandeglang diawali dengan survei lokasi kelayakan desa dalam kriteria penerima bantuan. Pengawasan dilakukan oleh seluruh masyarakat. Desa Ujungjaya dalam Kelompok Masyarakat Pesisir (KMP) terdapat tiga orang anggota yang menjalankan fungsi pengawasan. Partisipasi masyarakat masuk kedalam tangga kelima yaitu, Perujukan (*Placation*) karena masyarakat sudah menjalankan fungsi pengawasan.

Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan dan pemeliharaan hasil dari program PKPT ini di ketiga desa yaitu desa Cigorondong, desa Tamanjaya dan Desa Ujung Jaya masuk kedalam tangga keempat yaitu, Konsultasi (*Consultation*) karena banyak manfaat yang dirasakan oleh masyarakat, seperti mudahnya mobilitas dikarenakan akses jalan yang baik, membantu perekonomian, serta meningkatkan kualitas kesehatan. Banyak masyarakat yang mengharapkan program bina usaha lebih diperbanyak, sedangkan tujuan utama program ini adalah penguatan kelembagaan, memperbaiki infrastruktur, tanggap terhadap bencana, dan bukan membantu perekonomian saja. Selain itu, banyak kegiatan

yang kurang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang terhambat ataupun gagal. Desa Ujung Jaya depot air minum sedang tidak berjalan dikarenakan sedang mengalami kekeringan, Desa Cigorondong penanaman mangrove rusak dikarenakan ketidaktahuan masyarakat untuk menanam yang benar. Belum tercapai 5 bina dikarenakan dana yang tidak memadai. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait 5 bina, bina tanggap bencana yang menjadi tujuan program PKPT ini malah terabaikan karena masyarakat fokus kepada bina usaha. Dalam proses pemeliharaan dilakukan dengan cara membentuk tim pemeliharaan, dari hasil penjualan depot, sewa kapal, ataupun pengaliran air bersih kerumah dijadikan sebagai biaya pemeliharaan hanya anggota KMP yang bertanggung jawab atas pemeliharaan hasil program.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian mengenai Partisipasi Masyarakat Pesisir Dalam Program Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh Di Kecamatan Sumur berdasarkan teori penelitian partisipasi masyarakat menurut Cohen Uphoff tentang partisipasi masyarakat terdapat 4 indikator yaitu, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan dan pemeliharaan hasil dan Derajat Partisipasi menurut Arnstein “*Ladder of Participation*” dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat pesisir dalam Program Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh di Kecamatan Sumur belum optimal. Dengan data yang didapatkan dilapangan sebagai berikut :

Pertama, perencanaan diawali dengan musyawarah untuk melakukan pembentukan kelompok. Selanjutnya kelompok dibuatkan akta notaris agar jelas legalitasnya. Dalam pembentukan kelompok umumnya diambil disetiap kampung dimasing – masing desa, agar tidak terjadi kecemburuan sosial. Namun masih ada masyarakat yang enggan menjadi pengurus atau anggota kelompok dikarenakan beban tanggung jawab yang diberikan. Pembuatan Rencana Kegiatan Kelompok (RKK), mengacu pada Rencana Pengembangan Kawasan Pesisir (RPKP) lima tahun, dan melakukan review RPJMDes didampingi oleh perangkat desa dan masyarakat yang aktif. Partisipasi dalam perencanaan Program Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh di desa Cigorondong masuk kedalam tangga kelima

yaitu, Perujukan (*Placation*), karena komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah sudah berjalan dengan baik, masyarakat dimungkinkan untuk membentuk kelompok sendiri serta mengusulkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, walaupun hasil akhirnya pemerintah yang menentukan layak atau tidaknya program yang diusulkan oleh masyarakat melalui survei dan verifikasi. Partisipasi dalam perencanaan Program Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh di desa Tamanjaya masuk kedalam tangga kelima yaitu, Perujukan (*Placation*), karena komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah sudah berjalan dengan baik, pembuatan Rencana Kerja Kelompok (RKK) mengacu pada RPJMDes sehingga program yang dipilih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Keanggotaan Kelompok Masyarakat Pesisir (KMP) juga diambil dari masing-masing kampung sehingga dapat memberikan masukan lebih signifikan dalam pengambilan keputusan. Partisipasi dalam perencanaan Program Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh di desa Ujung Jaya masuk kedalam tangga keempat yaitu, Konsultasi (*Consultation*), karena komunikasi sudah bersifat dua arah, ada kegiatan penjangkaran aspirasi melalui musyawarah, namun masyarakat masih enggan untuk berpartisipasi lebih aktif dalam mengikuti keanggotaan kelompok dikarenakan tidak siap akan pertanggung jawaban kegiatan.

Kedua, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan tidak hanya anggota Kelompok Masyarakat Pesisir (KMP) saja yang terlibat melainkan masyarakat pun ikut membantu, umumnya bantuan mereka berupa tenaga dan konsumsi saat proses kegiatan berlangsung. Namun beberapa hambatan yang dialami antara lain yaitu, masih banyak masyarakat yang berpikir akan mendapat

keuntungan pribadi dari bantuan yang mereka berikan, sulitnya akses membuat terhambatnya proses pengerjaan, faktor cuaca yang tidak menentu, rendahnya kesadaran masyarakat akan pemahaman program ini merupakan program swadaya, rendahnya kemampuan masyarakat dalam tertib administrasi, dan kesibukan masing – masing anggota yang menghambat proses kegiatan. proses pelaksanaan di desa Cigorondong, Partisipasi dalam pelaksanaan Program Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh di desa Cigorondong masuk kedalam tangga kelima yaitu, Perujukan (*Placation*) karena, masyarakat melalui KMP sudah memberikan masukan – masukan yang signifikan dalam mengembangkan pelaksanaan kegiatan. Partisipasi dalam pelaksanaan Program Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh di desa Tamanjaya masuk kedalam tangga keempat yaitu, Konsultasi (*Consultation*) karena, partisipasi sudah terlihat bersifat dua arah, tetapi rendahnya kemampuan administrasi anggota kelompok menghambat dalam pembuatan laporan yang merupakan hasil dari aspirasi masyarakat, sehingga kelompok kesulitan menuangkan masukan – masukan yang bermanfaat dalam dokumen resmi. Partisipasi dalam pelaksanaan Program Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh di desa Ujung Jaya masuk kedalam tangga keempat yaitu, Konsultasi (*Consultation*) karena, komunikasi masyarakat dan pemerintah sudah berjalan dengan baik, tetapi dalam pelaksanaan masyarakat masih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan bersama.

Ketiga, Partisipasi masyarakat dalam pengawasan program Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT) dilakukan oleh masyarakat dan ditampung oleh pihak desa dan dimusyawarahkan dengan KMP. Selain itu

pengawasan juga dilakukan oleh pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pandeglang. Dari ketiga desa yaitu desa Cigorondong, desa Tamanjaya dan Desa Ujung Jaya,). Partisipasi masyarakat dalam pengawasan masuk kedalam tangga kelima yaitu, Perujukan (*Placation*) karena, fungsi pengawasan sudah berjalan dengan baik antara pemerintah dan masyarakat, masyarakat ikut mengawasi proses pembangunan yang berjalan, masyarakat berpartisipasi dalam pengawasan dalam pembangunan diwadahi oleh perangkat desa, selain itu pengawasan juga dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Keempat, partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan dan penerimaan hasil masih kurang baik, dari program PKPT ini banyak manfaat yang dirasakan masyarakat, antara lain perbaikan infrastruktur, mudahnya akses air bersih, peningkatan ekonomi. Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan dan pemeliharaan hasil dari program PKPT ini di ketiga desa yaitu desa Cigorondong, desa Tamanjaya dan Desa Ujung Jaya masuk kedalam tangga keempat yaitu, Konsultasi (*Consultation*) karena banyak manfaat yang dirasakan oleh masyarakat, seperti mudahnya mobilitas dikarenakan akses jalan yang baik, membantu perekonomian, serta meningkatkan kualitas kesehatan. Banyak masyarakat yang mengharapkan program bina usaha lebih diperbanyak, sedangkan tujuan utama program ini adalah penguatan kelembagaan, memperbaiki infrastruktur, tanggap terhadap bencana, dan bukan membantu perekonomian saja. Selain itu, banyak kegiatan yang kurang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang terhambat ataupun gagal. Desa Ujung Jaya depot air minum sedang tidak berjalan dikarenakan sedang mengalami

kekeringan, Desa Cigorondong penanaman mangrove rusak dikarenakan ketidaktahuan masyarakat untuk menanam yang benar. Belum tercapai 5 bina dikarenakan dana yang tidak memadai. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait 5 bina, bina tanggap bencana yang menjadi tujuan program PKPT ini malah terabaikan karena masyarakat fokus kepada bina usaha. Dalam proses pemeliharaan dilakukan dengan cara membentuk tim pemeliharaan, dari hasil penjualan depot, sewa kapal, ataupun pengaliran air bersih kerumah dijadikan sebagai biaya pemeliharaan hanya anggota KMP yang bertanggung jawab atas pemeliharaan hasil program.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas peneliti ajukan beberapa rekomendasi yaitu :

1. Menekankan sosialisasi kepada seluruh masyarakat bahwa program ini merupakan program swadaya, agar masyarakat tidak memikirkan akan mendapat keuntungan pribadi
2. Penyampaian pemahaman 5 (lima) bina yang menjadi fokus tujuan program ini, agar masyarakat memahami apa yang harus dicapai dalam program ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan kesiapan terhadap bencana dan perubahan iklim. Pengembangan kawasan pesisir tangguh dalam pelaksanaannya memberikan bantuan pengembangan manusia, sumberdaya, infrastruktur /lingkungan, usaha,

dan siaga bencana dan perubahan iklim, bukan hanya pengembangan infrastruktur dan ekonomi saja.

3. Pelatihan kepada anggota Kelompok Masyarakat Pesisir (KMP) terkait administrasi dan penguatan kelembagaan
4. Memberikan kesempatan kepada Kelompok Masyarakat Pesisir (KMP) untuk meminta rekomendasi yang berhubungan dengan program yang akan dijalankan, misalnya untuk penanaman mangrove yang baik agar tidak rusak terkena arus, usaha yang cocok didaerahnya, ataupun uji sampel air minum agar dapat berkembang menjadi BUMDes. Agar kegiatan yang dipilih oleh masyarakat dapat lebih bermanfaat
5. Kepemimpinan dari kepala desa agar menekankan kepada masyarakat bahwa pemeliharaan tidak hanya tanggung jawab anggota KMP, melainkan seluruh masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Buku

- Adi, Isbandi Rukminto. 2008. *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Adisasmita, Raharjo. 2006. *Paradigma dan Pendekatan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Aminah, Siti. 2007. *Kearifan Lokal dalam Pengembangan Komunitas Pesisir*. Bandung: CV Citra Praya.
- Bungin, Burhan. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan*. Jakarta : Kencana.
- Dahuri. *Et al.* 2001. *Sumber Daya Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Hamidjojo, Santoso S. 1988. *Partisipasi Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Alumni.
- Hikmat, Harry. 2005. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora Utama Press.
- La Sara, Prof., Ir., M.Si., Ph.D. 2014. *Pengelolaan Wilayah Pesisir: Gagasan Memelihara Aset Wilayah Pesisir dan Solusi Pembangunan Bangsa*. Bandung: Alfabeta.
- Kaho, Josef Riwu. 2007. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kusnadi, Drs, M.A. 2006. *Filosofi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir*. Bandung: Humaniora.
- Makmur, Syarif. 2008. *Pemberdayaan SDM dan Efektivitas Organisasi*. Jakarta; PT Raja Grafindo Persada.
- Mikkelsen, Birtha. 1999. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- MS, Wahyu. 2005. *Perubahan Sosial dan Pembangunan*. Jakarta: Mitra Utama.
- Muluk, M. K. (2002). *Mewujudkan Partisipasi Publik Dalam Pemerintahan Daerah*. Jakarta: FISIP Universitas Indonesia.
- Mulyadi. (2005). *Ekonomi Kelautan*. JAKARTA: PT Raja Grafindo Persada.

- Nugraha, Iwan dan Rochim Dahuri. 2004. *Pembangunan Wilayah: Perspektif Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan*. Jakarta: LP3ES.
- Riyadi & Deddy Supriady Bratakusumah. 2004. *Perencanaan Pembangunan Daerah, Strategi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rukminto, Isbandi. 2008. *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Rajawali.
- Sastropetro, Santoso. 1998. *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin Dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Siti Irene Astuti Dwiningrum, DR. 2011. *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soetomo. 2006. *Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Siagian, Sondang P. 2005. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Supriharyono. 2007. *Konservasi Ekosistem Sumberdaya Hayati Di Wilayah Pesisir Dan Laut Tropis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syani, Abdul. 1995. *Sosiologi dan Perubahan Masyarakat*. Lampung: Pustaka Jaya.
- Tangkilisan, S Nogi, Hessel. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: Grasindo.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1995. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.

Penelitian Terdahulu

- Ulifah, Siti. 2003. *Partisipasi Masyarakat Dalam Proyek Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan*. Tesis (tidak diterbitkan). Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.
- Sapei, Abdulah. 2015. *Partisipasi Masyarakat Dalam Program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh Di Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang*. Skripsi (tidak diterbitkan). Serang: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Masrofah. 2012. *Partisipasi Masyarakat Dalam Penanggulangan Abrasi Pantai di Wilayah Pesisir Utara Serang Banten (Studi Kasus Desa Lontar*

Kabupaten Serang). Skripsi (tidak diterbitkan) Serang: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Tahun 2004 tentang Pemerintah Desa.

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : Kep.07/MEN/2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Tahun 2012

Peraturan Direktur Jendral KP3K No. 04/PER-DJKP3K/2013 Tentang Pedoman Teknis Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh.

Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 523/Kep. 295- Huk/2015 tentang Penetapan Desa Pesisir Penerima Bnatuan Langsung Masyarakat (BLM) Pada Kegiatan Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT) Tahun Anggaran 2015

Dokumen

Banten dalam Angka 2015

Pandeglang dalam Angka 2015

Rencana Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh 2015

Kecamatan Sumur dalam Angka 2017

Sumber Lain

www.kkp.go.id diakses pada 20 Desember 2015

<http://pdpt.gaismamedia.com> diakses pada 12 Januari 2016